

**Tesis**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN  
KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN MAJENE**

*The effectiveness for the Rural Government Functions in  
Application into the Local Autonomy Implementation  
at Majene Regency*

**AZIS SAID  
P0804204537**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

**Tesis**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN  
KELURAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJENE**

**Diajukan oleh**

**A Z I S S A I D  
P0804204537**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2007**

## **Proposal Karya Ilmiah**

### **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MARAKNYA AKSI-AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR**

*The All Perception Of People About More Much Scholars of Students  
Doing Demonstration In Actions At Makssar City*

**Diajukan oleh**

**Nama : Mutaminnah  
Kelas : XI IPS II  
No.Urut : 16  
NIS : 2520411**

**SMA NEGERI 3 MAKASSAR**

**2007**

**Tesis**

**EFEKTIVITAS FUNGSI PEMERINTAHAN KELURAHAN  
TERHADAP KELANCARAN ADMINISTRASI PELAYANAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJENE**

**Diajukan oleh**

**A Z I S S A I D  
P0804204537**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2007**

## Lembar Pengesahan

Nama : AZIS SAID  
Nomor Pokok : PO804204537  
Program Studi : Administrasi Pembangunan  
Kekhususan : Pemerintahan Daerah  
Judul : Efektivitas Fungsi Pemerintahan Kelurahan dalam  
Menunjang Kelancaran Administrasi Pelayanan  
Masyarakat di Kabupaten Majene

Menyetujui

**Komisi Penasihat,**

**Prof.Dr.Muh.Nur Sadik, MPM**

Ketua

**Dra.Hj.A.Reni, M.Si**

Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Administrasi Pembangunan

**Prof.Dr.Muh.Nur Sadik, MPM**

## ABSTRAK

**AZIS SAID. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kelurahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Majene** (dibimbing oleh Muh.Nur Sadik dan Hj.A.Reni,).

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene, dan 2) menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12.621 KK pada 14 kelurahan di Kabupaten Majene. Sampel lokasi 5 wilayah kelurahan dan sampel masyarakat sebanyak 100 KK. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive random sampling*. Teknik pengumpulan data dipergunakan observasi, dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan *belum efektif* dalam mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene, hal itu terutama disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi dan pembinaan. Pelaksanaan fungsi koordinasi perangkat aparatur pemerintah kelurahan masih dilakukan terbatas pada hubungan struktural saja secara Bottom-Up dan Top Down (Koordinasi Vertikal), sedangkan koordinasi horisontal dengan instansi terkait atau lembaga lainnya jarang dilakukan. Fungsi pembinaan terutama belum dilaksanakan secara baik melalui pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan, 7 faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, kemampuan koordinasi dan kerjasama, hubungan komunikasi, kemampuan kerja/ teknis, prasarana dan sarana, serta peran kelembagaan. Namun faktor yang dominan adalah motivasi kerja, kemampuan teknis. Rendahnya motivasi terutama dalam hal pemahaman tugas dan tanggung jawab, sedangkan kemampuan teknis kerja terutama masih rendahnya kualitas keterampilan. Disiplin kerja aparatur juga masih rendah terutama akibat perilaku aparatur yang suka menunda pekerjaan. Dalam hal koordinasi dan kerjasama, perangkat aparatur pemerintah kelurahan masih terbiasa menganggap kurang penting. Faktor komunikasi aparatur sudah baik, sedangkan faktor prasarana dan sarana sudah tersedia namun masih perlu ditingkatkan. Demikian pula kelembagaan pemerintah kelurahan belum optimal dalam memainkan peranannya akibat masih lemahnya komitmen pimpinan dan perangkat aparatur, kurangnya empati, responsibilitas serta akuntabilitas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan secara keseluruhan di Kabupaten Majene.

Pentingnya 14 pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya sesuai tuntutan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PP No.73 Tahun 2005 tentang kelurahan, PERDA Kab.Majene No.8 tahun 2001 tentang susunan lembaga teknis daerah, dan Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majene.

## **ABSTRACT**

**AZIS SAID. *The Effectiveness of the Rural Government in Functions Implementation to Establish Influent Local Autonomy Applications in the Majene Regency*** (under supervising by **Muh.Nur Sadik and Hj.A.Reni,**).

This research aim to: 1) analyze and description all functions of Rural Government to implemented into its main job performance in order to support influent local autonomy in the Majene Regency, and 2) analyze and explain any description on determinant of factors have been influence its effectiveness of Rural Government apply its functions to implement its main job in order to support influent local autonomy in the Majene Regency.

The population in this research are 12.621 households at 14 rurals of Majene Regency. There are 5 rural as sample and 100 households as respondents. Technical sampling used by *purposive random sampling*. Dat collect by observation, documentations, questionnaires list, and deeply structural interviews. A qualitative descriptive is analyzed any data collect them.

The results of this research indicated that the rural government functions have not been effective implemented yet into all main jobs performance, which are caused by less optimum to apply coordination and actuation in functions. Some employers owned the Rural Government can't be optimum establish their jobs into it except many done vertical and bottom up coordination but horizontal ones not be effective it especially to with other institutions owned Majene Government as a local autonomy. For while, any education and training on the job are not less established it.

For all, there are 7 determinant of factor have been influence the Rural Government to apply their functions include motivation, discipline, coordination and cooperate, technical skill capability, infrastructures and facilities, and institutional role them. But dominant factor are lower motivation and technical skill influence their performance in all functions, especially less understanding and responsibility to apply their main jobs. Beside that lower discipline and coordination and cooperating each another have more influence them and also its institutions role with lower commitment of leader and staffs are too more influence their job performance. But for communication have been better establish them, and given more infrastructures and facilities available still need them in order to improving their functions performance all it.

It most important establish by Rural Government in order to be effective their performance into all functions apply them based on the Law No.32 Year 2004 on local government, Rule of Government No.73 Year 2005 on rural government, Rule of Majene Government No.8 Year 2001 on local institutions organization, and a Decision of Head Regency of Majene No.365 Year 2001 on Job Descriptions of Tasks and Functions need Rural and District Government establish in order to influent support the Majene Local Autonomy performance.

*Keyword* .

\*) *Effectiveness, Functions, Rural Government, Local Autonomy in application, implementations*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Konsep Efektivitas .....	15
B. Konsep Pelaksanaan dan Kebijakan Publik .....	21
C. Konsep Fungsi dan Peranan .....	27
D. Fungsi Pemerintah Kelurahan sebagai Administrator Pelayanan Publik dan <i>Good Governance</i> .....	30
E. Kedudukan Tugas dan Fungsi Aparatur dan Perangkat Kelembagaan Pemerintah Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat .....	42
F. Dimensi-Dimensi Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial .....	51
G. Otonomi Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	47

H. Faktor-Faktor Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan .....	70
I. Kerangka Konseptual .....	83
J. Definisi Operasional.....	90
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>100</b>
A. Lokasi Penelitian .....	100
B. Populasi dan Sampel.....	100
C. Jenis dan Sumber Data.....	101
D. Teknik Pengumpulan Data.....	102
E. Teknik Analisa Data.....	102
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>104</b>
A. Deskripsi Umum Kabupaten Majene .....	104
B. Deskripsi Umum Kelurahan di Kabupaten Majene .....	109
C. Deskripsi Umum Pemerintahan Kelurahan .....	133
D. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Majene .....	143
1. Fungsi Koodinasi .....	143
2. Fungsi Pembinaan .....	151
3. Fungsi Pelayanan Administrasi Kependudukan .....	161
4. Fungsi Pelayanan Teknis Administrasi dan Tata Kerja Organisasi.....	176
5. Fungsi Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial ..	182
6. Fungsi Pembangunan Kesejahteraan Sosial .....	203
7. Fungsi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	221
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene .....	234
1. Motivasi .....	234
2. Hubungan Komunikasi.....	240

3. Kemampuan Koordinasi dan Kerjasama .....	245
4. Prasarana dan Sarana .....	250
5. Kemampuan Teknis.....	258
6. Peran Kelembagaan .....	265
F. Pembahasan.....	275
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>284</b>
A. Kesimpulan .....	284
B. Saran.....	285
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>287</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>289</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	Keadaa Wilayah Kecamatan di Kabupaten Majene, Tahun 2007	105
2	Keadaan Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	107
3	Keadaan Penduduk di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	108
4	Distribusi Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007.....	110
5	Keadaan Luas Wilayah Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007....	112
6	Keadaan Penduduk Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007 .....	113
7	Keadaan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	116
8	Keadaan kegiatan usaha pertanian dan perkebunan penduduk pada Kelurahan di Kabupate n Majene, Tahun 2007.....	119
9	Perkembangan produksi populasi hewan ternak pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007 .....	120
10	Perkembangan jumlah nelayan dan petani ikan, serta fasilitas penangkapan ikan pada Kelurahan di Kab. Majene, Tahun 2007.....	122
11	Perkembangan produksi perikanan pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	122
12	Keadaan Perdagangan dan Industri Kelurahan di Kab. Majene, Tahun 2007.....	124
13	Perkembangan industri jasa pariwisata pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	125
14	Keadaan fasilitas pendidikan pada 14 Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	127
15	Keadaan Prasarana Pelayanan Kesehatan pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	129

16	Keadaan Sarana Pelayanan Kesehatan pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	130
17	Keadaan Prasarana Tempat Ibadah pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007.....	131
18	Keadaan fasilitas perekonomian pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007 .....	132
19	Keadaan Lembaga dan Orsos di Kelurahan Kab. Majene, 2007	135
20	Keadaan Lembaga Sosial Masyarakat yang dibina oleh 14 Pemerintah Kelurahan di Kab. Majene, 2007.....	135
21	Keadaan Sumber Daya Aparatur (SDA) Pemerintah Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007 .....	139
22	Keadaan Pendidikan Aparatur Pemerintah Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007 .....	140
23	Keadaan Prasarana Kantor Pemerintahan Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007 .....	142
24	Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Setda (Hasil olahan data primer, 2007) .....	145
25	Pendapat responden tentang keaktifan aparatur pemerintah kelurahan melakukan koordinasi dengan pimpinan/ aparat instansi terkait (Hasil olahan data primer, 2007) .....	148
26	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi koordinasi pada pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	150
27	Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan melakukan pembinaan melalui pengarahan / penyuluhan kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam lingkup kelurahannya (Hasil olahan data primer, 2007) .....	152
28	Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan melakukan sosialisasi dalam rangka pembinaan tatacara pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kelurahannya (Hasil olahan data primer, 2007) .....	154

29	Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan melakukan sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan perangkat kelembagaannya dalam lingkup wilayah pemerintahannya (Hasil olahan data primer, 2007).....	157
30	Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan dan perangkat aparaturnya melakukan pembinaan teknis dan prosedur pelayanan administrasi kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya (Hasil olahan data primer, 2007).....	159
31	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pembinaan pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	161
32	Pendapat responden tentang keaktifan aparatur pemerintah kelurahan melakukan pendataan dan pendaftaran penduduk di wilayah kelurahan masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	163
33	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian kesesuaian validitas data dari hasil pendataan penduduk di wilayah kelurahan masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)	165
34	Pendapat responden tentang kemudahan pengurusan KTP di Kantor Kelurahan (Hasil olahan data primer, 2007) .....	166
35	Pendapat responden tentang tingkat kesesuaian prosedur pengurusan KTP di Kantor Kelurahan dengan mekanisme yang berlaku (Hasil olahan data primer, 2007) .....	168
36	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian transparansi dan keadilan dalam pengurusan KTP di Kantor Kelurahan (Hasil olahan data primer, 2007) .....	171
37	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian akuntabilitas dan kedisiplinan pengurusan KTP di Kantor Kelurahan (Hasil olahan data primer, 2007) .....	173
38	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	175

39	Pendapat responden tentang keaktifan aparat kelurahan melakukan pendataan dan pencatatan sipil kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya (Hasil olahan data primer, 2007) .....	176
40	Pendapat responden tentang keaktifan aparat kelurahan mendistribusikan penerbitan surat-surat pajak, sertifikasi tanah serta retribusi kepada warga masyarakat dalam wilayah kerjanya (Hasil olahan data primer, 2007).....	178
41	Pendapat responden tentang kelancaran pengurusan surat-surat izin tertentu bagi warga masyarakat yang membutuhkan (Hasil olahan data primer, 2007) .....	180
42	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan teknis administrasi di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	182
43	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas pendidikan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	184
44	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas kesehatan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	186
45	Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas peribadatan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007).....	189
46	Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas pasar di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	191
47	Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi ketersediaan fasilitas keuangan/ pembiayaan (koperasi, bank) di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	194

48	Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	196
49	Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pemeliharaan infrastruktur jalan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	198
50	Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur TPI di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	200
51	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan bidang pembangunan dan pemeliharaan Fasum dan Fasos di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	202
52	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembinaan usaha bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)	204
53	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	207
54	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong kegiatan penyaluran bantuan modal usaha bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	209
55	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil-hasil perikanan bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)	211
56	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil-hasil pertanian/ perkebunan dan produksi ternak bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing	

	(Hasil olahan data primer, 2007) .....	213
57	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi kegiatan pembukaan lapangan kerja bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	216
58	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi kegiatan penyaluran dana BLT, raskin dan lainnya bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	218
59	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	220
60	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan memelihara stabilitas dan perlindungan masyarakat di wilayah kelurahannya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	222
61	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan menyelesaikan perselisihan atau sengketa ataupun konflik antar warga di wilayah kelurahannya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	224
62	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendirikan pos-pos siskamling di wilayahnya (Hasil olahan data primer, 2007) .....	226
63	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan/ penegak hukum dalam rangka perlindungan keamanan warga di wilayah kelurahannya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007) .....	228
64	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan memberikan bantuan terhadap warga yang mengalami gangguan keamanan atau tertimpa musibah (Hasil olahan data primer, 2007) .....	231
65	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum (Trantib) di Kabupaten	

	Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	232
66	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan Otoda di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	233
67	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pemahaman tugas dan fungsi perangkat aparatur pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	235
68	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian tanggung jawab pelaksanaan fungsi aparatur pemerintah kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	236
69	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian harapan pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah kelurahan yang mendorong pelaksanaan fungsi pelayanannya secara optimal dan efektif (Hasil olahan data primer, 2007) .....	238
70	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian motivasi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	240
71	Pendapat responden tentang tingkat keterlibatan aktif perangkat aparatur pemerintah kelurahan mengajak warga masyarakat melakukan hubungan komunikasi dalam memberikan pelayanan (Hasil olahan data primer, 2007) .....	241
72	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterbukaan perangkat aparatur pemerintah kelurahan melakukan hubungan komunikasi dengan warga masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	243
73	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian komunikasi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	244
74	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan perangkat aparatur pemerintah kelurahan melakukan koordinasi dan kerjasama dalam setiap pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	246

75	Pendapat responden tentang tingkat kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara perangkat aparaturn pemerintah kelurahan dengan harapan/ keinginan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	248
76	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian hubungan koordinasi dan kerjasama pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	249
77	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian ketersediaan ruangan kerja/ tamu pada kantor pemerintah kelurahan dalam rangka pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	251
78	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian kenyamanan ruangan kerja/ tamu pada kantor pemerintah kelurahan dalam rangka pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	252
79	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian ketersediaan fasilitas kerja administrasi pada kantor pemerintah kelurahan dalam rangka melancarkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)	254
80	Pendapat responden tentang ketersediaan fasilitas kerja operasional guna melancarkan operasionalisasi pelayanan (Hasil olahan data primer, 2007) .....	256
81	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian ketersediaan prasarana dan sarana pada kantor pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	257
82	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian ketersediaan tenaga teknis pada kantor pemerintah kelurahan yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	258
83	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pendidikan aparaturn pada kantor pemerintah kelurahan yang mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	260

84	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian kemampuan keterampilan aparatur pada kantor pemerintah kelurahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	262
85	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian kemampuan kerja teknis pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsinya (Hasil olahan data primer, 2007)	264
86	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian komitmen pimpinan pemerintah kelurahan dalam mengefektifkan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	266
87	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian empati pimpinan pemerintah kelurahan dalam memberikan perhatian terhadap setiap permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan oleh warga masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	268
88	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan tanggung jawab/ tanggung jawab pimpinan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007) .....	269
89	Pendapat responden tentang tingkat kesesuaian aplikasi kebijaksanaan program-program pelayanan prima dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kelurahan (Hasil olahan data primer, 2007).....	271
90	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian peran kelembagaan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	273
91	Pendapat responden tentang tingkat pencapaian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007) .....	274

## DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Kerangka Konseptual .....	89
2	Peta Penyebaran Kelurahan di Kabupaten Majene, 2007.....	111
3	Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan.....	134

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dinamika perkembangan penyelenggaraan sistem pemerintahan secara historis politik dan sosial memiliki latar belakang sejarah dan tata nilai yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan kekuasaan atau wewenang dari pihak yang memerintah kepada yang diperintah. C.F.Strong dalam Pamudji (1992:23-24) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah organisasi dalam hal mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.

Menurut Samuel Edward Finer, paling sedikit ada empat arti dari pemerintahan itu, yaitu 1) menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain, 2) menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses memerintah dijumpai, 3) menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah, dan 4) menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan dalam pengertian sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam

rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (Pamudji, 1992: 24-25).

Maas dalam Sarundajang (2002) menyatakan fungsi utama pemerintahan adalah fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pelayanan (*services*). Suatu negara, bagaimanapun bentuknya dan seberapa luas wilayahnya tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral terus menerus, dan keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada pemerintah daerah sehingga kewenangan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum didistribusikan secara sentral dan lokal.

Di Indonesia, sistem penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami perubahan dari asas sentralisasi menjadi asas desentralisasi sejak berlakunya Otonomi Daerah (Otda) berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Berlakunya Otda tersebut sekaligus membawa konsekuensi terhadap reformasi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan di sejumlah daerah khususnya daerah kabupaten dan kota, termasuk perubahan struktur kelembagaan di tingkat pemerintahan kelurahan. Konsekuensi terhadap sejumlah perubahan kelembagaan tersebut mendorong pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No.08 Tahun 2004 tentang

pedoman pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang sekaligus menjadi acuan bagi setiap pemerintahan daerah otonom untuk menata ataupun merestrukturisasi organisasi kelembagaan perangkat daerahnya.

Keberadaan sejumlah aparatur dalam organisasi pemerintahan mengemban tugas dan fungsi pelayanan administrasi kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun operasional. Menurut Prayudi (1982: 16), hakikat administrasi (pelayanan) meliputi adanya 1) pengaturan kerjasama, 2) kegiatan sekelompok orang, 3) mencapai tujuan tertentu, dan 4) secara rasional. Pangkal tolak administrasi adalah organisasi. Selain unsur statis, juga merupakan wadah tempat orang-orang bekerjasama dalam suatu pola tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan, sehingga terjadi proses dinamis secara rasional guna mencapai tujuan. Administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan dijalankan oleh seorang Lurah dengan perangkat aparatur dan kelembagaannya. Kedudukan organisasi pemerintah kelurahan sebagai unit terendah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah memainkan peranan yang vital dan strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah dalam suatu daerah kabupaten atau kota, termasuk pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.

Di Kabupaten Majene, terdapat 14 organisasi pemerintahan kelurahan yang telah terbentuk sejak berlaku efektifnya otonomi daerah tersebut pada 01 Juni tahun 2000. Keempat belas kelurahan tersebut secara geografis tersebar pada empat kecamatan yaitu 9 kelurahan di

Kecamatan Banggae, masing-masing 2 kelurahan di Kecamatan Pamboang dan Sendana, serta 1 kelurahan di Kecamatan Malunda.

Penyelenggaraan pemerintahan pada keempat belas kelurahan tersebut, berlangsung atau dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kelurahan yaitu Lurah dan perangkat aparatur serta perangkat kelembagaannya berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan. Dalam Pasal 1 dinyatakan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan (1) kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang berkedudukan di kecamatan, (2) kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui camat. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ayat (2) Lurah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota, ayat (3) urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, ayat (4) pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 5 PP No 37 Tahun 2005 menetapkan bahwa Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) mempunyai fungsi yaitu : 1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, 2) pemberdayaan

masyarakat, 3) pelayanan masyarakat, 4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan 6) pembinaan lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, ayat 2) setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Ketentuan tersebut di atas juga sejalan dengan keputusan Pemkab Majene sebelumnya, yaitu Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan Kabupaten Majene, dimana dalam penjabarannya menyebutkan bahwa Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi yaitu: 1) koordinasi staf, 2) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, 3) pembinaan pelaksanaan pembangunan, 4) pembinaan kemasyarakatan, dan 5) pembinaan administrasi, organisasi dan tata kerja serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan. Selanjutnya Pasal 7 PP No.73 Tahun 2005 menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Upaya melancarkan pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan tersebut, maka dalam struktur kelembagaannya telah terbentuk susunan organisasi yang didalamnya termuat adanya pimpinan (Lurah), Sekretaris Lurah (Seklu) serta didukung 3 seksi yaitu Seksi Pemerintahan

Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Umum. Ketiga seksi tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan didukung beberapa orang aparatur. Hal ini sejalan dengan Robbins (1995: 4) yang menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dalam organisasi pemerintahan kita dapat menemukan adanya individu atau sekelompok individu (aparatur) yang bekerja sesuai dengan keahlian dan tugas-tugas tertentu sehingga dikatakan organisasi adalah sebagai wadah tempat berlangsungnya kegiatan (*to get the job done*)

Realitas perkembangan yang terjadi, pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene kurang optimal melaksanakan fungsinya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Hal ini jelas terlihat dari beberapa indikator pelaksanaan fungsi koordinasi yang terkesan dianggap kurang penting atau dikesampingkan bahkan cenderung diabaikan dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan aparatur baik koordinasi vertikal (yaitu dengan pemerintah kecamatan dan pimpinan daerah) maupun koordinasi horizontal (yaitu koordinasi dengan instansi terkait) serta koordinasi dengan masyarakat dalam wilayah pemerintahannya. Demikian halnya fungsi pembinaan yang diemban oleh pemerintah kelurahan, juga nampak menunjukkan

pelaksanaan yang kurang konsisten dan berkelanjutan serta tidak komprehensif. Kenyataan ini misalnya terlihat pada kurang aktifnya dan masih rendahnya motivasi aparat pemerintah kelurahan terlibat mengambil peran melakukan penyuluhan-penyuluhan, pengarahan-pengarahan ataupun sosialisasi suatu kebijaksanaan yang hendak dilaksanakan dan perlu diinformasikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam bidang pembangunan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) dan bidang pembangunan kesejahteraan sosial juga terlihat masih kurang optimal. Hal ini diindikasikan masih terbatasnya ketersediaan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas perekonomian, sampai kepada infrastruktur jalan. Sebagian besar masyarakat yang ada di masing-masing kelurahan, masih sangat berharap peranan Pemerintah Kelurahan mau memberikan perhatian untuk meningkatkan jumlah sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, jalan, termasuk fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI) untuk memasarkan produksi hasil perikananannya.

W.J.S. Poerwadarminta (1992) mengemukakan bahwa fungsi adalah suatu peranan yang menjadi pokok (hal) yang besar pengaruhnya dalam suatu peristiwa. Fungsi pemerintah kelurahan dalam peningkatan pembangunan dan masyarakat kelurahan mencakup aspek fisik dan masyarakat sebagai suatu tugas pekerjaan membangun kehidupan

masyarakat yang berkualitas. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 telah menetapkan sejumlah ketentuan hak dan kewenangan dalam rangka pengelolaan potensi daerah dengan harapan bahwa setiap kelurahan dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi daerahnya untuk kelancaran pembangunan dan pemerintahan serta lebih memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi masyarakat pada empat belas kelurahan yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan petani, dan relatif masih berada di bawah garis kemiskinan, juga sangat membutuhkan peran pemerintah daerah khususnya pemerintah kelurahan untuk memberikan perhatian dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha, pembukaan lapangan kerja dan lainnya, sehingga diharapkan pendapatan dan taraf hidup mereka dapat meningkat menjadi golongan masyarakat yang sejahtera. Namun kenyataannya, Pemerintah Kelurahan kurang didukung oleh kemampuan teknis aparatur yang cakap dan profesional sehingga kurang mampu memenuhi harapan dan keinginan masyarakat tersebut.

Pembangunan masyarakat merupakan usaha yang berat dan banyak segi-seginya yang harus diperhatikan, olehnya itu tanpa adanya pengertian yang cukup dari masyarakat maka dengan sendirinya tujuan pembangunan tidak tercapai. Kepmen Depdagri dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat (2000) menguraikan bahwa

pembangunan adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistimatis dan terarah sebagai bagian terpenting dalam usaha pembangunan negara secara menyeluruh.

Performansi pelaksanaan fungsi kelembagaan pemerintah kelurahan yang kurang menunjukkan prestasi atau keberhasilan tersebut, sudah seharusnya dievaluasi oleh pemerintah daerah dengan harapan bahwa sejumlah fungsi yang diemban oleh pemerintah kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam PP No.73 tahun 2005 dan SK Bupati Kabupaten Majene No.365 tahun 2001, dapat ditingkatkan atau dioptimalkan atau diefektifkan pelaksanaannya.

Kenyataan dari pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan yang demikian itu, mengindikasikan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhinya seperti motivasi, hubungan koordinasi dan kerjasama, hubungan komunikasi, kemampuan teknis, pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana, serta peran kelembagaan/ kepemimpinan. Maslow (1984) mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarah kepada perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Selanjutnya Herzberg dalam Gibson (1990) menjelaskan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kepuasan pegawai, dan faktor lainnya yang dapat mencegah terjadinya kepuasan dikalangan anggota organisasi. Kepuasan kerja (*Job Satisfaction*) tidak

berada pada tingkat yang sama dengan ketidakpuasan (*Job Dissatisfaction*). Faktor yang pertama adalah 'motivator' yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan perasaan positif terhadap pekerjaan dan isi pekerjaan itu, termasuk pengakuan terhadap kemampuan dan prestasi kerja, kesempatan karier, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan perasaan negatif terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Faktor higienis meliputi kebijakan organisasi, administrasi, supervisi teknis, gaji, kondisi kerja, hubungan antar pribadi dan organisasi. Sedangkan menurut Menurut Kaliski (dalam Gani, 1986 : 6) terdapat 4 (empat) dimensi faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja seseorang, yaitu keterampilan, mental, fisik, dan tanggungjawab.

Hasibuan (1997) menjelaskan bahwa secara spesifik, peningkatan kualitas kinerja sumber daya aparatur adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana untuk mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Pendidikan merupakan jalur utama untuk membangun pondasi kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu pendidikan harus mampu mengembangkan kepribadian, sikap mental, daya analisa, kreatifitas dan inovasi serta penguasaan pengetahuan yang luas.

Peran kelembagaan atau kepemimpinan menurut Hasibuan (1997) berpengaruh secara spesifik terhadap pelaksanaan fungsi aparatur

atau organisasinya secara keseluruhan, serta cukup strategis dalam membangun kinerja dalam suatu organisasi atau institusi. Selanjutnya Larry C. Spears (1999:119-121) dalam '*A Survey Of Theory And Research*', menyatakan bahwa kepemimpinan bukanlah popularitas, bukan kekuasaan, bukan kebijaksanaan dalam perencanaan jangka panjang, melainkan kepemimpinan merupakan faktor dalam menyelesaikan sesuatu dengan bantuan orang lain, pendengar, berorientasi tugas, mempunyai rasa strategis, berhasrat memahami, memberikan empati dan mau bekerjasama yang menuju peningkatan produktifitas kerja (kinerja). Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan individu untuk mengayomi kelompok masyarakat dan menyelesaikan masalah yang lebih efektif, efisien dan berdayaguna, sehingga setiap individu dipengaruhi oleh karakter, kepribadian, pengalaman, pengetahuan, serta situasi dan kondisi yang dihadapinya dalam suatu proses untuk memerankan kepemimpinan dalam organisasi sebagai penggerak, dinamisator segala sumber daya yang dimiliki organisasi, berperan sebagai pemimpin dalam organisasi yang memiliki tugas manajemen untuk menggerakkan orang lain atau kelompok, guna mencapai tujuan organisasi, serta berperan sebagai seorang pemimpin yang baik, berkewajiban membina hubungan pribadi (*human relation*) secara vertikal dan horizontal serta memiliki kemampuan dan kemauan berkomunikasi secara baik dan luwes.

Indrawijaya (1989 : 25) menyatakan bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi yang dicapai oleh total personil yang ada dalam

suatu lembaga/organisasi. Efektivitas organisasi dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Sedangkan menurut Etzioni (1985 : 12), efisiensi organisasi berkaitan dengan sumber daya per satuan *output*. Efektivitas ditentukan oleh adanya sumber daya dalam hal ini personil pelaksana kegiatan.

Pentingnya keempat belas pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan fungsi aparatur dan perangkat kelembagaannya sesuai tuntutan pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 sehingga diharapkan dapat terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang lancar dan efektif.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Otodas) di Kabupaten Majene ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan Otodas di Kab. Majene ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Praktikal**

Kegunaan praktikal yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai tuntutan aplikasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kelurahan dalam mengoptimalkan/ mengefektifkan pelaksanaan fungsi kelembagaannya sesuai tuntutan aplikasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004

##### **2. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Menambah khasanah pengembangan ilmu-ilmu administrasi pemerintahan daerah baik dalam kajian empiris maupun teoritis

pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar khususnya pada Konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah.

- b. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi atau peneliti lainnya yang akan meneliti lebih mendalam tentang efektivitas fungsi pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Efektivitas**

Terminologi efektivitas banyak digunakan dalam mengukur atau menilai suatu pencapaian tujuan dan sasaran dari pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Handyaningrat.S (1983:16), 'efektivitas' adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dalam proses administrasi dan manajemen, berarti tercapainya tujuan yang terpenting, tidak peduli pengorbanan yang diberikan. Hal ini juga berarti bahwa jika dalam suatu pekerjaan atau usaha tercapainya sasaran atau tujuan sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka usaha atau pekerjaan tersebut efektif, namun jika pekerjaan itu atau usaha yang dilakukan tidak tercapai sesuai apa yang telah direncanakan, maka hal itu tidak efektif.

The Liang Gie (1987 : 108) mendefinisikan efektifitas yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya efek atau akibat yang dikehendakinya; sesuatu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya. Jika dalam pekerjaan atau usaha tercapainya sasaran sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, namun jika pekerjaan yang dilakukan tidak cocok atau tidak tercapai sesuai yang direncanakan maka hal itu tidak efektif. Dari pengertian itu jelaslah bahwa efektifnya sesuatu terletak pada pencapaian

tujuan atau sasaran tanpa membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pekerjaan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam pencapaian tujuan yang efektif belum tentu dikatakan pencapaian tujuan yang efisien, oleh karena efisien merupakan hasil perbandingan terbaik antara input dan outputnya, namun jika pencapaian tujuan yang efisien maka dengan sendirinya juga adalah efektif. The Liang Gie menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, dari segi hasil, tujuan atau bagaimana akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu atau jumlah). Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu selalu efisien, karena hasil dapat tercapai tapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu atau benda.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik suatu makna bahwa efektifnya suatu organisasi pemerintahan kelurahan bukan saja diukur dari keuntungan yang diperolehnya tetapi juga dari jumlah pengeluaran atau outputnya yang makin lama makin menurun, dalam arti bahwa pengeluaran yang dimaksud adalah yang berupa input dana, pikiran dan tenaga yang dipergunakan makin lama makin menurun tetapi hasil yang dicapai meningkat atau minimal sama dengan sebelum turunnya input yang digunakan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap

bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*) maupun keluaran (*output*). Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan metode serta model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Indrawijaya (1989 : 25) menyatakan bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi yang dicapai oleh total personil yang ada dalam suatu lembaga/organisasi. Efektivitas organisasi dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Sedangkan menurut Etzioni (1985 : 12), efisiensi organisasi berkaitan dengan sumber daya per satuan *output*. Berdasarkan pendapat tersebut tergambar bahwa efektivitas ditentukan oleh adanya sumber daya dalam hal ini personil pelaksana kegiatan.

Dalam suatu organisasi, baik organisasi yang berskala besar maupun kecil, efektivitas merupakan konsep yang perlu diperhatikan karena efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaraannya (Lubis dan Husaini, 1987 : 55). Efektivitas juga digambarkan sebagai hasil guna yang diakibatkan oleh usaha yang telah dilakukan secara riil, sedangkan

efisiensi menggambarkan tingkat sumber daya berupa manusia, dana dan alam yang diperlukan untuk mendapatkan *output* tertentu (Sutarto, 1982 : 34).

Efektivitas organisasi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Makin besar prosentasi target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluarga. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. (Hidayat, 1986 : 7). Sementara Steers (1985 : 71) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain : tingkat desentralisasi pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi, formalisasi, rentang kendali, dan ukuran organisasi. Dalam teori Steers, unsur-unsur efektivitas organisasi tidak semata-mata merujuk pada tingkat keberhasilan suatu organisasi mewujudkan tujuan-tujuan melainkan lebih mementingkan pada pola hubungan yang berlangsung antara berbagai unsur kegiatan. Secara singkat, menurut konsep efisiensi dan efektivitas dapat dinyatakan adalah perbandingan antara *output* yang dihasilkan dan biaya yang digunakan dengan kata lain *output* diharapkan maksimal dengan *input*/biaya sekecil mungkin. Sementara efektivitas adalah upaya yang dilakukan agar sasaran /target yang ditentukan dapat dicapai semaksimal mungkin.

Menurut Etzioni (1985 : 12), efektivitas organisasi adalah tingkatan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya Lubis dan Huseini (1987 : 55) menyatakan bahwa efektivitas merupakan konsep penting

dalam teori organisasi karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Jackson dan Morgan dalam Gibson (1995 : 186) menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas organisasi perlu dipisahkan antara efektivitas organisasi profit dan non profit, sebab landasan organisasi profit lebih mengarah pada tujuan mencapai keuntungan, sedangkan organisasi non profit (birokrasi) tidak bertujuan ekonomi, tetapi sasarannya pada pelayanan masyarakat. Dikatakan Lazarro anggapan bahwa organisasi yang berusaha memaksimalkan keuntungan berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi, dimana profit adalah tujuan utama, sebaliknya argumentasi yang menentang konsep ini beranggapan bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh kepuasan dari para anggota terhadap apa yang telah dicapai organisasi (Gibson : 1995 :192).

Menurut Georgopoulos dan Tannembauam dalam Batinggi (1997 : 197), efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan adalah rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya atau penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan organisasi. Demikian halnya Kat Zell menyatakan bahwa efektivitas organisasi selalu diukur berdasarkan prestasi produktivitas, laba dan seterusnya. Selanjutnya Campbell menjelaskan mengenai berbagai ukuran yang digunakan untuk menentukan

keberhasilan organisasi menghasilkan pengenalan sembilan belas variabel yang digunakan secara luas, namun yang paling menonjol diantaranya : 1) keseluruhan prestasi, 2) produktivitas, 3) kepuasan kerja pegawai, 4) laba atau tingkat penghasilan dan penanaman modal, dan 5) keluaran karyawan (Batinggi 1997:191-192).

Menurut Lubis dan Husaini (1987 : 55), ada 4 pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian pada *output* mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.
2. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
4. Pendekatan integratif (*Integrative approach*) yakni suatu pendekatan gabungan yang mencakup *input*, proses dan *output*

Berbagai pandangan tersebut, efektivitas organisasi merupakan suatu pengukuran keberhasilan organisasi baik kuantitas, kualitas dan waktu yang ditunjukkan dalam pelaksanaan aktivitas secara integratif dengan dukungan sumberdaya yang tersedia baik organisasi profit

maupun non profit (birokrasi) yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat.

Efektivitas pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene sebagai sebuah organisasi kelembagaan pemerintah daerah adalah keberhasilan kelembagaan tersebut melaksanakan seluruh fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, waktu, serta dana guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kerja kelurahannya. Ukuran efektivitas tersebut dilihat dari pendekatan sasaran dan proses untuk mengetahui sejauhmana kemampuan dan tingkat keberhasilan lembaga pemerintah kelurahan melaksanakan fungsi pelayanannya sesuai kondisi masyarakat yang dilayaninya.

## **B. Konsep Pelaksanaan dan Kebijakan Publik**

### **1. Beberapa pengertian**

Terminologi 'pelaksanaan' biasa juga disebut implementasi atau *implementation*, merupakan salah satu fungsi manajemen. Menurut Atmosudirdjo (1989), pelaksanaan erat kaitannya dengan konteks perencanaan karena merupakan titik pangkal dari pelaksanaan. Pelaksanaan identik dengan implementasi kebijakan karena setiap kebijakan yang akan diimplementasikan diperlukan pelaksanaan yang melibatkan sumber daya manusia dan peralatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya Jones dalam La Nafie (1999)

menyatakan implementasi merupakan usaha yang dilakukan untuk terlaksananya suatu tugas pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu hal yang sederhana dan mudah dimengerti yaitu '*ambil pekerjaan dan laksanakan*'.

Salusu (1996) mendefinisikan implementasi yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan dengan maksud untuk mencapai sasaran tertentu, atau merupakan operasionalisasi berbagai aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Implementasi mencakup kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh berbagai macam aktor dengan menggunakan berbagai macam peralatan sehingga sasaran yang dikehendaki dapat dicapai. Implementasi adalah suatu proses yang terarah dan terkoordinasi yang melibatkan banyak sumber daya. Higgins menyatakan implementasi merupakan rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi yang menyentuh semua jajaran manajemen puncak pada karyawan atau staf pegawai lini paling bawah (Salusu,1996).

Van Meter dan Van Hom dalam Soedjadi (1997) menyatakan "*...those actions by publik or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decisions ...*".artinya pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu / pejabat publik atau kelompok pemerintahan atau kelompok swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Salusu (1996) mengemukakan bahwa untuk

menjamin keberhasilan implementasi, maka diperlukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan, peraturan-peraturan dan formulir-formulir. Proses implementasi baru mulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Menurut Warwick dalam Abdullah (1985), pada tahap implementasi, terdapat berbagai pengaruh faktor-faktor kekuatan yang mendorong atau menghambat ataupun memacetkan pelaksanaan tugas atau program. Faktor-faktor pendorong dalam mencapai sasaran yang disebut *facilitating condition* mencakup : 1) komitmen pimpinan politik, 2) kemampuan organisasi, 3) komitmen dari pelaksana, 4) dukungan dari kelompok kepentingan. Sedangkan faktor penghambat yang disebut *impeding condition* mencakup : 1) adanya komitmen dan loyalitas ganda, 2) kerumitan yang melekat pada program-program itu sendiri (*intrinsic complexity*), 3) jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak dan berbagai faktor lain serta masalah dan perubahan kepemimpinan.

## **2. Implementasi kebijaksanaan publik**

Winarno dalam *Kebijaksanaan Publik* (1989) mengutip beberapa pendapat tentang kebijaksanaan atau *policy*, diantaranya: Charles O. Jones " *Policy is course of action intended to accomplish some end*" artinya kebijaksanaan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan. Robert Eyestone mendefinisikan "*Publik policy is the relationship of a governments unit to its environment*", artinya

kebijaksanaan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Thomas R.Dye " *Publik policy is whatever governments chose to do or not to do*", artinya kebijaksanaan publik adalah apapun yang dilakukan oleh Pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat (Winarno, 1989).

Selanjutnya Wahab (2002) mengutip beberapa pendapat antara lain : James E. A , " *Public policy is a proposed course of action af a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilized and overcome in a effort to reach a goal or relized an objective or a purposed*". Artinya kebijaksanaan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan kehendak serta suatu tujuan tertentu. Heinz Erlau dan Kenneth Prewitt " *Policy is defined as a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who makes it and those who abide by it*" (kebijaksanaan didefinisikan sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan prilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi).

Solichin (2002) mengemukakan beberapa ciri dari kebijaksanaan publik: Pertama, tindakan lebih mengarah kepada tujuan daripada perilaku atau tindakan yang serba kebetulan atau tindakan yang direncanakan. Kedua, pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. *Ketiga*, bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh Pemerintah di dalam bidang-bidang tertentu. *Keempat*, dapat berbentuk positif dan mungkin pula berbentuk negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijaksanaan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh tertentu. Sementara di dalam bentuknya yang negatif, kebijaksanaan publik meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru sebenarnya sangat dipertukan.

Menurut Grindle (1990), implementasi kebijaksanaan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Sejalan dengan Grindle, Dunn (2000) menyatakan implementasi kebijaksanaan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah

tindakan kebijaksanaan dalam jangka waktu tertentu sampai dicapainya hasil kebijaksanaan. Implementasi kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan yang bersifat teoritis. Sejalan dengan Dunn, Van Meter dan Van Horn dalam Budiardjo (2004) menjelaskan bahwa *"...those actions by publik or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions..."* Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pejabat-pejabat (atau kelompok-kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier menjelaskan makna implementasi kebijaksanaan publik yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan publik, yang mana mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab,2000).

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene adalah mencakup seluruh rangkaian proses kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh jajaran aparatur kelurahan dan perangkat kelembagaannya yang ditujukan kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun

pelayanan operasional, dengan tetap mengacu kepada ketentuan kebijaksanaan publik dan mekanisme yang berlaku serta menurut tingkat kebutuhan masyarakat. Rangkaian proses kegiatan yang dilakukan merupakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara terarah, terkoordinir, terorganisir, serta sesuai tujuan dan sasaran program yang digariskan dalam Tupoksi pemerintah kelurahan.

### **C. Konsep Fungsi dan Peranan**

Terminologi fungsi dan peran adalah dua aspek yang tak terpisahkan. W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi fungsi yaitu suatu peranan yang menjadi pokok (hal) yang besar pengaruhnya dalam suatu peristiwa; dan juga seseorang mengatakan bahwa fungsi adalah pekerjaan yang dilakukan. Hal ini juga berarti bahwa fungsi erat kaitanya dengan peranan. Secara operasional, pengertian 'peranan' adalah keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki. Dengan perkataan lain, peranan adalah kesadaran, keikutsertaan dalam melaksanakan kegiatan, dan rasa tanggung jawab (Rafid, 2001).

Lanjut dijelaskan Rafid (1995:9), fungsi atau peranan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia

dengan sadar yang mengikutsertakan baik jiwa raga maupun harta bendanya, untuk mendukung terlaksananya suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Horoepoetri dkk (2003), fungsi atau peranan dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Peranan memiliki dimensi antara lain:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu

pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar Oikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biasess*).
- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene adalah rangkaian tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan (Lurah dan perangkat aparatur kelembagaannya) sesuai yang sudah digariskan dalam Tupoksi-nya. Fungsi tersebut mencakup fungsi koordinasi dan pembinaan, fungsi pelayanan administrasi dan operasional, fungsi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, fungsi

perlindungan masyarakat (ketertiban dan ketentraman umum), serta fungsi pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dari semua fungsi tersebut, dituntut peranan dari pemerintah kelurahan untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh perangkat kelembagaan dan masyarakat.

#### **D. Fungsi Pemerintah Kelurahan sebagai Administrator Pelayanan Publik dan *Good Governance***

##### **1. Pengertian**

Slamet Prayudi A (1982: 12) menyatakan administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam sesuatu organisasi modern dan yang memberi hayat kepada organisasi sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Administrasi itu dibangkitkan oleh seseorang yang disebut administrator, yaitu setiap kepala organisasi yang harus membuat organisasi yang dipimpinnya itu hidup, tumbuh, bergerak. Cara administrasi menjalankan administrasi adalah dengan (1) mengembangkan organisasi, (2) mengembangkan sistem informasi (terutama tata usaha), dan (3) mengembangkan sistem manajemen.

Konteks pemerintah kelurahan, administrator adalah Lurah yang bertugas dan berfungsi memimpin / mengorganisir sejumlah aparat atau pegawai dalam unit pemerintahan kelurahan untuk melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Administrasi biasa juga disebut tata usaha. Tata usaha itu terdiri

atas empat macam, yakni :

- 1) Tata usaha umum, berfungsi untuk memperlancar pekerjaan dan tata hubungan pimpinan organisasi dengan instansi-instansi (relasi-relasi) atau pihak-pihak lain dalam rangka memajukan usaha organisasi.
- 2) Tata usaha teknis operasional, yakni *information handling* khusus untuk mengikuti jalannya *line operations*.
- 3) Tata usaha sumber daya yakni *information handling*, berfungsi khusus untuk mengikuti penggunaan dan keadaan *resources* (tata usaha keuangan, tata usaha personil, tata usaha logistik, dan sebagainya)
- 4) Tata usaha khusus, berfungsi untuk memperlancar pengambilan keputusan-keputusan, maka pekerjaan sekretaris itu tergolong dalam tata usaha umum guna membantu memperlancar jalannya pekerjaan dan komunikasi pimpinan organisasi, hanya sifatnya lebih luas (Slamet Prayudi A, 1982: 14).

Tata usaha yang berlangsung dalam kantor merupakan bagian atau unit dari organisasi atau sekretariat atau bagian umum, namun sifat daripada tugas pekerjaannya harus sama yaitu "*Office Work* atau Tata Usaha. Jadi *office work* sama dengan tata usaha dan *office* sama dengan kantor yang terdiri atas 3 arti pokok yaitu : kantor, jabatan dan tugas pekerjaan. *Office work* adalah pekerjaan yang dijalankan oleh *office*, sebagai suatu unit, dipimpin oleh seorang *office manager*.

Hakikat administrasi (pelayanan) dari berbagai pandangan (definisi) meliputi adanya 1) pengaturan kerjasama, 2) kegiatan sekelompok orang, 3) mencapai tujuan tertentu, dan 4) secara rasional. Pangkal tolak administrasi adalah organisasi. Selain unsur statis, juga merupakan wadah tempat orang-orang bekerjasama dalam suatu pola tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan, sehingga terjadi proses dinamis secara rasional guna mencapai tujuan. Administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan dijalankan oleh seorang Lurah dengan perangkat aparatur dan kelembagaannya (Slamet Prayudi A, 1982: 16).

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan, Lurah sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene, memiliki fungsi sebagai administrator dalam seluruh rangkaian pelaksanaan tata usaha umum, teknis operasional, sumber daya, dan tata usaha khusus dalam rangka kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat.

## **2. Pelayanan publik dan mekanisme pelaksanaan**

Istilah 'publik' berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat dan negara. Syafiie dkk (1999) mendefinisikan publik yaitu sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.

David Osborne dan Ted Gaebler dalam "*Reinventing Government*" (1997) mengemukakan bahwa perlunya upaya peningkatan pelayanan

publik oleh sebuah birokrasi pemerintah yaitu dengan lebih banyak memberi wewenang pelayanan kepada masyarakat melalui suatu mekanisme atau aturan-aturan yang berlaku. Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini dimaksudkan bagi pemberian jasa baik oleh pemerintah, masyarakat, swasta, untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

SK.Menpan No.81/1993 tentang pedoman dasar bagi tatalaksana pelayanan umum oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kesederhanaan, yaitu pelayanan umum harus mudah, cepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan dan kepastian, yaitu dalam hal prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, unit dan pejabat yang bertanggung jawab, hak dan kewajiban petugas maupun pelanggan, dan pejabat menangani keluhan.
- 3) Keamanan, yaitu proses dan hasil pelayanan harus aman dan nyaman, serta memberikan kepastian hukum.
- 4) Keterbukaan, yaitu segala sesuatu tentang proses pelayanan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat diminta atau tidak diminta.
- 5) Efisien, yaitu tidak perlu terjadi duplikasi persyaratan oleh beberapa

pelanggan sekaligus.

- 6) Ekonomi, yaitu biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan mempertimbangkan nilai layanan, daya beli masyarakat, dan peraturan perundang undangan lainnya.
- 7) Keadilan, yaitu pelayanan harus merata dalam hal jangkauan dan pemafaatannya.
- 8) Ketetapan waktu, yaitu tidak terlalu lama untuk mencapai pelayanan yang optimal. Pemerintah melakukan secara berkala disertai audit dan bukti akuntabilitas dari pelayanan kita.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (2001:54) mengemukakan langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat, sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan secara tertib, cepat dan langsung kepada masyarakat bagi pelayanan yang memerlukan penyelesaian sesaat.
- b. Khusus pelayanan yang memerlukan waktu, agar dilandasi kebijaksanaan yang transparan dan diketahui masyarakat luas, yaitu:
  - 1) menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat persyaratan, prosedur, biaya/ tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian pelayanan, baik dalam bentuk buku panduan/ pengumuman ataupun melalui media informasi
  - 2) menempatkan petugas yang bertanggung jawab melalui pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai diterima atau tidaknya berkas permohonan pelayanan tersebut pada saat itu juga

- 3) menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang ditetapkan dan disetujui
- 4) melarang dan/ atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar di luar biaya jasa pelayanan yang telah ditetapkan
- 5) sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan secara terpadu (satu atap atau satu pintu) bagi unit-unit kerja/ kantor pelayanan yang terkait dalam memproses atau menghasilkan satu produk pelayanan
- 6) melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui kepuasan pelanggan/ masyarakat atas pelayanan yang diberikan, dimana hasilnya perlu di evaluasi dan ditindak lanjuti, dan
- 7) menata sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntunan dan perkembangan dinamika masyarakat.

### **3. Fungsi pelayanan administrasi pemerintah kelurahan**

Fungsi organisasi pemerintahan kelurahan dalam struktur pemerintahan daerah adalah mengupayakan berbagai kegiatan administrasi secara optimal, dan merupakan bentuk pelayanan yang memberikan hayat (hidup dinamis) kepada organisasi sehingga organisasi dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Fungsi pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene mengupayakan kegiatan administrasi (pelayanan) secara optimal yang memberikan hayat (Hidup dinamis) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok pelayanan administrasi

masyarakat dalam wilayah pemerintahannya.

Tugas dan fungsi pemerintahan kelurahan mengupayakan berbagai kegiatan administrasi merupakan bentuk pelayanan. Perwujudan pelayanan yang baik dan memuaskan ((AS Moenir,1999 : 42) adalah:

- 1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat.
- 2) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu baik untuk alasan dinas, maupun untuk alasan kesejahteraan.
- 3) Mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.

Seluruh proses administrasi yang dilakukan dalam perkantoran adalah proses layanan yang keluarannya tertuju pada orang, kelompok orang atau instansi lain. Terdapat 2 macam pelayanan yaitu pelayanan ke dalam (pelayanan kepada manajemen) dan pelayanan ke luar. Pelayanan ke dalam merupakan rangkaian awal yang berlanjut pada pelayanan keluar. Jika pelayanan ke dalam tertib dan lancar, maka pelayanan keluar juga tertib dan lancar. Komponen kualitas terpadu dalam suatu proses pelayanan meliputi : 1) pegawai/ karyawan yang terlibat perlu secara kontinyu diberi pelatihan sehingga semakin proporsional dalam memberikan layanan kepada konsumen, 2) kualitas hubungan antar

pribadi tercipta semangat korps agar mereka merasa satu keluarga yang berjuang bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan, 3) ketaatan dan disiplin yang diperlihatkan sebagai akibat meningkatnya kualitas para karyawan, akan meningkatkan berlangsung secara efektif dan produktivitas meningkat.

Pekerjaan Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) itu pada pokoknya adalah sama dengan office manager, perbedaannya hanya terletak pada skop dari pada bidang pekerjaannya yang lebih sempit daripada pekerjaan seorang pejabat yang diberi sebutan kepala kantor atau manager kantor, atau kepala biro umum, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, perbedaannya tidak bersifat prinsipil akan tetapi gradual, dan fungsi-fungsinya adalah sama.

Berdasarkan uraian pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di tingkat kelurahan, publik adalah seluruh masyarakat yang bermukim di dalam suatu wilayah kelurahan di Kabupaten Majene. Pemerintah kelurahan sebagai administrator memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan tetap mempedomani mekanisme atau prosedur yang berlaku, yaitu sederhana, jelas dan pasti, aman dan tertib, terbuka, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu, serta sesuai kebutuhan dan memenuhi kepuasan masyarakat.

#### **4. Pelayanan publik dalam perspektif *Good Governance***

Perspektif *Good Governance* merupakan sebuah konsep dan

gerakan yang tergolong baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir cukup marak diwacanakan dalam berbagai forum formal dan informal untuk dapat mewujudkannya. Istilah *Good governance* tersebut pada dasarnya memiliki arti yaitu tata pemerintahan yang baik, yang erat kaitannya dengan praktik kinerja *governance* yang berkualitas dan profesional dari aparat penyelenggara negara sebagai pelayan publik. Dalam konteks pemberantasan KKN, *good governance* juga sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik KKN, dan *good governance* dinilai terwujud jika pemerintah mampu menjadikan dirinya (terlegitimasi) sebagai pemerintah yang bersih dari praktik KKN, mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Menurut Dwiyanto (2005:4-5), ada tiga alasan yang mendasari pembaharuan pelayanan public yang diharapkan dapat mendorong pengembangan praktik *good governance* di Indonesia, yaitu :

- a. Perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholders (pemerintah.warga pengguna, dan para pelaku pasar),
- b. Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat sensitif,
- c. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* dapat diterjemahkan secara relative mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

*Good governance* memuat beberapa karakteristik dan nilai, yaitu :

(a) praktiknya harus memberikan ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar, (b) nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, (c) praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi kepada kepentingan publik (Dwiyanto, 2005:18-19).

Dalam konteks pelayanan publik yang diperankan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene, menjadi titik strategis untuk mewujudkan *good governance* dengan pertimbangan : *Pertama*, pelayanan publik selama ini menjadi ranah bagi negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. *Kedua*, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah. *Ketiga*, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*. Oleh karena itu, institusi kelembagaan pemerintah daerah khususnya lembaga pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene memainkan peran dan fungsi yang sangat vital dan strategis dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tjokroaminoto (2000), prinsip-prinsip *good governance*, adalah:

- 1) Partisipasi (*Participatory*). Setiap warga negara berpartisipasi dalam pengembangan keputusan baik secara langsung maupun melalui

institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- 2) Aturan hukum (*Rule of Law*). Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan berdasarkan hukum (peraturan yang sah).
- 3) Transparansi (*Transparency*), yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan yang menangani perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Perumusan kebijaksanaan, seleksi jabatan melalui fit and proper test oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah, termasuk dalam hal procuremen dan pelaksanaan anggaran pemerintah yang dilakukan secara transparan.
- 4) Responsif (*Responsive*). Lembaga-lembaga negara/ badan usaha berusaha untuk melayani stakeholdersnya. Responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kepentingan klien.
- 5) Berorientasi kesepakatan (*Consensus orientation*). *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapat pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja.
- 6) Kesetaraan (*Equity*). Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 7) Efektif dan Efisien. Proses-proses dan lembaga-lembaga

menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia bagi pencapaian hasil sebaik mungkin.

- 8) Akuntabilitas (*Accountability*). Tenggang gugat dari pengurus/penyelenggaraan dari *governance* yang dilakukan. Menurut LAN RI bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban.
- 9) Visi Strategis (*Strategic Vision*). Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Kesembilan karakteristik tersebut di atas saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene memainkan fungsi utama sebagai administrator pelayanan publik. Dalam fungsi tersebut, Lurah, aparatur dan perangkat kelembagaannya, dituntut untuk melaksanakan fungsi pelayanan administrasi secara efektif kepada masyarakat sesuai praktik dan nilai-nilai *Good Governance* yaitu partisipatif, berlandaskan hukum, transparan, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan atau adil, efisien dan efektif, akuntabel, serta strategis.

## **E. Kedudukan Tugas dan Fungsi Aparatur dan Perangkat Kelembagaan Pemerintah Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat**

### **1. Beberapa pengertian**

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus, kata 'perintah' adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, kata 'pemerintah' adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara, sedangkan 'pemerintahan' berarti perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. Dalam kepustakaan Inggris sering dijumpai perkataan "*government*" yang sering diartikan 'pemerintah' atau 'pemerintahan' (Pamudji, 1992: 22-23).

Menurut C.F.Strong dalam Pamudji (1992:23-24), pemerintah (an) adalah organisasi dalam hal mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Selanjutnya menurut Samuel Edward Finer menyatakan bahwa istilah '*government*' paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu : 1) menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain, 2) menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses memerintah dijumpai, 3) menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah, dan 4) menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan yang dilakukan oleh organ-organ atau

badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan dalam pengertian sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (Pamudji, 1992: 24-25).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Lurah dan perangkat aparturnya dalam suatu wilayah kelurahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan kelurahan.

## **2. Kedudukan aparatur pemerintah kelurahan**

Pengertian 'aparatur' adalah orang yang mengabdikan kepada bangsa dan negara yang memiliki fungsi melayani masyarakat luas dan melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, seorang aparat harus memiliki kepribadian meliputi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian Pancasila, dan sehat jasmani/ rohani. Dalam GBHN 1993 TAP MPR No. II / MPR/1993 digunakan terminologi 'Aparatur Negara', yaitu keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan aparatur pemerintahan.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 menguraikan pengertian aparat atau pegawai negeri sipil (PNS) yaitu mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. GBHN (TAP MPR No. 1/1998) menjelaskan bahwa pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan kualitas aparat negara, fungsi kelembagaan negara, dan lembaga pemerintahan serta ketatalaksanaan dengan meningkatkan kemampuan melaksanakan seluruh penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, terpadu; meningkatkan kualitas aparat negara yang sejahtera, bersih, berwibawa, bermoral, beretika, bertanggungjawab, profesional dan penuh dedikasi pengabdian, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan mendinamisasi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. / Dalam menjalankan tugasnya, seorang aparat dituntut untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Tabrani (1990) mendefinisikan profesionalisme aparat yaitu keahlian atau keterampilan melakukan suatu pekerjaan yang bersifat sederhana yang hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan tersebut.

Profesionalisme aparat merupakan suatu keahlian atau kemampuan dan keterampilan aparat terhadap suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni atau yang diemban benar-benar dimiliki dan dikuasai secara profesional. Salah satu dari usaha pembinaan aparatur negara ialah pengembangan dan peningkatan prestasi kerja (kinerja) pemerintahan desa kelurahan di Kabupaten Majene.

### **3. Kedudukan tugas perangkat kelurahan dan organisasi**

Seorang Lurah dalam pemerintahan kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai aparatur pemerintah dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pengertian tugas ataupun pekerjaan adalah kesatuan kegiatan yang ada dalam suatu organisasi, terdiri atas beberapa langkah dan perbuatan, menggunakan metode dan atau prosedur tertentu, sehingga menghasilkan suatu bentuk berupa barang maupun jasa (Moenir, AS, 1991:53). Lanjut diuraikan bahwa pada dasarnya tugas merupakan: 1) kumpulan pekerjaan atau aktifitas yang seharusnya dilakukan oleh seorang pegawai atau pemegang jabatan, 2) kumpulan pekerjaan tersebut saling berhubungan dan tersusun secara sistematis, 3) terangkai dalam sejumlah langkah-langkah dan tindakan, 4) menggunakan metode dan mekanisme tertentu, dan 5) kumpulan pekerjaan tersebut menghasilkan suatu output. Uraian tugas adalah merupakan salah satu bentuk informasi penting yang dihasilkan oleh analisis jabatan dari berbagai informasi yang dihasilkan, antara lain : 1)

sifat dan karakteristik jabatan, 2) ringkasan uraian jabatan, 3) nama jabatan, 4) bobot suatu jabatan, 5) syarat-syarat jabatan, 6) dan lain-lain.

Berdasarkan berbagai pandangan yang dikemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa uraian tugas harus dapat menjelaskan tentang :

- 1) Ikhtisar tugas yang harus dijalankan oleh pemangku jabatan agar pekerjaan yang diberikan kepadanya dapat dilaksanakan.
- 2) Isi pekerjaan yang berkaitan dengan tanggungjawab dan wewenang dari pemangku jabatan
- 3) Syarat-syarat bagi pelaksanaan pekerjaan yang dikaitkan dengan antara lain kondisi tempat kerja dan lingkungannya.

Kedudukan pemerintah kelurahan telah diatur dalam Pasal 1 ayat 5 PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan, bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan : (1) kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang berkedudukan di kecamatan, (2) kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui camat. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ayat (2) Lurah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota, ayat (3) urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, ayat (4) pelimpahan urusan pemerintahan

disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Selanjutnya Pasal 6 PP No 37 Tahun 2005 ayat (1) kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan, ayat (2) perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 seksi serta jabatan fungsional, (3) dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

Kedudukan pemerintahan kelurahan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, dimana dalam bentuknya yang umum adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dapat dirasakan eksistensinya. Dalam organisasi pemerintahan kelurahan kita dapat menemukan adanya individu atau sekelompok individu (aparatur) yang bekerja sesuai dengan keahlian dan tugas-tugas tertentu sehingga dikatakan organisasi adalah sebagai wadah tempat berlangsungnya kegiatan (*to get the job done*). Robbins (1995 : 4) mendefinisikan organisasi sebagai suatu kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Weber dalam Robbins (1995:338) mengemukakan beberapa karakteristik yang merupakan esensi dari birokrasi yaitu: 1). Pembagian Kerja, pekerjaan dari setiap orang dipecah-pecah sampai pada pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, rutin dan ditetapkan dengan jelas. 2). Hirarki Kewenangan, yang jelas, dimana setiap jabatan dalam birokrasi diatur secara formal dengan posisi hirarki yang jelas, dimana

setiap jabatan yang lebih rendah berada dibawah supervisi dan kontrol dari jabatan yang lebih tinggi. 3). Formalisasi yang tinggi, ketergantungan kepada peraturan dan prosedur yang formal untuk memastikan adanya keseragaman dan \ untuk mengatur perilaku pemegang pekerjaan. 4). Bersifat tidak pribadi, sanksi-sanksi diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan dengan kepribadian individual dan preferensi pribadi. 5). Penetapan pegawai berdasarkan kemampuan, seleksi dan promosi pegawai didasarkan atas kualifikasi teknis, kemampuan, dan prestasi. 6). Jenjang karir bagi pegawai, jenjang karir bagi pegawai merupakan imbalan atas prestasi dan masa jabatan.

Secara normatif karakteristik organisasi birokrasi dari Weber sangat ideal tetapi dalam prakteknya sangat sulit untuk dilaksanakan. Model organisasi birokrasi menekankan efisiensi dan efektifitas tetapi dalam perkembangannya model tersebut cenderung melahirkan organisasi yang sangat formalistik, bersifat sangat hirarkis dan kaku. Perubahan organisasi yang meliputi sistem, struktur dan strategi seringkali dikenal sebagai perubahan yang radikal. Sementara itu perubahan organisasi yang menyentuh staf, skill, leadership style dan share value, dikenal sebagai perubahan bertahap. Perubahan organisasi ini pada dasarnya merupakan upaya pengembangan organisasi.

Karl, A (1985:3) mengemukakan bahwa pengembangan organisasi sebagai suatu proses penyempurnaan yang tercantum dalam fungsi menyeluruh suatu organisasi. Pengembangan organisasi

menekankan suatu proses yang berusaha untuk meningkatkan aktivitas organisasi dengan mengintegrasikan keinginan akan perkembangan sesuai dengan tujuan organisasinya. Proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana dan bersistem serta berusaha untuk berubah sesuai dengan misi organisasi pengembangan organisasi menekankan suatu proses yang berusaha untuk meningkatkan aktivitas organisasi dengan mengintegrasikan keinginan akan perkembangan sesuai dengan tujuan organisasi.

### **3. Fungsi pelayanan, pembinaan dan koordinasi**

Eksistensi kelembagaan pemerintah kelurahan pada dasarnya mempunyai fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 5 PP No 37 Tahun 2005 menetapkan bahwa Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) mempunyai fungsi yaitu :

- 1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
- 2) pemberdayaan masyarakat,
- 3) pelayanan masyarakat,
- 4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- 5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- 6) pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah

Kelurahan terutama fungsi pembinaan, dimana dalam penjabarannya menjelaskan bahwa fungsi pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan mencakup: 1) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, 2) pembinaan pelaksanaan pembangunan, 3) pembinaan kemasyarakatan, dan 4) pembinaan administrasi, organisasi dan tata kerja serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

Pasal 7 PP No.73 Tahun 2005 menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, ayat 2) setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing. Pasal 10 PP No.73 Tahun 2005 menetapkan (1) di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, (2) pembentukan lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 12 PP No.73 Tahun 2005 menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
- b. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- c. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi

serta swadaya gotong royong masyarakat

- d. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- e. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene adalah kewenangan/ kekuasaan yang dimiliki oleh Lurah dan perangkat aparaturnya dan kelembagaannya untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengatur dan mengelola potensi wilayah pemerintahannya. Kedudukan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi, koordinasi dan pembinaan kemasyarakatan, pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum, serta pembangunan/ pemeliharaan sarana dan fasilitas umum dan sosial.

## **F. Dimensi-Dimensi Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

### **1. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat**

Pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai suatu proses sosial multidimensi yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok agar dapat memperoleh kendali bagi kehidupan mereka sendiri. Menurut Page dan Czuba (2000), ada tiga komponen penting dalam upaya memahami pemberdayaan dimanapun hal itu dilakukan, yaitu : 1)

pemberdayaan bersifat multidimensi dimana terlibat di dalamnya dimensi sosiologi, psikologi, ekonomi dan dimensi lainnya. Pemberdayaan dapat berlangsung pada berbagai jenjang seperti individu; kelompok dan komunitas masyarakat, 2) pemberdayaan (secara definisi) adalah suatu proses sosial, manakala hal itu terjadi dalam hubungannya dengan pihak lain, dan 3) pemberdayaan merupakan suatu proses yang mirip dengan suatu perjalanan bagi pihak yang sedang membangun dimana kita berkarya di dalamnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat aspek lain dari pemberdayaan dimana hal itu sangat tergantung pada konteks yang spesifik dan keterlibatan masyarakatnya. Kemudian ditambahkan bahwa suatu implikasi penting dari pemahaman tentang pemberdayaan ini adalah bahwa aspek individu komunitas/ masyarakat secara mendasar saling terkait.

Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang :

- 1) Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- 2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah.

- 3) Perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Sumodiningrat, 1999).

Setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memuat unsur-unsur pokok meliputi : 1) strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang merupakan acuan dari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat, 2) kerangka makro pemberdayaan masyarakat yang memuat berbagai besaran sebagai sasaran yang harus dicapai, 3) sumber anggaran pembangunan sebagai perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, 4) kerangka dan perangkat kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, 5) program-program pemberdayaan masyarakat yang secara konsisten diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat, 6) indikator keberhasilan program yang memuat perangkat pencatatan sebagai dasar pemantauan evaluasi program dan penyempurnaan program serta kebijaksanaan yang menjamin kelangsungan program (Sumodiningrat, 1999).

Selanjutnya dijelaskan Sumodiningrat (1999), indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup : 1) berkurangnya jumlah penduduk miskin, 2) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, 3) meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya, 4)

meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat, serta 5) meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Menurut Friedmann (1992), tiga jenis daya kemampuan pada golongan miskin yang telah terampas sehingga perlu diberdayakan, yakni : (1) daya sosial, berupa akses pada basis produksi rumah tangga seperti lahan, sumber keuangan, informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta partisipasi dalam organisasi sosial ; (2) daya politik, berupa akses individu dalam pengambilan keputusan politik, bukan hanya dalam hal memilih melainkan juga dalam menyuarakan aspirasi dan untuk bertindak secara kolektif; (3) daya psikologis, berupa kesadaran tentang potensi diri baik dalam ranah sosial maupun ranah politik. Pemberdayaan adalah proses dimana golongan miskin difasilitasi, didukung dan diperkuat untuk memperoleh kembali sejumlah daya yang terampas tersebut.

Ohama (2001), mengemukakan strategi untuk memberdayakan masyarakat, antara lain :

- 1) *Penyadaran sosial (social conscientization)* Pada masyarakat perlu ditanamkan kesadaran kritis tentang potensi yang mereka miliki

untuk bisa mengakses sejumlah daya pada ruang sosial, ruang politik maupun ruang psikologis.

- 2) Pengorganisasian masyarakat (*community organizing*). Masyarakat perlu memiliki wadah untuk memperjuangkan/ merebut kembali sejumlah daya yang terampas. Wadah tersebut adalah organisasi, karena melalui organisasi potensi mereka bisa disatukan, saling konsultasi dan tukar pengalaman bisa berlangsung, serta aksi kolektif yang demokratis bisa digalang. Organisasi dimaksud adalah organisasi masyarakat sendiri atau *civil society organization* (CSOs), organisasi yang lahir dari tubuh masyarakat sendiri, berbasis pada prinsip dan pemilikan asset kolektif dalam masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan jaringan antar organisasi diantara mereka.

Melalui kesadaran kritis dan organisasi yang terbentuk, masyarakat diasumsikan dapat memperjuangkan daya sosial, daya politik dan daya psikologis mereka secara bertahap dan gradual. Dilihat dari porsesnya, pemberdayaan masyarakat berlangsung secara partisipatoris, dalam arti masyarakat sendiri menjadi pelaku utama dari agenda-agenda perbaikan kehidupan melalui wadah organisasi mereka, dimana dalam proses tersebut daya kemampuan mereka akan terus meningkat sebagai hasil dari proses belajar melalui pengalaman (*experience based learning process*). Dengan pendekatan partisipatoris, pihak-pihak di luar masyarakat hanya berfungsi sebagai fasilitator, pendukung dan penguat

dari *experience based learning process* yang berlangsung (Ohama, 2001).

Secara operasional, untuk berlangsungnya pemberdayaan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah, swasta dan ornop (organisasi non pemerintah) menjadi keniscayaan. Menurut Friedman (1992), oposisi antara ornop dengan pemerintah maupun swasta sudah bukan jamannya. Untuk penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, pemerintah perlu bekerjasama dengan ornop; sementara untuk menyalurkan sumberdaya (pendanaan dan teknologi) ke dalam masyarakat pemerintah perlu bekerjasama dengan swasta. Dalam banyak kasus, ornop juga memerlukan bantuan pendanaan dari swasta untuk *community organizing* yang dilakukannya. Khusus bagi pemerintah atau lebih khusus lagi bagi lembaga pemerintah kelurahan yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, peranan spesifik yang perlu didefinisikan dan dioperasionalkan adalah fasilitasi (*facilitating*), penguatan (*enabling*) dan pendukung (*supporting*) terhadap aktivitas-aktivitas yang diinisiasi secara *indigenous* oleh masyarakat. Peranan fasilitasi, penguatan dan pendukung tersebut dalam prakteknya dapat dilihat pada dua tahap : tahap persiapan sosial berupa penyadaran dan pengorganisasian masyarakat (peranan penguatan) dan tahap penghantaran sumberdaya dalam mendukung dan memfasilitasi (peran fasilitasi dan pendukung) terlaksananya usulan kegiatan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah mereka.

Oakley dan Mardsen dalam Priyono (1996) mengemukakan

bahwa proses pemberdayaan menekankan kepada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, proses ini biasanya ditindak lanjuti dengan upaya membangun *asset material* guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Priyono (1996) menegaskan bahwa memberdayakan rakyat berarti mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat *bargaining position* masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala sektor kehidupan, sedangkan pemberdayaan kelembagaan merujuk kepada kemampuan untuk menjadikan kelembagaan masyarakat untuk menjadi lembaga yang efektif, independen dan berkesinambungan dengan mengupayakan, 1) efektivitas, keterbukaan dan pertanggung jawaban, 2) otonomi dan sumber dana independen dan 3) Jaringan kerja.

Menurut Tikson (2001), dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa kegiatan yang sangat penting dan perlu dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan baik secara individual maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi menuju pada suatu kemandirian, yaitu:

- 1) *Capacity Building*, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal keterampilan untuk bertindak dan bereaksi sesuai dengan situasi riil pada lingkungan di mana mereka berada. Bidang ini berkenaan dengan pengembangan kapabilitas anggota masyarakat yang menyangkut

aspek nilai-nilai dan budaya yang memiliki daya motivasi seperti semangat kerjasama dan gotong royong. Di samping itu mereka juga harus mampu melawan berbagai ketertinggalan di dalam realitas sosial dan ekonomi mereka.

- 2) *Capacity Organizing* yaitu kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhan/ kepentingan lokal sebagai alat untuk menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang dikehendaki.
- 3) *Capacity Resources Management*, yaitu kegiatan yang dilakukan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan varietas sumber daya lokal, identifikasi dan penetapan terhadap sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan yang terpenting adalah kemampuan dalam mengambil keputusan dan bertanggungjawab secara bersama-sama.

## **2. Pembangunan kesejahteraan sosial**

Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam upayanya memacu pembangunan dan memperlancar pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, menurut Irawan Kadiman (2001 : 4) adalah suatu proses jangka panjang yang mana secara holistik memandang pembangunan dan pelayanan publik sebagai proses dalam jangka panjang untuk

meningkatkan pendapatan nasional, dan keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh peranan atau partisipasi masyarakat.

Pembangunan masyarakat desa/ kelurahan itu adalah merupakan usaha yang berat dan banyak segi-seginya yang harus diperhatikan, olehnya itu tanpa adanya pengertian yang cukup dari masyarakat maka dengan sendirinya tujuan pembangunan dan pelayanan tidak tercapai. Depdagri dalam "Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa", bahwa pembangunan masyarakat desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistimatis dan terarah sebagai bagian terpenting dalam usaha pembangunan negara secara menyeluruh. Dengan uraian singkat tersebut berarti bahwa pembangunan masyarakat desa itu adalah salah satu unit usaha pemerintah yang terendah dan dilaksanakan secara obyektif, sistimatis dan terarah.

Mokodompit, EA (1984) mengatakan bahwa pembangunan adalah perubahan sosial yang menuju ke taraf hidup yang lebih baik. Jadi setiap pembangunan mengandung dua unsur:

- 1) Perubahan sosial, diarahkan ke taraf yang lebih baik. Unsur perubahan sosial ekonomi berarti setiap usaha pembangunan ada proses yang dinamik, dalam proses ini misalnya manusia, alat-alatnya, begitu pula hubungannya struktur organisasi (management) jadi Pokoknya Pembangunan harus menampakkan

dinamika apakah secara revolusi atautkah revolusi. Pembangunan harus dapat dikatakan berhasil baik bila mana ada perubahan sosial, karena kalau sama dengan dahulu disebut pembangunan dan taraf yang lebih buruk disebut pengrusakan

- 2) Pembangunan dalam arti kedua adalah suatu konsepsi sosial yang mencakup pengertian adanya prang lain, ini berarti bahwa : pembangunan tidak mungkin dilaksanakan perorangan, harus ada orang lain diikut sertakan menurut fungsinya, jadi pembangunan selalu mempunyai ciri kualifikasi
- 3) Pembangunan dalam arti ketiga adalah, khusus kepada masyarakat, pemikiran kita diharapkan kepada masyarakat desa yang hendak dibangun, dalam hal ini masyarakat ditinjau dari sudut konsepsi penduduk masyarakat dapat dibagi atas masyarakat kota dan masyarakat desa. Kedua bentuk masyarakat ini masing-masing melakukan pembangunan yang khas. Dengan demikian pembangunan masyarakat desa dilakukan swadaya masyarakat desa setempat yang bersifat massal dan integral. Kemudian didasari pula bahwa setiap masyarakat adalah merupakan unit yang mempunyai masalah dan cara perkembangannya, pembangunan masyarakat adalah berdasarkan atas kesadaran dan inisiatif sendiri dari warga masyarakat setempat. Oleh karena itu maka hendaklah diusahakan untuk menjadikan masyarakat desa itu dapat berkembang dan mempertinggi taraf hidup dan

penghidupannya dengan swadaya gotong royong. dan pendidikan di segala bidang. Memang proses perkembangan masyarakat desa adalah berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Menurut Ndraha (1982: 24), pembangunan masyarakat berarti membangun swadaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat, mengintensifkan swadaya gotong royong masyarakat untuk selanjutnya dapat berkembang sendiri, meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat (GBHN 1978). Bidang-bidang pembangunan yang meliputi sasaran swadaya masyarakat mengingat pelaksanaan pembangunan yang meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat, dengan jalan melaksanakan pembangunan secara massal dan integral, baik yang bersifat batiniah maupun lahiriah sampai terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa tujuan pembangunan daerah antara lain :

- 1) Meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat baik di bidang pertanian maupun disektor industri seperti misalnya, pertanian secara tradisionil menjadi pertanian yang menggunakan peralatan tehnologi
- 2) Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan, terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaik mungkin.
- 3) Tujuan pembangunan masyarakat. Singkatnya adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur merata spiritual dan

material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 4) Meletakkan landasan yang kuat untuk meningkatkan tahap pembangunan selanjutnya, dan juga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Berdasarkan perumusan ini pembangunan masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Secara umum pembangunan masyarakat dapat disimpulkan :

- 1) Usaha atau gerakan pembangunan masyarakat merupakan gejala manusiawi, gejala sosial dan gejala budaya yang senantiasa terabdikan bagi kepentingan dan hajat hidup manusia dan masyarakat itu sendiri.
- 2) Pembangunan masyarakat senantiasa menyentuh berbagai segi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sebab pembangunan itu pada hakekatnya ialah pembangunan insani/pembangunan masyarakat di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia guna perbaikan taraf hidup dan tata kehidupan serta penghidupannya.
- 3) Pembangunan pada hakekatnya juga merupakan serangkaian usaha membangun sikap manusia, baik sikap mentalnya maupun sikap hidupnya, karena manusia menempati kedudukan kunci sebagai sasaran untuk siapa pembangunan diadakan dan sekaligus menjadi pelaksana pembangunan itu sendiri
- 4) Agar pembangunan dapat berhasil, sikap mental dan sikap hidup

yang hendak dibangun itu berakar pada dan mencerminkan tata nilai kepribadian masyarakat yang bersumber pada tata dasar dan falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila, dan

- 5) Sikap hidup yang berakar pada nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia dan tumbuh dari adanya sikap mental yang mencerminkan persatuan dan kesatuan serta sifat-sifat kegotong royongan, toleransi, tenggang rasa, terbuka, saling bantu membantu dan mampu mengendalikan diri. Singkatnya suatu sikap sosial yang penuh rasa solidaritas antara sesama manusia dan sikap menghargai karya yang halal dan kesanggupan untuk bekerja dengan penuh kepercayaan kepada diri sendiri.

Keberhasilan aparatur dan organisasi pemerintah kelurahan melakukan seluruh tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi yang diemban dalam memainkan perannya sebagai pelayan masyarakat. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran pelayanan yang dikehendaki oleh masyarakat dengan menggunakan dimensi-dimensi perana atau fungsinya dalam berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah pemerintahannya.

Peranan atau fungsi bukan saja berlaku pada pencapaian tujuan pada dirinya sendiri melainkan juga untuk kepentingan kelompok. Peranan atau fungsi yang asli yang datang dari inisiatif sendiri, merupakan tujuan dalam proses pelayanan, namun hanya sedikit pimpinan yang mau

memakai pendekatan sukarela untuk menggiatkan anggota-anggotanya agar aktif dalam kegiatan pelayanan. Untuk itu, dalam pencapaian tujuan pembangunan terkadang berlaku upaya pembangkitan motivasi yang bersifat memaksa baik melalui anjuran atau kebijakan yang selaras (Mikkelsen, 2001). Slamet dan Sutarjo dalam Muhadjir (2001) menyatakan bahwa ditinjau dari segi pengelolaan pembangunan, peran dalam pembangunan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan.

Mikkelsen (2001), pada model logika yang mendasari peran pada pendekatan efisiensi, bila terjadi kondisi kurangnya partisipasi maka pada dasarnya merupakan suatu ekspresi dari ketidakmampuan untuk berperan akibat kurangnya dana, faktor pendidikan dan pengetahuan, keterkaitan sumber-sumber lain seperti kondisi proyek pembangunan dan tingkat organisasi peran yang rendah. Selanjutnya Rafid (2001), wujud peran dalam pemeliharaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk tenaga atau keikutsertaan mencurahkan tenaga dan perbaikan serta frekuensi pemeliharaan; sumbangan uang, sumbangan materi berupa bahan-bahan kebutuhan perbaikan; dan partisipasi pemikiran atau ide dalam upaya memelihara hasil-hasil pembangunan.

### **G. Otonomi Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Otonomi daerah atau disebut daerah otonom merupakan aplikasi dari tuntutan masyarakat di daerah akan perubahan penyelenggaraan

pembangunan dan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah lahir dari besarnya keinginan masyarakat yang ada di daerah untuk menyelenggarakan, mengelola, menggali, memanfaatkan serta mengurus pembangunan dan pemerintahan daerahnya sendiri, namun dalam batas-batas kewenangan tertentu. Pengertian "otonomi daerah" dijelaskan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa kewenangan daerah meliputi: kewenangan daerah yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, keuangan dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya aparatur, pendayagunaan sumber daya lain serta teknologi yang tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa otonomi daerah atau daerah otonom mengandung unsur yakni adanya hak (*rights*) dan wewenang (*authorities*). Kedua unsur ini diorientasikan kepada atau dalam rangka mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sejak berlakunya Otonomi Daerah, tantangan dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah terutama kualitas penyelenggara aparatur pemerintahan di daerah atau sumber daya aparatur, kekurangsiapan daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Otda mengakibatkan pelaksanaannya berjalan kurang sesuai dengan yang diharapkan, bahkan ada kecenderungan Pemerintah Pusat kembali mengevaluasi pengalihan pemberlakuan undang-undang tersebut dari daerah kabupaten dan kota kepada daerah tingkat propinsi.

Konsep pelaksanaan undang-undang otonomi daerah sesuai prinsip dan tujuan pemberian otonomi didasarkan pada penjelasan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang ini memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Penjelasan tersebut di atas memuat pernyataan 'nyata' dan 'bertanggung jawab'. Nyata dalam arti adanya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan bertanggung jawab dalam arti bahwa terwujudnya pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta Antar Daerah dalam rangka, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Memperhatikan dasar pemikiran diatas, berarti prinsip dasar pemberian dan pelaksanaan otonomi daerah memuat beberapa aspek meliputi: a) harus memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah, b). pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab, c) otonomi yang luas dan utuh pada daerah kabupaten dan kota, dan otonomi yang terbatas bagi daerah propinsi, d). harus sesuai dengan konstitusi negara untuk lebih menjamin hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah, e) harus lebih meningkatkan kemandirian daerah untuk mencegah adanya wilayah administratif, f) harus mampu lebih meningkatkan berbagai

peranan dan fungsi legislatif daerah, g). pemberian azas dekonsentrasi dan dilaksanakan di daerah propinsi sebagai wilayah administrasi untuk pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada, gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dan h) pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah maupun dan pemerintah dan daerah kepada desa. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian keleluasaan. otonomi secara utuh dan bulat mencakup penyelenggaraan yang meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene melakukan sejumlah penyesuaian-penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas disamping tetap mengacu kepada PP No. 8 Tahun 2003 sebagaimana direvisi menjadi PP No. 25 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tersebut yang mana memuat sejumlah esensi penting yaitu untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta

mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi intinya adalah memberikan kewenangan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pemikiran yang mendasari lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah ini adalah : (1) dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, (2) penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, kemandirian, menjaga keserasian hubungan dengan Pemerintah Pusat serta memperhatikan potensi dan keberagaman daerah, (3) guna menghadapi persaingan global, jadi Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Gaffar, 2002).

Berlakunya UU Otda tersebut sudah barang tentu menyebabkan terjadinya perubahan yang fundamental terhadap elemen-elemen Pemerintahan Daerah serta memerlukan penataan-penataan yang sistematis. Elemen-elemen utama tersebut adalah : (1) adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, (2) adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada Daerah, (3) adanya personil (pegawai daerah) untuk menjalankan urusan otonomi, (4) adanya sumber keuangan untuk pembiayaan pelaksanaan otonomi, (5) adanya unsur perwakilan rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi

di daerah. dan (6) adanya manajemen pelayanan umum (*public service*).

Dinas tingkat daerah dalam era otonomi daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.07 Tahun 2003, mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan yang akan membawa daerah tersebut mengarungi Era Otonomi Daerah bahkan era global yang sangat kompetitif. Posisi strategis tersebut didukung di dalamnya adalah Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur. Peran Dinas Tingkat Daerah yang demikian tersebut mempunyai konsekuensi logis mengharuskan program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur ditempatkan pada skala prioritas, sebab bila hal tersebut terabaikan, maka itu berarti ancaman terjadinya stagnasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat berakibat termarginalkan di dalam peta Otonomi Daerah.

## **H. Faktor-Faktor Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan**

### **1. Motivasi**

Kemampuan seseorang aparat dapat diukur melalui indikator motivasi kerjanya yang mendorong atau merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan. Motif adalah tenaga pendorong manusia untuk bertindak atau tenaga yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak (Gibson, dkk, 1993). Siagian (1989) mendefinisikan motivasi sebagai daya pendorong yang mengakibatkan seseorang

anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan (keahlian, keterampilan, tenaga dan waktu) untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi.

Maslow (1984) mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarah kepada perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Selanjutnya Herzberg dalam Gibson (1990) menjelaskan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kepuasan pegawai, dan faktor lainnya yang dapat mencegah terjadinya kepuasan dikalangan anggota organisasi. Kepuasan kerja (*Job Satisfaction*) tidak berada pada tingkat yang sama dengan ketidakpuasan (*Job Dissatisfaction*). Faktor yang pertama adalah 'motivator' yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan perasaan positif terhadap pekerjaan dan isi pekerjaan itu, termasuk pengakuan terhadap kemampuan dan prestasi kerja, kesempatan karier, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan perasaan negative terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Faktor higienis meliputi kebijaka organisasi, administrasi, supervisi teknis, gaji, kondisi kerja, hubungan antar pribadi dan organisasi.

Batinggi (1990) mengemukakan ada 3 esensi pendekatan *human relation traditional* yaitu :1) motivasi utama aparat ialah ekonomi dan keamanan suatu kondisi lingkungan yang menyenangkan, 2) pemenuhan

kebutuhan sebagai imbalan kerja akan berpengaruh positif terhadap moral aparat, dan 3) terdapat korelasi positif dengan tingkat produktivitas. Hasibuan (1997) menjelaskan bahwa secara spesifik, peningkatan kualitas kinerja sumber daya aparatur adalah *motivasi*. Pemberian motivasi oleh kepala/ pimpinan atau manajer kepada bawahannya adalah peningkatan kinerja.

Untuk meningkatkan peranan dan fungsi pemerintah kelurahan, diperlukan kemampuan dan kemauan (motivasi) setiap Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*). Kesadaran (motivasi) seorang Lurah dalam memberikan pelayanan ditentukan oleh faktor : *Pertama*; Faktor ideal yang bersumber dari rasa kasih sayang, tolong menolong dan beramal saleh. *Kedua* \ Faktor material dari sudut organisasi berupa hak dan kewajiban yang ditujukan kepada yang berkepentingan. Sasaran manajemen pelayanan umum yaitu kepuasan walaupun sifatnya relatif, tetapi bisa dikenali pihak memperoleh pelayanan dan yang diukur apakah ia dapat menerima perlakuan dan hasil berupa hak dengan kegembiraan dan keikhlasan (Moenir, 1992).

Menurut Musanef (1992,56), pembinaan karier pada dasarnya mempunyai dua sasaran timbal balik, yaitu :

- a. Pembinaan karier harus ditujukan agar fungsi-fungs dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien .
- b. Memberikan prospek yang baik bagi masa depan pegawai antara lain dengan memberikan kehidupan yang layak, kenaikan

pangkat, jabatan yang jelas prospeknya, tempat pekerjaan yang menyenangkan dan jaminan-jaminan sosial lainnya.

- c. Pembinaan sistem karier yang tepat adalah merupakan salah satu dimensi organisasi yang baik, oleh karena dengan sistem pembinaan karier yang baik dan dilaksanakan dengan baik pula akan dapat menimbulkan kegairahan bekerja, dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh pegawai, tetapi sebaliknya apabila tidak ada sistem pembinaan karier yang baik atau secara formal ada sistem pembinaan karier yang baik tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan berbagai macam frustrasi kemudian dapat menurunkan gairah dan prestasi serta produktivitas kerja para pegawai.

## **2. Kemampuan teknis, komunikasi, koordinasi dan kerjasama**

Standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh aparatur adalah kemampuan dalam : 1) menjelaskan kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi instansi dalam hubungannya dengan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) menerapkan konsep dan teknik pengorganisasian, dan koordinasi dengan benar, baik dalam hubungan internal maupun eksternal; 3) mengoperasionalkan sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pelayanan prima; 4) melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan; 5). melaksanakan kebijakan pelayanan

prima; 6) mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya; 7) menerapkan prinsip dan teknik perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja unit organisasi; 8) membangun kerjasama dengan unit-unit terkait, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya; 9) menerapkan teknik pengelolaan, penyampaian informasi dan pelaporan yang efektif dan efisien; 10) memotivasi SDM dan atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja; 11) mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan 12) memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kegiatan kepada atasannya.

Berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkat aparatur) sebagai pejabat struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kelurahan, maka standar kompetensi yang perlu dimilikinya dan harus selalu mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim (2001 : 2), adalah kemampuan dalam :

- a. Menjabarkan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional ke dalam program instansinya;
- b. Memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit organisasi;
- c. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi

kinerja unit organisasinya serta merancang tindak lanjut yang diperlukan;

- d. Merumuskan strategi pelaksanaan pelayanan prima sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasi;
- e. Menerapkan sistem dan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan unit organisasinya;
- f. Meningkatkan kapasitas organisasi dan staf melalui peningkatan kompetensi pegawai dan pendayagunaan organisasi;
- g. Menumbuh kembangkan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya;
- h. Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam keragaman;
- i. Merumuskan dan memberi masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis dan sistematis;
- j. Melaksanakan pola kemitraan, kolaborasi, dan pengembangan jaringan kerja;
- k. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas;
- l. Berkomunikasi.

Uraian pendapat tersebut menunjukkan bahwa kompetensi seorang Lurah dalam pemerintahan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan banyak faktor yang saling berkaitan. Menurut Kaliski (dalam Gani, 1986 : 6) terdapat 4 (empat) dimensi yang dapat digunakan untuk mengamati konsep kompetensi, yaitu : (1) keterampilan, (2) mental, (3) fisik, dan (4) tanggungjawab.

### **3. Pendidikan dan pelatihan**

Hasibuan (1997) menjelaskan bahwa secara spesifik, peningkatan kualitas kinerja sumber daya aparatur adalah pendidikan. Dalam strategi peningkatan kinerja, faktor utama perlu diperhatikan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana untuk mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Pendidikan merupakan jalur utama untuk membangun pondasi kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu pendidikan harus mampu mengembangkan kepribadian, sikap mental, daya analisa, kreatifitas dan inovasi serta penguasaan pengetahuan yang luas pada bidang studi yang diajarkan.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dalam bangsanya (Tilaar, 1997:132). Dengan demikian pembangunan pendidikan harus dapat berfungsi mengaitkan dua hal yaitu ; Pertama, menyiapkan tenaga kerja pembangunan dalam rangka pengembangan sumber-sumber manusiawi, dan kedua, membina masyarakat yang terbuka, tertib dan dinamis yang makin menjadi

landasan bagi terbinanya masyarakat Indonesia yang kokoh dalam proses pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf dan kualitas manusia Indonesia. Hanya manusia dan masyarakat yang cerdas yang dapat melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang semakin bermutu. Hal ini berarti bahwa pembangunan keseluruhan sistem pendidikan harus dilaksanakan bersama sesuai dengan pembangunan sektor lainnya. Dalam pengertian yang lain, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan, pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian informasi yang berlangsung dalam situasi komunikasi antar manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pendidikan dan pelatihan antara lain adalah (1) meningkatkan pengabdian mutu, keahlian dan keterampilan, (2) menciptakan adanya pola pikir yang sama, (3) menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik dan (4) membina karier (Tilaar, 1997:17).

Pelatihan atau *training* adalah suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan karyawan/ pegawai sesuai dengan keinginan organisasi, dengan demikian pelatihan yang dimaksud adalah pengertian yang luas tidak terbatas hanya untuk mengembangkan berbagai keterampilan semata-mata. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi pengembangan sumber

daya manusia. Mengantisipasi berbagai perubahan tatanan pembangunan nasional dalam era reformasi ini, banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek pembangunan bangsa termasuk paradigma baru penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang lebih menekankan azas desentralisasi. Untuk menyelesaikan agenda tersebut diperlukan adanya tindakan antisipatif dan ekstra hati-hati dalam menindaklanjuti segala tuntutan perubahan dan rambu penting bagi perubahan itu ialah berubah tanpa merusak dan merubah sambil melatih. Oleh karena memasuki millennium ketiga dimana pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, profesional, jujur, bersih, berwibawa, kreatif dan inovatif semakin diperlukan sebagai landasan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah pada semua sektor pembangunan, dan untuk hal-hal tersebut pelatihan baik teknis struktural maupun teknis fungsional menjadi sangat strategis (Mustopadidjaya, 2000).

#### **4. Peran Kelembagaan / Kepemimpinan**

Hasibuan (1997) menjelaskan bahwa secara spesifik, peningkatan kualitas kinerja sumber daya aparatur dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Faktor ini cukup strategi dalam membangun kinerja dalam suatu organisasi atau institusi. Dalam suatu studi tentang kepemimpinan (*leadership*) oleh Larry C. Spears (1999:119-121) dalam '*A Survey Of Theory And Research*', menyatakan bahwa kepemimpinan bukanlah popularitas, bukan kekuasaan, bukan kebijaksanaan dalam perencanaan jangka panjang, melainkan kepemimpinan merupakan faktor dalam

menyelesaikan sesuatu dengan bantuan orang lain, pendengar, berorientasi tugas, mempunyai rasa strategis, berhasrat memahami, memberikan empati dan mau bekerjasama yang menuju peningkatan produktifitas kerja (Kinerja). Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan individu untuk mengayomi kelompok masyarakat dan menyelesaikan masalah yang lebih efektif, efisien dan berdayaguna, sehingga setiap individu dipengaruhi oleh karakter, kepribadian, pengalaman, pengetahuan, serta situasi dan kondisi yang dihadapinya dalam suatu proses untuk memerankan kepemimpinan dalam organisasi sebagai penggerak, dinamisator segala sumber daya yang dimiliki organisasi, berperan sebagai pemimpin dalam organisasi yang memiliki tugas manajemen untuk menggerakkan orang lain atau kelompok, guna mencapai tujuan organisasi, serta berperan sebagai seorang pemimpin yang baik, berkewajiban membina hubungan pribadi ( human relation ) secara vertikal dan horizontal serta memiliki kemampuan dan kemauan berkomunikasi secara baik dan luwes.

Peranan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dalam GBHN 1988, Program Kabinet Pembangunan V dan Repelita V menetapkan 8 program pemacu pendayagunaan aparatur negara (Program PAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi pelaksanaan pengawasan, penerapan analisis jabatan, penyusunan jabatan fungsional, peningkatan mutu kepemimpinan, penyederhanaan tatalaksana pelayanan umum, sistem administrasi pemerintahan serta

penitikberatan otonomi pada daerah Kota/ kota.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan pengembangan aparatur dan organisasi. Pengembangan merupakan salah satu unsur dari manajemen. Pengembangan sumber daya aparatur dan organisasi pemerintahan pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut hanya dapat terwujud melalui penyempurnaan berbagai produk hukum yang mengatur pemberdayaan yang meliputi pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pembinaan sehingga keseluruhan unsur yang ada dalam setiap organisasi pemerintahan dapat meningkatkan produktivitasnya. Bramban dalam Ismail Said (2001:30 ) menjelaskan bahwa pimpinan harus mampu memberikan kesempatan yang sama terhadap semua pegawai yang ada. Terdapat empat hal yang harus dilakukan yaitu; (1) suatu organisasi harus mampu mencari bakat dan keterampilan dari tiap-tiap pegawainya, terutama yang berhubungan dengan kesuksesan jalannya organisasi, (2) memberikan kesempatan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (3) menciptakan iklim kerja yang komunikatif, (4) memenuhi pencapaian target organisasi.

Lebih lanjut dikatakan Bramban bahwa hal lain yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pemberdayaan aparatur diperlukan: (1) pengurangan monopoli seorang birokrat, dengan mendelegasikan wewenang yang dimiliki kepada bawahannya sesuai makna

pemberdayaan, (2) setiap aparat dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, (3) pemberdayaan juga menghendaki berkurangnya sentralistik formalistik kekuasaan, (4) perwujudan konsepsi diatas hanya dapat dilakukan jika sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi memiliki keunggulan dan profesionalisme yang cukup. Aplikasi keempat hal diatas tentu bukanlah hal yang mudah karena sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan juga peningkatan kesejahteraan merupakan faktor penentu setiap aparatur pemerintah untuk dapat memiliki disiplin, motivasi, kemampuan profesional dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dan tanah air.

Soeharyo (1996:21) mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah harus ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mampu meningkatkan prakarsa dan peran aktifnya dalam pembangunan. Berhubung dengan itu kebijakan pemerintah yang baik harus memenuhi kriteria berikut : (1) berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (2) antisipasi dan berorientasi ke depan, (3) berorientasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya, (4) adil dan berpihak kepada golongan yang lemah, (5) tepat dan layak, (6) kesesuaian, (7) mendorong kompetisi dan (8) jelas. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal I Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, ditegaskan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Dinas Tingkat Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001, sangat jelas menunjukkan peran yang diemban oleh Dinas Tingkat Daerah di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Majene, meliputi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, peralatan/ perlengkapan dan tata usaha di lingkungan dinas, pembinaan kemasyarakatan, dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan, dan melaksanakan tugas teknis sesuai dengan kemampuan dan bidang tugasnya. Selanjutnya dalam pembinaan sumberdaya aparatur perlu ditentukan arah kebijaksanaan pengembangannya. Masalah pengembangan sumberdaya aparatur pada hakekatnya diarahkan antara lain untuk makin mewujudkan administrasi kepegawaian negara yang mantap dengan pengembangan karier yang berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan serta kemantapan sikap mental aparatur yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menganut gabungan antara sistem karier dan system prestasi kerja, sebagaimana tersebut dalam pasal 12 ayat (2) bahwa : Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

### **I. Kerangka Konseptual**

Kehadiran pemerintah secara institusional memainkan peranan yang strategis dan vital di dalam menyelenggarakan kepemimpinan pemerintahan dimanapun dan kapanpun saja. Menurut C.F.Strong dalam Pamudji (1992:23-24), pemerintah atau pemerintahan adalah organisasi dalam hal mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional) : pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (Pamudji, 1992: 24-25).

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah lama

menuai sorotan publik akibat masih rendahnya kualitas kinerja aparatur dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Maas dalam Sarundajang (2002) menyatakan fungsi utama pemerintahan adalah fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pelayanan (*services*). Suatu negara, bagaimanapun bentuknya dan seberapa luas wilayahnya tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral terus menerus, dan keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada pemerintah daerah sehingga kewenangan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum didistribusikan secara sentral dan lokal.

Implementasi kebijaksanaan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemberlakuan asas desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 memuat sejumlah penyerahan hak dan kewajiban serta kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berlakunya kebijaksanaan tersebut menandai terjadinya sejumlah perubahan, reformasi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan di daerah termasuk penataan kelembagaan pemerintah kelurahan. Perubahan struktur kelembagaan pemerintah kelurahan terutama dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan di dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk tujuan itu, maka dalam PP No.73 tahun

2005 tentang kelurahan, diatur sejumlah fungsi bagi pemerintah kelurahan baik secara kelembagaan maupun fungsi perangkat aparatur atau personilnya.

Pasal 5 PP No 37 Tahun 2005 menetapkan bahwa Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) mempunyai fungsi yaitu : 1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pelayanan masyarakat, 4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan 6) pembinaan lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, ayat 2) setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Robbins (1995: 4) menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dalam organisasi pemerintahan kita dapat menemukan adanya individu atau sekelompok individu (aparatur) yang bekerja sesuai dengan keahlian dan tugas-tugas tertentu sehingga dikatakan organisasi adalah sebagai wadah tempat berlangsungnya kegiatan (*to get the job done*)

Pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan perlu mengacu kepada kebijaksanaan yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku khususnya yang sudah diatur dalam PP No.73 tahun 2005 tersebut di atas sehingga diharapkan dapat terwujud atau tercapai efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan secara menyeluruh sesuai tujuan dan sasaran yang diinginkan atau diharapkan.

Eksistensi pemerintah kelurahan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang sudah digariskan dalam Tupoksi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain motivasi, kemampuan teknis, koordinasi dan kerjasama, pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana, peran kelembagaan. Maslow (1984) mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarah kepada perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Selanjutnya Herzberg dalam Gibson (1990) menjelaskan faktor 'motivator' yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan perasaan positif terhadap pekerjaan dan isi pekerjaan itu, termasuk pengakuan terhadap kemampuan dan prestasi kerja, kesempatan karier, dan tanggung jawab. Faktor higienis yang berpengaruh meliputi kebijakan organisasi, administrasi, supervisi teknis, gaji, kondisi kerja, hubungan antar pribadi dan organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Kaliski dalam Gani (1986 : 6) mengemukakan empat dimensi faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja seseorang, yaitu keterampilan, mental, fisik, dan tanggungjawab.

Pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan menurut Hasibuan (1997) juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan aparatur. Pendidikan

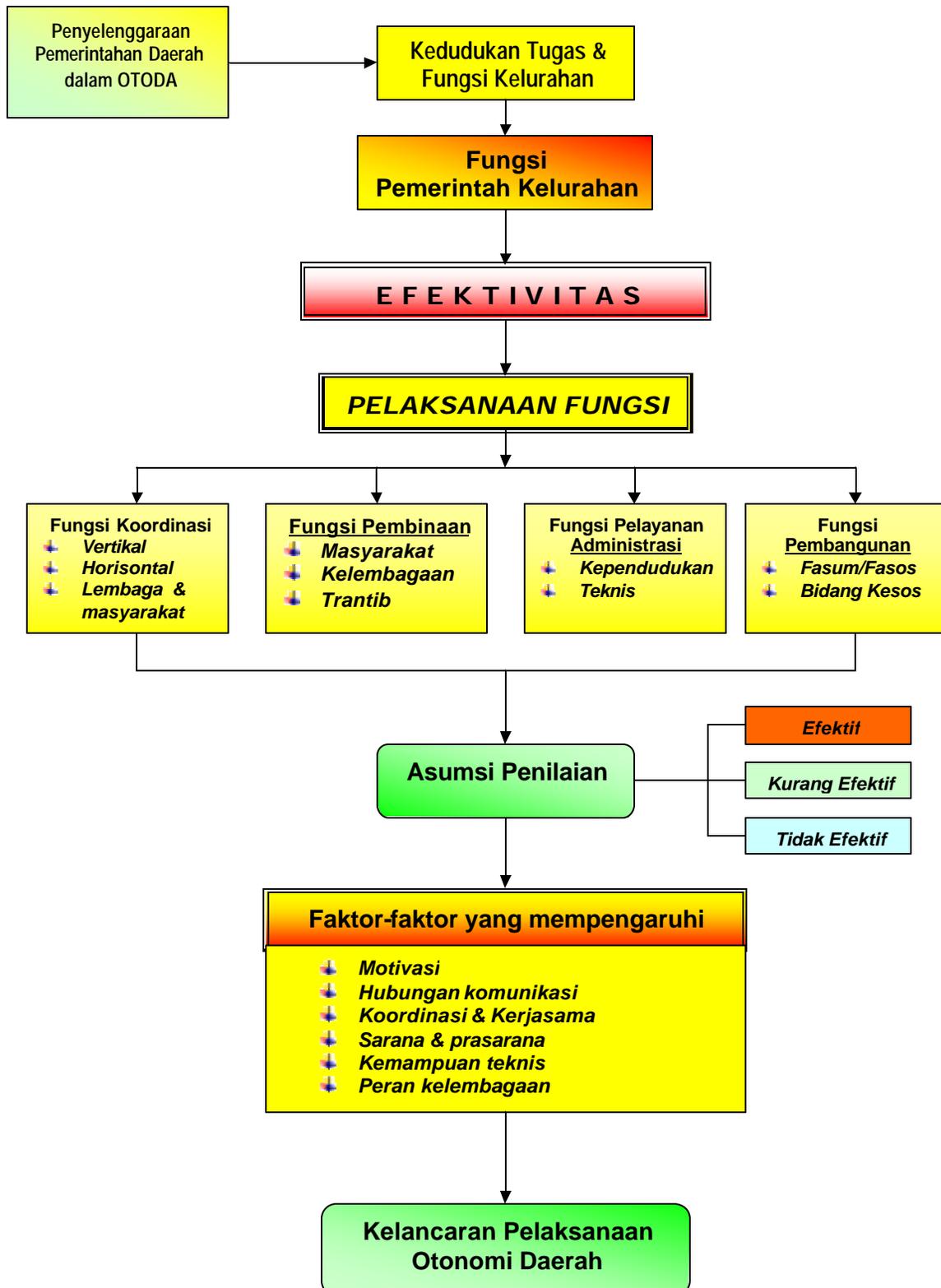
harus mampu mengembangkan kepribadian, sikap mental, daya analisa, kreatifitas dan inovasi serta penguasaan pengetahuan yang luas. Di samping itu, peran kelembagaan atau kepemimpinan juga dinilai berpengaruh secara spesifik terhadap pelaksanaan fungsi aparatur atau organisasinya secara keseluruhan. Larry C. Spears (1999:119-121), menyatakan kepemimpinan merupakan faktor dalam menyelesaikan sesuatu dengan bantuan orang lain, pendengar, berorientasi tugas, mempunyai rasa strategis, berhasrat memahami, memberikan empati dan mau bekerjasama yang menuju peningkatan produktifitas kerja (kinerja). Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan individu untuk mengayomi kelompok masyarakat dan menyelesaikan masalah yang lebih efektif, efisien dan berdayaguna, sehingga setiap individu dipengaruhi oleh karakter, kepribadian, pengalaman, pengetahuan, serta situasi dan kondisi yang dihadapinya dalam suatu proses untuk memerankan kepemimpinan dalam organisasi sebagai penggerak, dinamisator segala sumber daya yang dimiliki organisasi, berperan sebagai pemimpin dalam organisasi yang memiliki tugas manajemen untuk menggerakkan orang lain atau kelompok, guna mencapai tujuan organisasi, serta berperan sebagai seorang pemimpin yang baik, berkewajiban membina hubungan pribadi (*human relation*) secara vertikal dan horizontal serta memiliki kemampuan dan kemauan berkomunikasi secara baik dan luwes.

Indrawijaya (1989 : 25) menyatakan bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi yang dicapai oleh total personil yang ada dalam

suatu lembaga/organisasi. Efektivitas organisasi dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Sedangkan menurut Etzioni (1985 : 12), efisiensi organisasi berkaitan dengan sumber daya per satuan *output*. Efektivitas ditentukan oleh adanya sumber daya dalam hal ini personil pelaksana kegiatan.

Efektivitas pemerintahan kelurahan melaksanakan fungsinya sesuai yang telah digariskan dalam tupoksinya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menurut tingkat kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan akan terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang lancar dan efektif. Untuk jelasnya diformulasikan dalam skema gambar di bawah :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



## J. Definisi Operasional

Dalam upaya menyamakan persepsi terhadap variabel penelitian yang diajukan, diuraikan beberapa definisi operasional variabel beserta indikatornya sebagai berikut :

### **Data Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan**

1. **Efektivitas** adalah tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.
2. **Fungsi** adalah pelaksanaan tugas dan pekerjaan pemerintah kelurahan (Lurah dan perangkatnya) sesuai yang digariskan dalam Tupoksi yaitu fungsi koordinasi, pembinaan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan teknis administrasi, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum / sosial, serta fungsi pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.
3. **Pelaksanaan** adalah seluruh rangkaian kegiatan tugas dan pekerjaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan (Lurah dan perangkatnya) meliputi fungsi koordinasi, pembinaan, pelayanan administrasi, pembangunan fasilitas umum dan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah pemerintahannya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melancarkan

pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.

Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan aparat terlibat aktif melakukan fungsi koordinasi
- b. Lurah dan aparat terlibat aktif melakukan fungsi pembinaan
- c. Lurah dan aparat terlibat aktif melakukan fungsi pelayanan
- d. Lurah dan aparat terlibat aktif melakukan fungsi fasilitasi pembangunan fasum dan fasos
- e. Lurah dan aparat terlibat aktif melakukan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat
- f. Lurah dan aparat terlibat aktif melakukan fungsi kerjasama dengan berbagai pihak

*Kurang Efektif*, jika : 4-5 dari lima indikator *a-f* terpenuhi

*Tidak Efektif*, jika : < dari 4 dari lima indikator *a-e* terpenuhi

4. **Fungsi koordinasi** adalah keterlibatan aktif pemerintah kelurahan (Lurah dan perangkatnya) melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi vertikal (koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Sekretaris Daerah) dan koordinasi horizontal (koordinasi dengan instansi terkait) sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.

Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan aparat sering terlibat berkoordinasi dengan Camat

- b. Lurah dan aparat sering terlibat berkoordinasi dengan Setda
- c. Lurah dan aparat sering terlibat berkoordinasi dengan pimpinan dan aparat dari instansi terkait

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan aparat jarang terlibat melaksanakan ketiga indikator a-c di atas

*Tidak Efektif*, jika : Lurah dan aparatnya tidak pernah terlibat melaksanakan ketiga indikator fungsi a-c di atas

5. **Fungsi pembinaan** adalah keterlibatan aktif pemerintah kelurahan (Lurah dan perangkatnya) melakukan kegiatan-kegiatan pengarahan atau penyuluhan berbagai hal termasuk pemeliharaan ketentrama dan ketertiban umum, dan sosialisasi (pembinaan tata cara pelayanan dan teknis administrasi) dalam rangka pembinaan kepada masyarakat dan kelebagaannya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene. Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan aparat sering terlibat melakukan kegiatan pengarahan dan penyuluhan-penyuluhan
- b. Lurah dan aparat sering terlibat dalam sosialisasi pembinaan tata cara / pelayanan masyarakat
- c. Lurah dan aparat sering terlibat dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan
- d. Lurah/ aparat sering terlibat dalam pelayanan teknis administrasi

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan aparat jarang terlibat melaksanakan

kelima indikator *a-d* di atas

*Tidak Efektif*, jika: Lurah dan aparat tidak pernah terlibat melaksanakan

kelima indikator *a-d* di atas

6. **Fungsi pelayanan administrasi kependudukan** adalah keterlibatan aktif pemerintah kelurahan (Lurah dan perangkatnya) melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di bidang kependudukan dalam wilayah pemerintahannya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene. Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan aparat sering terlibat melakukan pendataan penduduk
- b. Lurah dan aparat melaksanakan pengurusan KTP sesuai prosedur
- c. Lurah / aparat memberikan pelayanan yang mudah dan tepat waktu

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan perangkatnya jarang melaksanakan ketiga indikator fungsi *a-c* di atas

*Tidak Efektif*, jika: Lurah dan perangkatnya tidak pernah melaksanakan ketiga indikator fungsi *a-c* di atas

7. **Fungsi pelayanan teknis administrasi** adalah keterlibatan aktif pemerintah kelurahan memberikan petunjuk teknis kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan (LKMD, BPD, PSM, organisasi kepemudaan dan lainnya) untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene. Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan aparat sering terlibat melaksanakan pendataan dan pencatatan sipil
- b. Lurah dan aparat sering terlibat mendistribusikan surat-surat (pajak, tagihan retribusi dan lainnya)
- c. Lurah / aparat sering mempermudah/ memperlancar pengurusan surat-surat rekomendasi izin tertentu yang dibutuhkan masyarakat

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan perangkatnya jarang melaksanakan ketiga indikator fungsi a-c di atas

*Tidak Efektif*, jika: Lurah dan perangkatnya tidak pernah melaksanakan ketiga indikator fungsi a-c di atas

- 8. Fungsi pembangunan / pemeliharaan fasilitas umum dan sosial** adalah keterlibatan aktif pemerintah kelurahan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahnya dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.

Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas pendidikan
- b. Lurah dan aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas kesehatan
- c. Lurah / aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas peribadatan dan keamanan lingkungan
- d. Lurah / aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi

pembangunan fasilitas perekonomian

- e. Lurah / aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas / infrastruktur jalan
- f. Lurah / aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas TPI

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan aparat jarang terlibat melaksanakan keenam indikator *a-f* di atas

*Tidak Efektif*, jika: Lurah dan aparat tidak pernah terlibat melaksanakan keenam indikator *a-f* di atas

9. **Fungsi pembangunan kesejahteraan sosial** adalah keterlibatan aktif pemerintah kelurahan memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan roda perekonomian di wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene. Indikator ukuran digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembinaan / pengelolaan usaha
- b. Lurah dan aparat sering terlibat mendorong/memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan manajemen usaha
- c. Lurah dan aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pemberian bantuan modal usaha
- d. Lurah / aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi akses pemasaran hasil-hasil produksi masyarakat
- e. Lurah / aparat sering terlibat mendorong dan memfasilitasi program pengentasan kemiskinan

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan aparat jarang terlibat melaksanakan kelima indikator a-e di atas

*Tidak Efektif*, jika: Lurah dan aparat tidak pernah terlibat melaksanakan kelima indikator a-e di atas

**10. Fungsi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum** adalah keterlibatan aktif pemerintah kelurahan memfasilitasi melakukan berbagai kegiatan pengamanan lingkungan dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah pemerintahannya dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene. Indikator ukuran digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan aparat sering terlibat mendorong terciptanya stabilitas keamanan lingkungan / perlindungan masyarakat
- b. Lurah dan aparat sering terlibat mendorong/memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik antar warga
- c. Lurah dan aparat sering terlibat mendorong pembentukan sistim keamanan lingkungan (siskamling)
- d. Lurah / aparat sering terlibat berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat keamanan untuk melindungi warganya
- e. Lurah / aparat sering terlibat membantu warga bilamana mengalami gangguan kewanibakatan dan bencana

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan aparat jarang terlibat melaksanakan kelima indikator a-e di atas

*Tidak Efektif*, jika: Lurah dan aparat tidak pernah terlibat melaksanakan kelima indikator a-e di atas

**Data Faktor-Faktor Efektivitas Pelaksanaan Fungsi**

11. **Motivasi** adalah faktor-faktor yang mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan (Lurah dan perangkatnya) dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene.

Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan staf memahami tanggung jawab dan fungsinya
- b. Lurah dan staf melaksanakan tanggung jawab dengan baik
- c. Lurah dan staf terpenuhi kebutuhannya

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan staf kurang melaksanakan ketiga indikator *a-c* di atas

*Tidak Efektif*, jika : Lurah dan staf tidak melaksanakan ketiga indikator *a-c* di atas

12. **Komunikasi** adalah keterlibatan pemerintah kelurahan (Lurah dan perangkatnya) melakukan fungsi komunikasi yang baik dan lancar serta efektif dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene. Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan staf terlibat aktif berkomunikasi
- b. Lurah dan staf melakukan komunikasi secara transparan

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan staf kurang melaksanakan kedua indikator *a-b* di atas

*Tidak Efektif*, jika : Lurah dan staf tidak melaksanakan kedua indikator *a-c* di atas

**13. Koordinasi dan kerjasama** adalah kemampuan pemerintah kelurahan melaksanakan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat dalam melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene. Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Lurah dan staf terlibat aktif berkoordinasi dan bekerjasama
- b. Aktivitas koordinasi dan kerjasama sesuai harapan masyarakat

*Kurang Efektif*, jika : Lurah dan staf kurang melaksanakan kedua fungsi dari indikator *a-b* di atas

*Tidak Efektif*, jika : Lurah dan staf tidak melaksanakan kedua indikator fungsi *a-b* di atas

**14. Prasarana dan sarana** adalah kemampuan pemerintah kelurahan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada kantor masing-masing dalam melancarkan pelayanan masyarakat di Kab. Majene. Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Tersedia fasilitas ruang kerja & ruang pelayanan masyarakat
- b. Kenyamanan ruang pelayanan
- c. Tersedia fasilitas kerja administrasi
- d. Tersedia fasilitas kerja operasional

*Kurang Efektif*, jika : 3 dari keempat indikator *a-d* di atas terpenuhi

*Tidak Efektif*, jika : hanya 1-2 dari keempat indikator *a-d* di atas terpenuhi

**15. Kemampuan teknis** adalah kemampuan pemerintah kelurahan melaksanakan fungsinya yang didukung sejumlah tenaga teknis,

tingkat pendidikan aparat yang memadai, serta memiliki keahlian/ keterampilan yang tinggi dalam melancarkan tugas dan tanggung jawab pelayanan masyarakat di Kab. Majene.

Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Tersedia jumlah tenaga teknis sesuai yang dibutuhkan
- b. Tingkat pendidikan mendukung pelaksanaan fungsi
- c. Tingkat keterampilan mendukung pelaksanaan fungsi

*Kurang Efektif*, jika : 2 dari ke tiga indikator *a-c* di atas terpenuhi

*Tidak Efektif*, jika : 0-1 dari ke tiga indikator *a-c* di atas terpenuhi

16. **Peran kelembagaan** adalah komitmen pemerintah kelurahan melaksanakan fungsinya dalam melancarkan tugas dan tanggung jawab pelayanan masyarakat di Kab. Majene.

Indikator ukuran yang digunakan :

*Efektif*, jika :

- a. Pimpinan memiliki komitmen yang tinggi
- b. Pimpinan memiliki empati yang tinggi
- c. Pimpinan memiliki responsibilitas yang tinggi
- d. Kesesuaian pelaksanaan program-program

*Kurang Efektif*, jika : 3 dari keempat indikator *a-d* di atas terpenuhi

*Tidak Efektif*, jika : 1-2 dari keempat indikator *a-d* di atas terpenuhi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada keempat belas kelurahan yang ada di Kabupaten Majene. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kecenderungan sejumlah desa yang menghendaki dibentuknya kelurahan.
2. Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.
3. Daerah kabupaten itu merupakan tempat penulis berdomisili dan sekaligus tempat bertugas pada salah satu instansi pemerintah daerah

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat (KK) yang bermukim pada 14 (empat belas) kelurahan (4 kecamatan) di Kabupaten Majene yang berjumlah 78.058 Jiwa atau **12.621** KK.

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja dan acak. Sampel wilayah/ lokasi dalam penelitian dipilih 5 (lima) kelurahan, yaitu Kelurahan Totoli, Baruga Dhua, Mosso, Lalampanua dan Kelurahan Malunda.

Dari kelima kelurahan sebagai sample wilayah itu, terdapat sekitar 5.330 KK, dan dari jumlah itu diambil sampel secara sengaja sebanyak 100 KK, dengan rincian : 30 KK di Kelurahan Totoli, 15 KK di Kelurahan Baruga Dhua, 15 KK di Kelurahan Mosso, dan masing-masing 20 KK di Kelurahan Lalampanua dan Malunda: dari 100 KK itu adalah sebagai responden dalam penelitian ini.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

**1. Data Primer**, yaitu data yang diperoleh melalui hasil kuesioner dan wawancara dengan responden, narasumber dan informan di lapangan. Adapun narasumber dan informan yang dipilih dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

<b>Narasumber/ Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1. Sekretariat Daerah Kab.Majene	
a. Setda	1 Orang
b. Asisten 1 Bagian Pemerintahan	1 Orang
2. Pimpinan/ staf instansi terkait	6 Orang
3. Pemerintah Kecamatan :	
a. Camat Banggae dan staf	3 Orang
b. Camat Sendana dan staf	3 Orang
c. Camat Pamboang dan staf	3 Orang
d. Camat Malunda dan staf	3 Orang
4. Pemerintah Kelurahan :	
a. Lurah	5 Orang
b. Staf	10 Orang
5. Ketua RT/RW	10 Orang
4. Tokoh masyarakat LSM	5 Orang
<b>Total</b>	<b>50 Orang</b>

**2. Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang ada antara lain : kajian pustaka, dokumen peraturan perundang-undangan, dan data yang berasal dari Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. *Observasi*, melalui pengamatan langsung di lapangan atas kenyataan dan permasalahan utama yang terjadi secara obyektif di lapangan.
2. *Telaah dokumentasi*, melalui kajian literatur, dokumen, peraturan-peraturan, undang-undang, keputusan-keputusan serta berbagai kajian referensi lainnya.
3. *Kuesioner*, melalui daftar isian pertanyaan yang ditentukan sebelumnya dan dibagikan kepada responden untuk diisi dan dijawab sesuai kebutuhan data penelitian.
4. *Interview*, melalui wawancara berstruktur dan bebas secara mendalam guna melengkapi data hasil kuesioner.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data yang diperoleh untuk keperluan analisis, pertama-tama dilakukan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian,

untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teknik "analisis kualitatif". Sekalipun dalam penelitian ini diperoleh data kuantitatif seperti angka-angka dan grafik, semata-mata dimaksudkan untuk mengukur kontinuitas masalah serta untuk mempermudah dan mempertajam analisis empiris yang lebih banyak bersifat kualitatif.

Penentuan kategorisasi dan rating score untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene, dipergunakan rating scale Likert (Kerlinger, 1999) sebagai berikut:

Kategori Indikator Pengukuran Variabel

Kategori	Persentase
<i>Tinggi / Sangat Efektif</i>	<i>85% - 100%</i>
<i>Sedang / Efektif</i>	<i>75% - 84%</i>
<i>Rendah / Kurang efektif</i>	<i>50 %-74 %</i>
<i>Sangat Rendah/ Tidak efektif</i>	<i>&lt; 50 %</i>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Kabupaten Majene**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Majene**

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah kabupaten dari lima kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Daerah kabupaten ini terbentuk sejak tahun 1985 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas). Sebelum terbentuk menjadi sebuah kabupaten, ia merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Polmas. Terbentuknya Kabupaten Majene tersebut sekaligus menambah jumlah kabupaten di Sulawesi Selatan sebelum akhirnya bergabung dalam wilayah provinsi yang baru terbentuk tahun 2004 yaitu Provinsi Sulawesi Barat.

Seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana direvisi menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004, Kabupaten Majene ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom. Ini juga berarti memiliki hak dan kewenangan untuk menggali, mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Selain itu, juga memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri.

## 2. Keadaan Wilayah Geografis dan Pemerintahan

Secara umum, Kabupaten Majene mempunyai luas wilayah  $\pm$  947,84 Km<sup>2</sup> atau  $\pm$  94.784 Ha. Letak geografis berada pada garis lintang antara 2.38'45" -3.38'15" LS dan garis bujur antara 118.45'00" -119 4'45" BT.

Secara administratif, Kabupaten Majene berbatasan dengan :

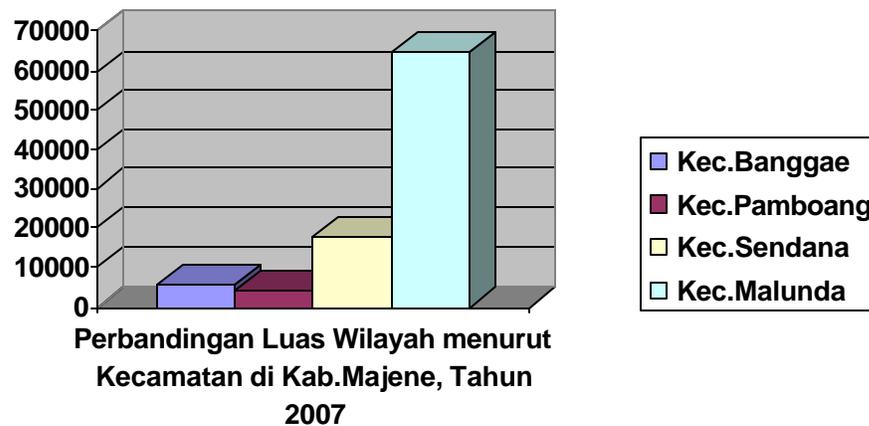
- Kabupaten Mamuju di Sebelah Utara
- Kabupaten Polman di Sebelah Timur
- Teluk Mandar di Sebelah Selatan
- Selat Makassar di Sebelah Barat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Majene terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Banggae, Pamboang, Sendana dan Malunda. Keempat kecamatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Keadaan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Banggae	5.519	5,8
2.	Pamboang	7.019	7,4
3.	Sendana	17.861	18,8
4.	Malunda	64.365	67,9
	Keadaan Wilayah Kab.Majene	94.784	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Majene, tahun 2006



Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari keempat wilayah kecamatan yang ada, Kecamatan Malunda merupakan yang terbesar luas wilayahnya yakni 64.365 Km<sup>2</sup> atau 67,9% dari total luas wilayah Kabupaten Majene. Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah luas wilayahnya adalah Kecamatan Banggae yakni hanya sekitar 5.519 Km<sup>2</sup> atau 5,8%.

Selanjutnya dari keempat wilayah kecamatan tersebut, diuraikan keadaan desa dan kelurahan sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 35 desa/ kelurahan di Kabupaten Majene. Dari jumlah tersebut, masing-masing 9 desa/ kelurahan di Kecamatan Banggae, 7 desa/ kelurahan di Kecamatan Pamboang, 10 desa/ kelurahan di Kecamatan Sendana, dan 9 desa/ kelurahan di Kecamatan Malunda.

Tabel 2 Keadaan Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jumlah
1.	Banggae	1) Totoli * 2) Banggae * 3) Labuang * 4) Tande * 5) Baruga * 6) Baru * 7) Pangali-ali * 8) Baurung * 9) Baruga Dua *	9
2.	Pamboang	1) Bonde 2) Bababulo 3) Simbang 4) Lalampanua * 5) Betteng 6) Adolang 7) Sirindu *	7
3.	Sendana	1) Mosso * 2) Puttada 3) Sendana 4) Tallu Banua 5) Tammereddo 6) Seppong 7) Ulidang 8) Onang 9) Tubo 10) Mosso Dua *	10
4.	Malunda	1) Sambabo 2) Kabiraan 3) Tande Allo 4) Ulumanda 5) Lombang 6) Malunda * 7) Lombong 8) Bambang 9) Mekkatta	9
Keadaan Desa/ Kelurahan di Wilayah Kab.Majene			35

Sumber : BPS Kabupaten Majene, tahun 2006

Ket . \* = kelurahan

### 3. Keadaan Demografi Penduduk

Seiring pesatnya perkembangan wilayah, mendorong terjadinya jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majene. Berdasarkan data BPS Kabupaten Majene bahwa sampai akhir Tahun 2006 tercatat sebanyak  $\pm$  50.156 Jiwa penduduk, dengan rincian  $\pm$  67.529 jiwa laki-laki dan  $\pm$  72.627 jiwa perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut masing-masing terbagi dalam empat kecamatan, yaitu 55.137 Jiwa di Kecamatan Banggae, 27.923 Jiwa di Kecamatan Pamboang, 36.222 Jiwa di Kecamatan Sendana, dan 20.874 Jiwa di Kecamatan Malunda. Untuk jelasnya disajikan di bawah ini.

Tabel 3 Keadaan Penduduk di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Banggae	26.871	28.226	55.137	39,3
2	Pamboang	12.886	15.037	27.923	19,9
3	Sendana	17.504	18.718	36.222	25,8
4	Malunda	10.265	10.606	20.874	14,9
Keadaan Penduduk Kab.Majene		<b>50.156</b>			100,0

Sumber : BPS Kabupaten Majene, tahun 2006



Data pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari keempat wilayah kecamatan yang ada, Kecamatan Banggae merupakan yang terbesar jumlah penduduknya yakni 55.173 Jiwa atau 39,3% dari total jumlah penduduk Kabupaten Majene. Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Malunda yakni hanya sekitar 20.874 Jiwa.

Gambaran data pada Tabel 1 dan 3 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Malunda merupakan yang terluas namun memiliki jumlah penduduk terkecil, sebaliknya bahwa Kecamatan Banggae mempunyai luas wilayah terkecil justru yang paling besar jumlah penduduknya. Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Banggae cukup beralasan mengingat bahwa daerah kecamatan itu merupakan ibukota Kabupaten Majene, yang menjadi *Growth Center* atau pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, serta pusat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk di daerah hinterland-nya.

## **B. Deskripsi Umum Kelurahan di Kabupaten Majene**

### **1. Keadaan Umum Wilayah Administratif**

Secara keseluruhan terdapat 14 (empat belas) kelurahan yang tersebar pada empat wilayah kecamatan di Kabupaten Majene. Keempat belas kelurahan tersebut merupakan hasil perubahan status dari desa menjadi kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang

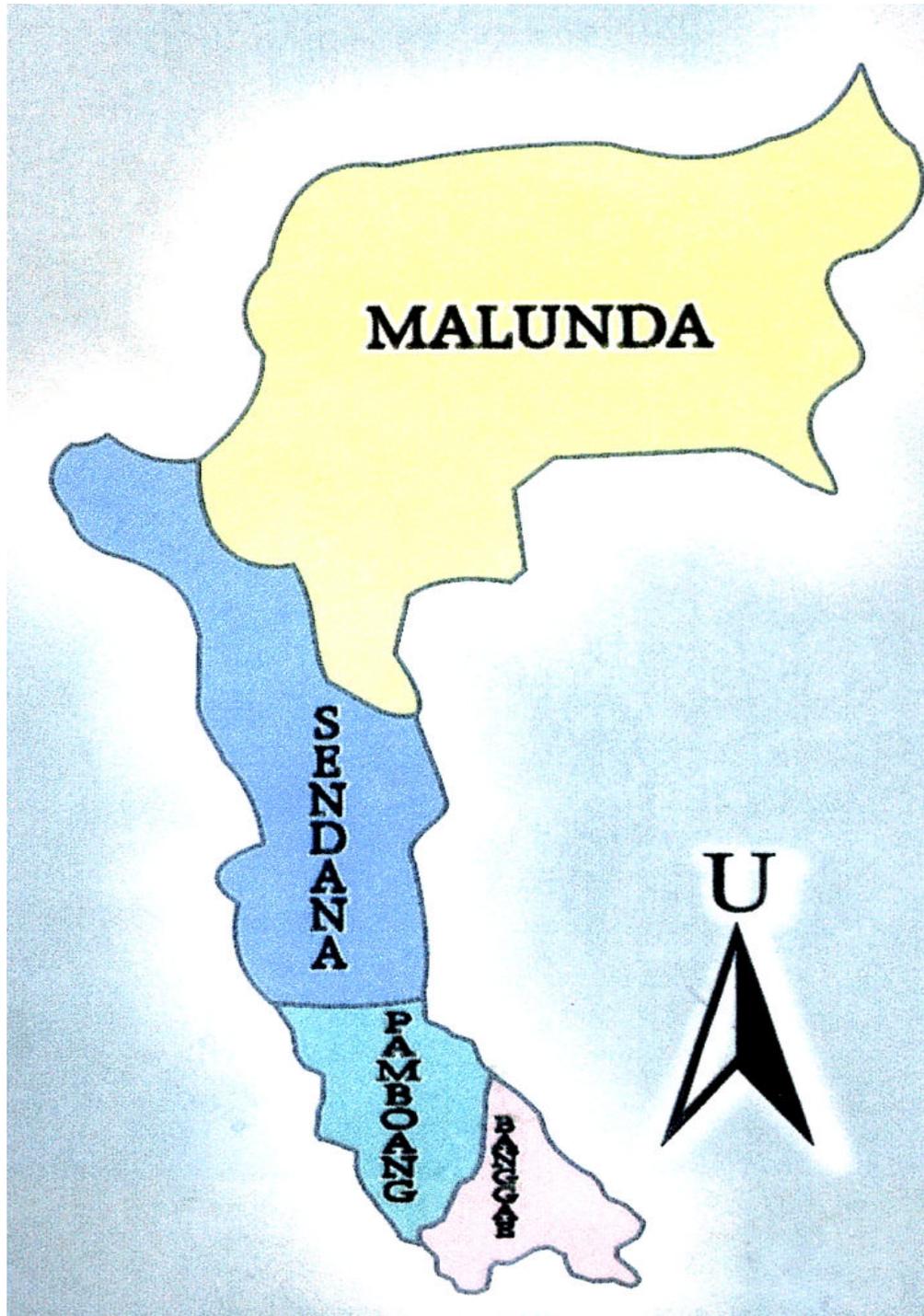
diberlakukan untuk masing-masing kelurahan yang ada. Secara umum keempat belas kelurahan tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Distribusi Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1.	Banggae	1) Totoli 2) Banggae 3) Labuang 4) Tande 5) Baruga 6) Baru 7) Pangali-ali 8) Baurung 9) Baruga Dua	9
2.	Pamboang	1) Lalampanua 2) Sirindu	2
3.	Sendana	1) Mosso 2) Mosso Dua	2
4.	Malunda	1) Malunda	1
Keadaan Kelurahan di Wilayah Kab.Majene			14

Sumber : BPS Kabupaten Majene, tahun 2006

Secara keseluruhan, dari 14 kelurahan yang ada, 9 diantaranya di Kecamatan Banggae, 2 kelurahan di Kecamatan Pamboang, 2 kelurahan di Kecamatan Sendana, dan 1 kelurahan di Kecamatan Malunda. Hal ini juga berarti bahwa keberadaan kelurahan paling banyak terdapat di Kecamatan Banggae.



Gambar 2. Peta Penyebaran Kelurahan di Kabupaten Majene, 2007

Keempat belas kelurahan yang ada tersebut, masing-masing mempunyai luas wilayah dan pemerintahan sesuai dengan letak dan ketentuan histories yang telah ditetapkan pemerintah kecamatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Majene.

Selanjutnya diuraikan keadaan luas wilayah dan pemerintahan masing-masing kelurahan yang dimaksud, sebagaimana tertera pada Tabel 5.

Tabel 5 Keadaan Luas Wilayah Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Luas Wilayah	
		KM <sup>2</sup>	Ha
1	Totoli	11,67	1.167
2	Banggae	1,12	112
3	Labuang	28,80	2.880
4	Pangali-ali	15,85	1.585
5	Baurung	35,60	3.566
6	Tande	15,40	1.540
7	Baru	9,73	973
8	Baruga	5,78	578
9	Baruga Dhua	9,19	919
10	Mosso	15,02	1.502
11	Mosso Dua	21,45	2.145
12	Lalampanua	7,16	716
13	Sirindu	6,86	686
14	Malunda	33,74	3.374

Sumber : BPS Kabupaten Majene, tahun 2006

## 2. Keadaan Demografi Penduduk

Seiring pesatnya perkembangan wilayah, mendorong pertumbuhan penduduk di masing-masing kelurahan. Pertumbuhan penduduk tersebut

seringkali melebihi perkembangan penduduk desa disekitarnya yang masih banyak tergolong desa tertinggal (IDT).

Berikut disajikan perkembangan penduduk pada empat belas kelurahan yang ada di Kabupaten Majene, sebagaimana tertera di bawah ini.

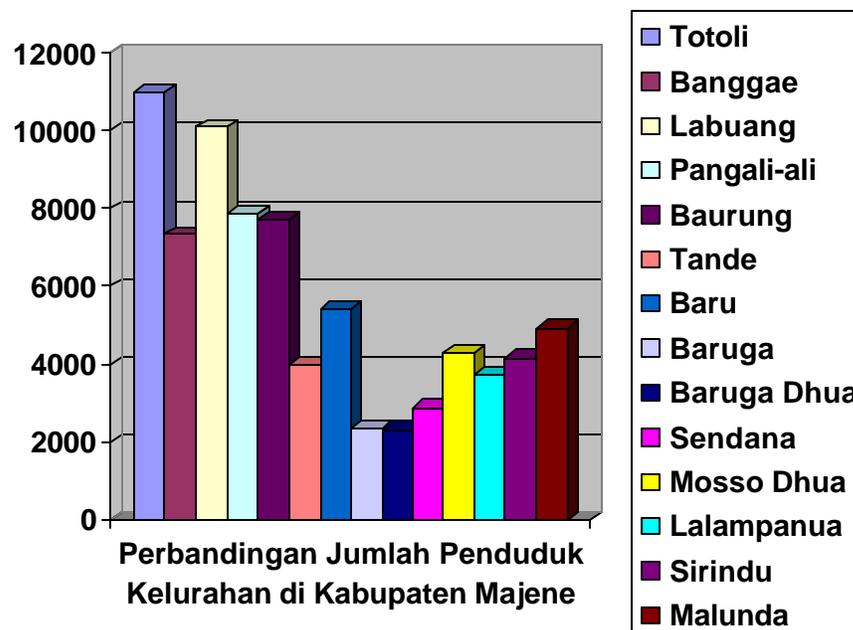
Tabel 6 Keadaan Penduduk Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	
		Jiwa	KK
1	Totoli	10.970	2.214
2	Banggae	7.316	1.531
3	Labuang	10.087	2.260
4	Pangali-ali	7.846	1.716
5	Baurung	7.709	1.727
6	Tande	3.996	775
7	Baru	5.428	1.367
8	Baruga	2.334	568
9	Baruga Dhua	2.316	544
10	Mosso	2.896	621
11	Mosso Dua	4.306	680
12	Lalampnua	3.745	788
13	Sirindu	4.173	927
14	Malunda	4.936	1.163
Total Penduduk Kelurahan		78.058	14.621

Sumber : BPS Kabupaten Majene, tahun 2006

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 14 kelurahan yang ada di Kabupaten Majene, Kelurahan Totoli dan Kelurahan Labuang yang masing-masing berada di Kecamatan Banggae mempunyai jumlah

penduduk terbesar. Sedangkan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kelurahan Baruga dan Baruga Dhua yang juga keduanya berada di wilayah Kecamatan Banggae. Berikut disajikan perbandingan jumlah penduduk pada 14 kelurahan tersebut, sebagaimana tertera pada histogram di bawah.



Keseluruhan jumlah penduduk tersebut merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masing-masing kelurahan, hal mana membutuhkan peningkatan kualitas SDM agar mampu mengelola potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerahnya masing-masing. Olehnya itu, Pemerintah Kelurahan (Lurah) sebagai pemimpin masyarakat tertinggi di kelurahan memainkan peranan penting dan strategis untuk memobilisasi SDM penduduk tersebut.

### **3. Karakteristik Sosial Ekonomi dan Budaya**

Dinamika perkembangan penduduk di masing-masing kelurahan memiliki karakteristik sosial dan budaya. Sejumlah penduduk yang ada memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda termasuk karakteristik pola mata pencaharian. Keadaan letak geografis Kabupaten Majene yang berbatasan dengan Selat Makassar dan Teluk Mandar yang sekaligus memosisikan keempat belas kelurahan yang ada berada disepanjang pantai dan laut.

Posisi geografis yang demikian mendorong sebagian besar penduduk bermukim disepanjang pantai dan menekuni pekerjaan mereka sebagai nelayan. Kehidupan para penduduk dengan pola mata pencaharian sebagai nelayan, melakukan aktivitas sehari-hari mencari nafkah dengan mencari dan menangkap ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Selain itu juga terdapat sejumlah penduduk yang bekerja sebagai petani seperti petani sawah, petani kebun, petani ikan. Karakteristik lainnya dari sejumlah penduduk yang ada adalah pedagang atau wiraswasta, dan sebagian lagi bekerja sebagai pegawai pemerintah, karyawan swasta, dan buruh harian (buruh perkebunan, buruh tambang).

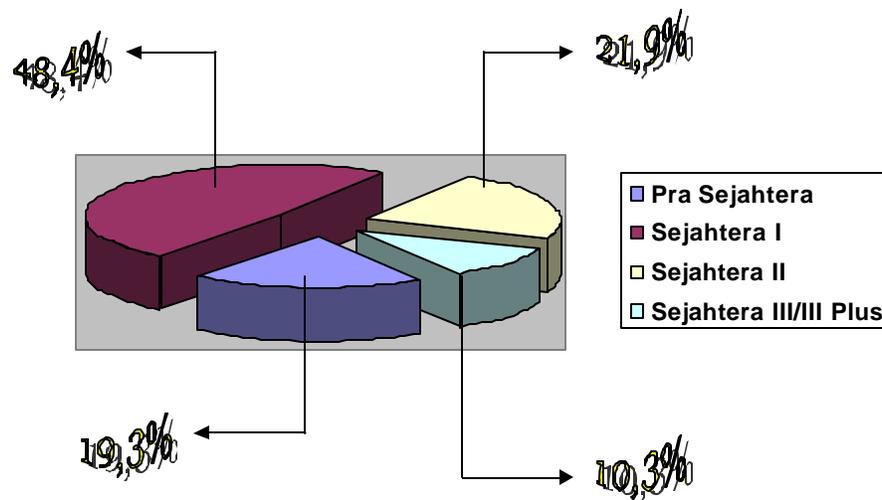
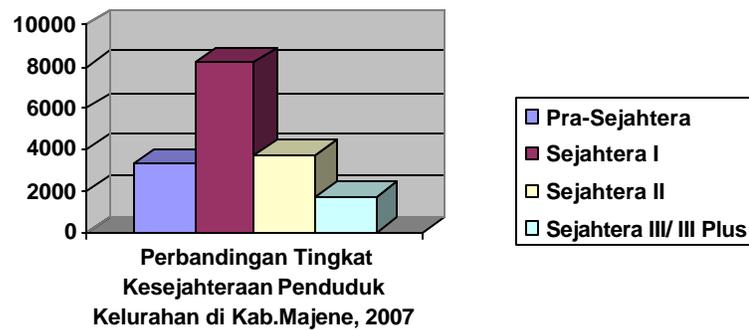
Keadaan pola mata pencaharian penduduk yang demikian memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup mereka. Berikut disajikan perkembangan tingkat

kesejahteraan penduduk pada empat belas kelurahan yang ada di Kabupaten Majene, sebagaimana tertera di bawah ini.

Tabel 7. Keadaan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Tingkat Kesejahteraan Penduduk				Jumlah
		Pra- Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III/III +	
1	Totoli	303	1.822	559	110	2.794
2	Baru	410	658	225	80	1.373
3	Pangali-ali	391	578	525	294	1.788
4	Banggae	364	454	582	305	1.705
5	Labuang	205	1.240	590	252	2.377
6	Baurung	182	1.168	229	172	1.751
7	Tande	176	254	130	174	734
8	Baruga	50	188	61	32	421
9	Baruga Dhua	163	347	47	19	567
10	Mosso	471	565	104	41	1.115
11	Mosso Dhua	149	233	62	28	472
12	Lalampanua	170	281	124	79	720
13	Sirindu	224	314	269	87	894
14	Malunda	239	323	277	94	933
Keadaan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kelurahan		<b>3.287</b> <b>(19,3%)</b>	<b>8.225</b> <b>(48,4%)</b>	<b>3.734</b> <b>(21,9%)</b>	<b>1.748</b> <b>(10,3%)</b>	<b>16.994</b> <b>(100%)</b>

Sumber : Dinas Kesos & KB Kab.Majene, Tahun 2006



Data di atas menunjukkan bahwa karakteristik tingkat kesejahteraan penduduk yang dominan pada 14 kelurahan di Kabupaten Majene adalah Sejahtera I yakni 8.225 (atau 48,4%). Sedangkan untuk Sejahtera III/ III Plus hanya sekitar 1.748 (10,3%).

Secara keseluruhan bahwa **67,7 %** penduduk yang bermukim pada empat belas kelurahan tersebut tergolong penduduk miskin (Pra Sejahtera dan Sejahtera I), dan sekitar 32,2% tergolong penduduk non miskin (Sejahtera II dan III/ III Plus).

Karakteristik sosial penduduk dengan pola mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan hidup tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya di lingkungan sekitarnya. Corak budaya lokal yang kental dengan adat-istiadat etnis Mandar mendominasi struktur pelapisan masyarakat dalam membentuk hubungan *social- culture*. Sebagian besar penduduk di daerah tersebut masih mengutamakan dan mengedepankan nilai-nilai tradisi Mandar seperti *Sipakatu*, *Siri'na Pacce* dan lainnya dalam menjalin hubungan dan interaksi sosial. Nilai-nilai tersebut juga sekaligus mewarnai pola kehidupan masyarakat setempat dalam sehari-harinya dengan Bahasa Mandar sebagai bahasa utama.

#### **4. Keadaan Pembangunan Sektor Lapangan Usaha**

Klasifikasi kondisi geografis wilayah yang umumnya berada di sepanjang pantai dan sebagian wilayah kelurahan yang mempunyai potensi sumber daya lahan (daratan), turut mempengaruhi perkembangan sektor lapangan usaha pada 14 kelurahan di Kabupaten Majene tersebut.

##### ***a. Sektor pertanian dan perkebunan***

Potensi lahan yang ada telah mendorong kegiatan usaha pertanian dan perkebunan penduduk setempat. Kegiatan usaha penduduk di bidang pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia telah mampu menghasilkan produksi tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan sebagai sumber penghasilan dan pendapatan bagi penduduk tersebut.

Keadaan pemanfaatan lahan dan tingka perkembangan produksi dari kegiatan usaha pertanian dan perkebunan diuraikan di bawah ini.

Tabel 8. Keadaan kegiatan usaha pertanian dan perkebunan penduduk pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

Tanaman Hortikultura				Tanaman Perkebunan			
No	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	No	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	-	-	1	Kelapa	1.041	2.121
2	Jagung	37	118	2	Kopi	0,5	2
3	Ubi kayu	139	1.795	3	J. mete	21	40
4	Ubi jalar	4	28	4	Kapok	76	6
5	K. tanah	13	11	5	Kemiri	1	7
6	K.hijau	22	18	6	Aren	60	1
	Jumlah	215	1.970	7	Kakao	204	377
					Jumlah	1.403,5	2.554

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Majene, 2006

Secara keseluruhan tercatat 1.970 ton produksi tanaman hortikultura dan 2.554 ton produksi tanaman perkebunan pada 14 kelurahan di Kabupaten Majene. Untuk tanaman hortikultura, jenis komoditi ubi kayu paling besar produksinya yaitu 1.795 ton/ tahun, sedangkan untuk tanaman perkebunan tercatat komoditi kelapa paling besar produksinya yaitu 2.121 ton.

Potensi produksi pertanian dan perkebunan yang demikian sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kelurahan untuk mengupayakan pengembangan dan pemasaran produksinya agar para petani dapat dengan mudah memasarkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Dan oleh karena itu pula diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan PAD Pemda Kab.Majene khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan.

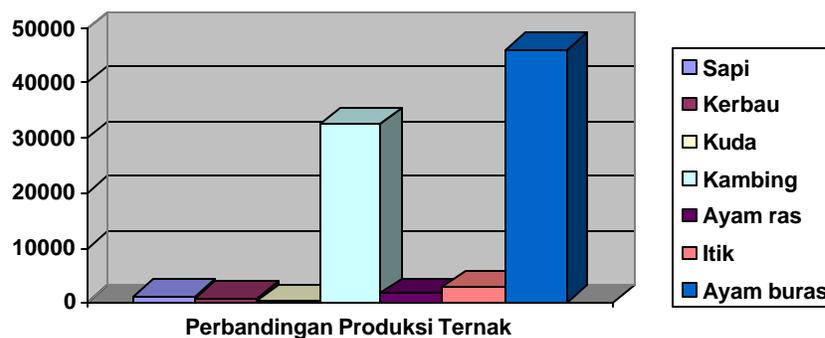
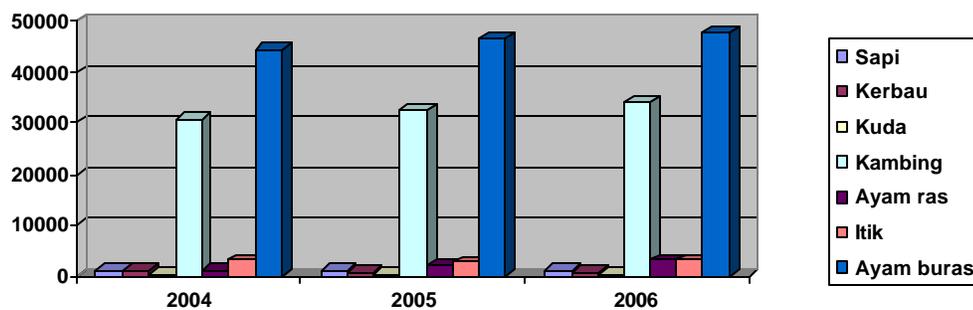
### b. Sektor peternakan

Potensi lahan yang ada telah mendorong kegiatan usaha peternakan penduduk setempat. Kegiatan usaha penduduk di bidang peternakan telah mampu menghasilkan produksi populasi hewan ternak, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Perkembangan produksi populasi hewan ternak pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No	Jenis Hewan Ternak	Perkembangan Jumlah Produksi Ternak (Ekor)			Rata-rata/ tahun
		2004	2005	2006	
1	Sapi	974	1.016	1.058	1.016
2	Kerbau	1.077	702	645	808
3	Kuda	245	250	227	241
4	Kambing	30.903	32.448	34.070	32.474
5	Ayam ras	-	1.942	2.950	1.631
6	Itik	2.977	2.668	2.977	2.874
7	Ayam buras	44.414	46.634	47.706	46.251

Sumber : Dinas Peternakan Kab.Majene



Secara keseluruhan dari 7 jenis ternak yang dikembangkan penduduk pada 14 kelurahan yang ada, umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali produksi ternak kerbau dan kuda yang nampak mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Dari 7 jenis hewan ternak tersebut, tercatat ayam buras menempati produksi populasi tertinggi yaitu 46.251 ekor/ tahun, kemudian disusul ternak kambing dengan tingkat produksi populasi mencapai 32.474 ekor.

Potensi produksi hewan ternak yang demikian itu sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kelurahan untuk mengupayakan pengembangan dan pemasaran produksinya agar para peternak dapat dengan mudah memasarkan hasil-hasil ternaknya tersebut. Dan oleh karena itu pula diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan PAD Pemda Kab.Majene khususnya dari sektor peternakan.

### ***c. Sektor perikanan***

Potensi kelautan yang ada telah mendorong kegiatan usaha perikanan bagi penduduk setempat. Hal itu juga mendorong sejumlah penduduk untuk menekuni pekerjaan sebagai nelayan dan petani ikan.

Secara keseluruhan data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah penduduk yang menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Demikian halnya jumlah fasilitas penangkapan dan pemeliharaan

ikan nampak semakin berkurang selama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 10 Perkembangan jumlah nelayan dan petani ikan, serta fasilitas penangkapan ikan pada Kelurahan di Kab. Majene, Tahun 2007

Perkembangan Jumlah Fasilitas Penangkapan & Pemeliharaan Ikan				Perkembangan Jumlah Nelayan/ Petani Ikan			
Jenis Fasilitas	2004	2005	2006	Nelayan/ Petani Ikan	2004	2005	2006
1. Kapal motor	608	623	628	Nelayan penuh	3.425	3.563	3.382
2. Perahu	99	99	90	Nelayan sambilan	30	25	45
3. Jukung	1.226	1.276	699	Petani ikan	60	85	60
4. Kolam ikan	-						
5. Tambak	278	280	280				
6. Perairan	148	148	148				
7. Alat tangkap ikan	4.214	4.470	3.208				
Jumlah	6.573	6.896	4.773	Jumlah	3.515	3.673	3.487

Sumber : Dinas Perikanan Kab.Majene, 2006

Selanjutnya kegiatan usaha penduduk di bidang perikanan telah mampu menghasilkan produksi perikanan laut dan darat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11 Perkembangan produksi perikanan pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

Produksi Ikan Laut (Ton)				Produksi Ikan Darat (Ton)			
Jenis ikan	2004	2005	2006	Jenis ikan	2004	2005	2006
1. Tuna	887	898	613	1. Bandeng	190	92	145
2. Cakalang	874	850	534	2. Udang	28	21	36
3. Tongkol	1.066	1.099	794	3. Lain-lain	88	113	8
4. Layang	1.278	1.290	710				
5. Terbang	406	385	366				
6. Bambang	149	36	288				
7. Campuran	1.733	2.032	825				
Jumlah	6.393	6.581	4.129	Jumlah	306	225	189

Sumber : Dinas Perikanan Kab.Majene, 2006

Secara keseluruhan data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah produksi perikanan laut, sedangkan produksi perikanan darat justru semakin menurun dari tahun ke tahun, terutama dalam tiga tahun terakhir (tahun 2004-2006).

Kenyataan di atas sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kelurahan untuk mengupayakan pengembangan dan peningkatan produksi perikananannya. Di samping itu juga perlu membuka akses pemasaran produksinya agar para nelayan dan petani ikan dapat dengan mudah memasarkan hasil-hasil tangkapannya tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan PAD Pemda Kab.Majene khususnya dari sektor perikanan.

#### ***d. Sektor perdagangan dan industri***

Sektor lapangan usaha yang juga mulai nampak terus berkembang di sejumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Majene tersebut, adalah bidang perdagangan dan industri. Semakin membaiknya iklim perekonomian dan terbukanya akses perizinan usaha mendorong minat masyarakat untuk membuka usaha perdagangan dan industri.

Seiring perkembangan aktivitas penduduk dalam bidang jasa perdagangan dan industri pada 14 kelurahan di kabupaten Majene, telah mendorong berkembangnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri kecil & rumah tangga (IKRT), sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Keadaan Perdagangan dan Industri Kelurahan di Kab. Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Perkembangan Perusahaan Industri			
		Industri Rumah Tangga		Industri Kecil	
		Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja
1	Totoli	*	*	*	*
2	Baru	*	*	*	*
3	Pangali-ali	*	*	*	*
4	Banggae	*	*	*	*
5	Labuang	*	*	*	*
6	Baurung	*	*	*	*
7	Tande	*	*	*	*
8	Baruga	*	*	*	*
9	Baruga Dhua	*	*	*	*
10	Mosso	85	55	6	1
11	Mosso Dhua	68	37	20	4
12	Lalampanua	-	-	1	3
13	Sirindu	-	-	-	-
14	Malunda	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perindag, Disnaker Kab.Majene, Tahun 2006

Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang terserap pada masing-masing perusahaan jasa perdagangan dan industri yang ada (meskipun data tidak tercatat secara lengkap). Hal ini juga berarti bahwa sudah seharusnya Pemda khususnya pemerintah kelurahan memberikan perhatian yang serius untuk mendorong perkembangan jasa perdagangan dan industri pada wilayah kelurahannya masing-masing.

Prospek berkembangnya industri nampak masih terbatas pada industri kecil dan rumah tangga (IKRT), dan olehnya itu perlu dipikirkan kerjasama promosi investasi kepada pihak investor untuk menanamkan modalnya di sektor itu.

**e. Sektor pariwisata**

Potensi alam dengan panorama yang indah serta letak geografis wilayah Kabupaten Majene yang berada pada posisi melintang dan menghubungkan jalur transportasi trans Sulawesi, telah mendorong berkembangnya usaha jasa pariwisata khususnya pada kelurahan yang ada. Posisi wilayah kelurahan yang umumnya berada di sepanjang pesisir pantai menjadi semakin strategis bagi berkembangnya pembangunan fasilitas akomodasi untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung obyek wisata maupun mereka yang sedang transit. Berikut disajikan keadaan fasilitas industri jasa pariwisata sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 Perkembangan industri jasa pariwisata pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

Fasilitas Pariwisata		
Jenis Fasilitas	Jumlah	
	Unit	Tenaga Kerja
Penginapan	7	21
Wisma	3	8
Hotel	7	33
THR Rekreasi/ Obyek wisata	5	-
Jumlah	22	62

Sumber : Dinas Infokom & Pariwisata Kab.Majene, 2006

Secara keseluruhan terdapat 22 unit fasilitas pariwisata, mencakup penginapan, wisma, hotel serta obyek wisata/ THR rekreasi. Sejumlah fasilitas yang disebutkan tersebar di beberapa kelurahan yang ada. Hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kelurahan adalah peningkatan

pengelolaan dan pengembangannya agar mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta diharapkan dapat menjadi salah satu sector andalan di masa akan datang.

## **5. Keadaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**

Guna menunjang aktivitas penduduk sehari-harinya, maka dibutuhkan sejumlah fasilitas baik fasilitas umum (Fasum) maupun fasilitas sosial (Fasos). Keberadaan sejumlah fasum dan fasos pada empat belas kelurahan di Kabupaten Majene cukup memberikan manfaat yang besar bagi penduduk dalam melancarkan berbagai kegiatan mereka. Sejumlah prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, keamanan lingkungan, serta prasarana dan sarana perekonomian dan perdagangan industri telah berkembang pada beberapa kelurahan tersebut.

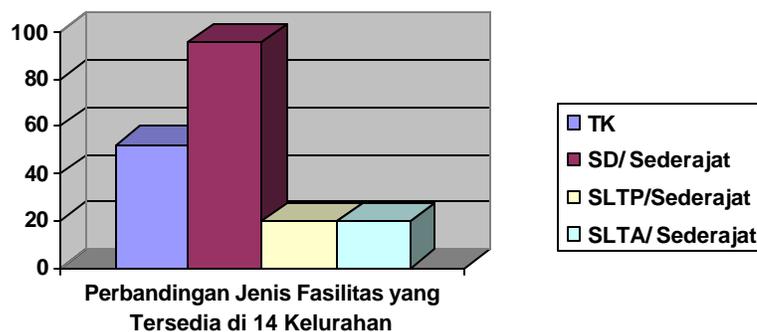
### ***a. Fasilitas Pendidikan***

Sejumlah prasarana pendidikan berupa sekolah (TK,SD, SLTP, SLTA dan bahkan Akademi/ Perguruan Tinggi) cukup berkembang pembangunannya dan banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Disamping prasarana tersebut, juga terdapat sejumlah sarana pendidikan seperti perlengkapan alat belajar mengajar dan ruangan kelas yang cukup mampu menampung sejumlah peserta didik. Aktivitas belajar mengajar juga didukung sejumlah tenaga edukatif dengan latar belakang sosial dan tingkat pendidikan yang beragam.

Tabel 14 Keadaan fasilitas pendidikan pada 14 Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Keadaan Fasilitas Pendidikan				Jumlah
		TK	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/ MA/ SMK	
1	Totoli	4	16	2	2	24
2	Baru	2	6	-	-	8
3	Pangali-ali	3	7	1	-	11
4	Banggae	5	10	-	-	15
5	Labuang	7	8	4	4	23
6	Baurung	5	7	1	3	16
7	Tande	2	6	1	1	10
8	Baruga	2	3	2	2	9
9	Baruga Dhua	2	4	-	-	6
10	Mosso	2	6	1	-	9
11	Mosso Dhua	4	4	1	1	10
12	Lalampunua	6	7	3	4	20
13	Sirindu	4	8	2	-	14
14	Malunda	4	4	2	2	12
Keadaan Fasilitas Pendidikan di Kelurahan		<b>52 (27,8%)</b>	<b>96 (51,3%)</b>	<b>19 (10,2%)</b>	<b>19 (10,2%)</b>	<b>187 (100%)</b>

Sumber : Diknas Kab.Majene, 2006



Data Tabel 14 menunjukkan bahwa Kelurahan Totoli, Labuang dan Lalampunua memiliki jumlah fasilitas pendidikan terbanyak, sedangkan

Kelurahan Baruga Dhua dan Sendana nampak memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang terkecil atau sangat terbatas.

Secara keseluruhan terdapat 187 unit fasilitas pendidikan pada 7 kelurahan di Kabupaten Majene. Dari jumlah tersebut, fasilitas sekolah dasar (SD) / sederajat yang paling banyak jumlahnya yakni 96 unit atau 51,3% dari total fasilitas pendidikan yang tersedia. Selain SD, fasilitas pendidikan bagi anak usia dini yaitu taman kanak-kanak (TK) juga nampak berkembang jumlahnya yaitu 52 unit atau 27,8%. Sedangkan fasilitas pendidikan SLTP dan SLTA/ sederajat nampak mempunyai jumlah yang sama yaitu 19 unit. Untuk fasilitas pendidikan tinggi nampak belum tersedia di 7 kelurahan tersebut sehingga para lulusan SLTA / sederajat yang hendak melanjutkan pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi (PT), terpaksa harus ke daerah lain yang terdekat yang sudah tersedia akademi atau PT tersebut.

#### ***b. Fasilitas Kesehatan***

Sejumlah prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah Bersalin, Pos Yandu dn Pos Klinik KB berkembang pembangunannya dan banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Disamping prasarana tersebut, juga terdapat sejumlah sarana kesehatan seperti dokter, perawat/ bidan dan lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lokal. Keadaan fasilitas kesehatan tersebut selengkapya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 15 Keadaan Prasarana Pelayanan Kesehatan pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Keadaan Fasilitas Kesehatan				Jumlah
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Rumah Bersalin+ Pos Yandu + Klinik KB	
1	Totoli	-	-	1	7	8
2	Baru	1	-	1	7	9
3	Pangali-ali	-	-	-	7	7
4	Banggae	-	2	-	4	6
5	Labuang	-	-	1	8	9
6	Baurung	-	-	1	7	8
7	Tande	-	-	2	8	10
8	Baruga	-	-	1	4	5
9	Baruga Dhua	-	-	1	7	8
10	Mosso	-	1	-	12	13
11	Mosso Dhua	-	-	1	11	12
12	Lalampenua	-	1	-	9	10
13	Sirindu	-	-	1	17	18
14	Malunda	-	1	-	6	7
Keadaan Fasilitas Kesehatan di Kelurahan		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>114</b>	<b>130</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Majene, 2006

Data pada Tabel 15 menunjukkan bahwa pada 14 kelurahan tersebut, keberadaan atau ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan masih sangat terbatas. Untuk rumah sakit (RSU) hanya 1 unit yang terdapat di Kelurahan Baru (Ibukota Kabupaten Majene). Demikian halnya Puskesmas hanya ada 4 unit yaitu 2 unit di Kelurahan Banggae dan masing-masing 1 unit di Kelurahan Lalampenua dan Malunda. Fasilitas kesehatan yang banyak tersedia adalah Pos Yandu dan rumah bersalin serta klinik KB yaitu sebanyak 113 unit.

Selanjutnya diuraikan keadaan sarana pelayanan kesehatan yang tersebar pada 14 kelurahan dalam wilayah Kabupaten Majene, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 16 Keadaan Sarana Pelayanan Kesehatan pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No	Kelurahan	Keadaan Tenaga Medis				Jumlah
		Dokter	Perawat	Bidan	Dukun Bayi	
1	Totoli	1	-	1	14	16
2	Baru	-	-	2	5	7
3	Pangali-ali	-	-	-	5	5
4	Banggae	4	5	4	2	14
5	Labuang	2	-	-	-	2
6	Baurung	-	1	2	3	6
7	Tande	-	1	-	-	1
8	Baruga	-	-	-	-	-
9	Baruga Dhua	-	-	-	-	-
10	Mosso	4	5	1	6	16
11	Mosso Dhua	-	2	1	5	8
12	Lalampanua	3	9	1	5	18
13	Sirindu	-	1	1	1	3
14	Malunda	2	8	1	13	24
Keadaan Tenaga Medis di Kelurahan		<b>16</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>59</b>	<b>121</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Majene, 2006

Data pada Tabel 16 menunjukkan bahwa pada 14 kelurahan tersebut, jumlah tenaga medis juga relatif masih terbatas. Untuk dokter hanya ada 12 orang, yaitu 4 orang di Kelurahan Banggae, 3 orang di Lalampanua, 1 orang di Totoli dan masing-masing 2 orang dokter di Kelurahan Labuang dan Malunda. Tenaga paramedis lainnya yaitu perawat dan bidan juga terbatas jumlahnya yaitu hanya 42 orang, dan bahkan ada kelurahan yang belum ada sama sekali tenaga paramedis yaitu Kelurahan Pangali-ali, Baruga dan Baruga Dhua. Selain itu, juga terdapat 57 dukun bayi yang setiap saat membantu persalinan bagi warga masyarakat yang membutuhkan.

### **c. Fasilitas Peribadatan**

Fasilitas peribadatan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat di Kabupaten Majene khususnya pada 14 kelurahan yang ada. Fasilitas peribadatan tersebut berfungsi membantu dan menunjang aktivitas penduduk dalam melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sejumlah prasarana sebagai tempat ibadah seperti masjid, musholla dan lainnya juga berkembang pembangunannya dan banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Keadaan fasilitas peribadatan tersebut selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 17 Keadaan Prasarana Tempat Ibadah pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Keadaan Fasilitas Ibadah				Jumlah
		Masjid	Musholla	Gereja	Kuil	
1	Totoli	7	8	-	-	15
2	Baru	7	5	-	-	12
3	Pangali-ali	7	8	-	-	15
4	Banggae	5	6	-	-	11
5	Labuang	9	11	1	-	21
6	Baurung	7	9	-	-	16
7	Tande	8	6	-	-	14
8	Baruga	3	4	-	-	7
9	Baruga Dhua	5	7	-	-	12
10	Mosso	7	2	-	-	9
11	Mosso Dhua	8	-	-	-	8
12	Lalampanua	6	4	-	-	10
13	Sirindu	7	3	-	-	10
14	Malunda	6	3	-	-	9
Keadaan Fasilitas Peribadatan di Kelurahan		<b>92</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>169</b>

Sumber : Data KUA Kab.Majene, 2006

Secara keseluruhan, terdapat 168 masjid dan musholla pada 14 kelurahan tersebut, dan hanya ada 1 gereja. Ini juga berarti bahwa mayoritas penduduk beragama Islam.

#### **d. Fasilitas Perekonomian**

Fasilitas perekonomian merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian masyarakat dan daerah di Kabupaten Majene khususnya pada 14 kelurahan yang ada. Fasilitas perekonomian tersebut berfungsi menjadi tempat transaksi jual beli para penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun sebagai wadah untuk pertukaran barang dan jasa serta pengelolaan modal usaha.

Sejumlah prasarana dan sarana ekonomi seperti pasar, koperasi, bank dan lainnya juga berkembang pembangunannya dan banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Keadaan fasilitas perekonomian tersebut selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 18 Keadaan fasilitas perekonomian pada Kelurahan di Kabupaten Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Keadaan Fasilitas Perekonomian				TPI
		Pasar	Koperasi		Bank	
			KUD	Non KUD		
1	Totoli	-	2	-		-
2	Baru	1	1	-		-
3	Pangali-ali	-	5	2		-
4	Banggae	2	12	2		1
5	Labuang	1	27	4		-
6	Baurung	-	10	-		-
7	Tande	-	5	-		-
8	Baruga	-	2	-		-
9	Baruga Dhua	-	-	-		-
10	Mosso	1	-	1		-
11	Mosso Dhua	-	-	1		-
12	Lalampunua	1	-	-		-
13	Sirindu	2	-	-		-
14	Malunda	1	-	-		-
Keadaan Fasilitas Perekonomian di Kelurahan		<b>9</b>	<b>64</b>	<b>10</b>		<b>1</b>
			<b>74</b>			

Sumber : Dinas Perindag Kab.Majene, 2006

Secara keseluruhan terdapat 9 pasar, 164 koperasi, dan 1 TPI pada 14 kelurahan tersebut. Keberadaan sejumlah fasilitas perekonomian tersebut telah mendorong perkembangan aktivitas masyarakat dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

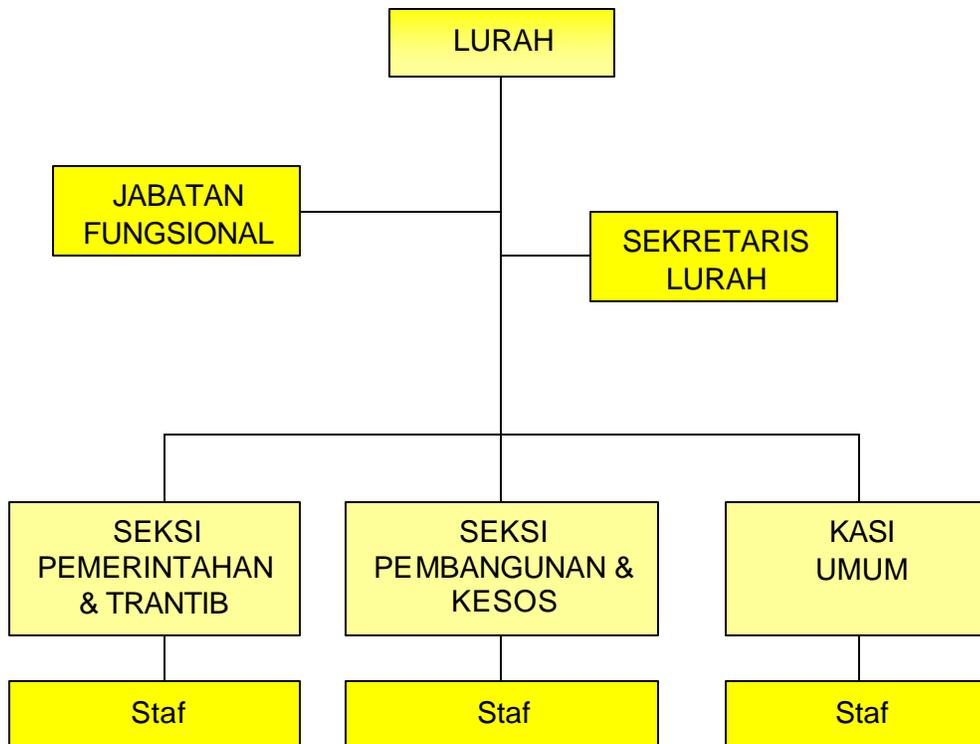
### **C. Deskripsi Umum Pemerintahan Kelurahan**

#### **1. Keadaan Pemerintahan dan Struktur Kelembagaan**

Struktur dan susunan kelembagaan pemerintahan kelurahan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PP No.8 tahun 2004 tentang perangkat daerah, PP No.73 Tahun 2005 tentang kelurahan, dan PERDA Kab.Majene No.8 tahun 2001 tentang susunan lembaga teknis daerah. Semua peraturan perundang-undangan tersebut menjadi acuan atau pedoman dalam membentuk dan menetapkan susunan organisasi pemerintahan kelurahan khususnya di Kabupaten Majene.

Gambar 3 di bawah memperlihatkan susunan organisasi / struktur kelembagaan pemerintahan kelurahan di Kab. Majene secara umum. Performansi formasi tersebut menempatkan Lurah di posisi teratas sebagai pemimpin dan di bawahnya terdapat sekretaris lurah serta beberapa jabatan fungsional. Pada jajaran di bawahnya, ada tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, seksi

pembangunan dan kesejahteraan sosial, dan seksi umum. Ketiga seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh kepala seksi dan didukung beberapa staf.



Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan

Selanjutnya bahwa dalam lingkup kelembagaan pemerintahan kelurahan juga terdapat beberapa lembaga/ organisasi sosial (Orsos) yang terbentuk untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintah kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD atau LKD), Organisasi Kepemudaan serta P2A. keberadaan lembaga tersebut selengkapnya disajikan di bawah.

Tabel 19 Keadaan Lembaga dan Orsos di Kelurahan Kab. Majene, 2007

No.	Kelurahan	Keadaan Lembaga/ Organisasi			
		LKMD/LKD	Pemuda, BPD	P2A	Jumlah
1	Totoli	1	13	1	15
2	Baru	1	2	4	6
3	Pangali-ali	1	16	2	18
4	Banggae	1	9	2	11
5	Labuang	1	3	2	5
6	Baurung	1	3	2	5
7	Tande	1	3	2	5
8	Baruga	1	2	2	4
9	Baruga Dhua	1	2	3	5
10	Mosso	1	8	1	10
11	Mosso Dhua	1	10	-	11
12	Lalampunua	1	-	-	1
13	Sirindu	1	-	-	1
14	Malunda	-	1	1	2
? Lembaga di Kelurahan		<b>14</b>	<b>72</b>	<b>22</b>	<b>108</b>

Sumber : Kantor Kelurahan di Kab.Majene, 2007

Tabel 20 Keadaan Lembaga Sosial Masyarakat yang dibina oleh 14 Pemerintah Kelurahan di Kab. Majene, 2007

No.	Kelurahan	Keadaan Lembaga Sosial Masyarakat & aktivitasnya			
		PSM	Lembaga Penyantun	Penyuluhan Massal	Penyuluh Keliling
1	Totoli	1	-		
2	Baru	1	-		
3	Pangali-ali	1	-		
4	Banggae	1	-		
5	Labuang	1	13	2	5
6	Baurung	1	-		
7	Tande	1	-		
8	Baruga	2	-		
9	Baruga Dhua	10	-		
10	Mosso				
11	Mosso Dhua		-		
12	Lalampunua	12	-	12	1
13	Sirindu	12	-	12	1
14	Malunda	5	-	1	-
? Lembaga di Kelurahan		<b>14</b>	<b>72</b>	<b>22</b>	<b>108</b>

Sumber : Kantor Kelurahan di Kab.Majene, 2007

Keberadaan sejumlah lembaga atau organisasi sosial yang tersebut pada Tabel 19 dan Tabel 20 di atas, dibentuk dan dibina oleh pemerintah

kelurahan untuk mendukung kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat setempat.

## **2. Uraian Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Bupati Majene, No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majene, maka adapun tugas dan fungsi Pemerintah Kelurahan diuraikan dalam beberapa pasal.

Pasal 9 mengatur :

- (1) Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas pokok yakni membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan
- (2) Lurah mempunyai fungsi :
  - a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya
  - b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan
  - c. Pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian

- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan masyarakat
- e. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata kerja serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

Selanjutnya diuraikan tugas dan fungsi dari masing-masing ketiga seksi yang ada dalam kelembagaan Pemerintahan Kelurahan.

#### Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

- 1. Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi kelurahan dan urusan ketentraman
- 2. Fungsi :
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan kelurahan
  - b. Pengadministrasian dan pelaporan kependudukan
  - c. Melakukan pembinaan dan pelaporan ketentraman wilayah
  - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah

#### Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

- 1. Tugas Pokok : Menyusun dan merencanakan pelaksanaan pembangunan fisik di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

2. Fungsi : a. Menyusun program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana
- b. Peningkatan upaya pembinaan perekonomian masyarakat
- c. Melaksanakan pembinaan pembangunan kelurahan dan kesejahteraan sosial

#### Seksi Umum

1. Tugas Pokok : Menyusun dan merencanakan pelaksanaan pelayanan umum, surat menyurat, urusan keuangan dan perlengkapan
2. Fungsi : a. Menyiapkan kebutuhan perlengkapan kantor
- b. Mengkoordinir surat menyurat baik masuk maupun keluar
- c. Memelihara barang inventaris kantor
- d. Menginventarisir barang-barang inventaris

### 3. Keadaan Sumber Daya Aparatur

Upaya menunjang dan melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kelembagaan pemerintahan kelurahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan/ atau pemerintah kelurahan merekrut sejumlah aparatur atau pegawai yang berfungsi menjalankan tugas-tugas pemerintahan kelurahan.

Tabel 21 Keadaan Sumber Daya Aparatur (SDA) Pemerintah Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007

NO.	KELURAHAN	JUMLAH PEGAWAI	
		Pegawai	Total
1	Totoll	5	60
2	Banggae	9	
3	Labuang	8	
4	Pangali-ali	8	
5	Baurung	5	
6	Tande	6	
7	Baru	6	
8	Baruga	7	
9	Baruga Dhua	6	
10	Mosso	6	
11	Mosso Dua	5	11
12	Lalampau	5	11
13	Sirindu	6	
14	Malunda	7	7
Keadaan SDA Pemerintah Kelurahan di Kab.Majene		89	89

Sumber : Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene, tahun 2006

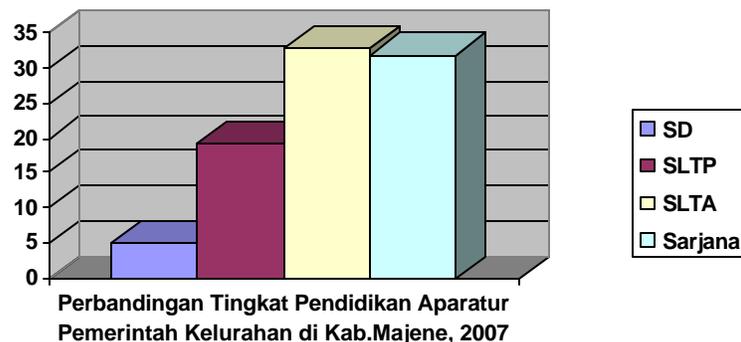
Data Tabel 21 menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 5-9 pegawai di setiap Kantor Kelurahan yang ada. Jumlah ini relatif masih terbatas bilamana luas dan besarnya jumlah penduduk kelurahan yang harus dilayani. Demikian halnya sejumlah tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan pokok dari pemerintah kelurahan yang harus dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin.

Selanjutnya diuraikan keadaan tingkat pendidikan aparatur pemerintah kelurahan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 22 Keadaan Pendidikan Aparatur Pemerintah Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007

No.	Kelurahan	Tingkat Pendidikan Aparatur				Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Sarjana	
1	Totoli	-	1	1	3	5
2	Banggae	-	1	4	4	9
3	Labuang	-	-	3	5	8
4	Pangali-ali	-	1	2	5	8
5	Baurung	-	-	2	3	5
6	Simbang	-	3	2	1	6
7	Betteng	1	3	2	1	6
8	Adolang	-	2	4	1	7
9	Mosso	-	1	3	2	6
10	Tallu Banua	1	2	2	1	6
11	Sepping	1	2	1	1	5
12	Mosso Dua	1	1	2	1	5
13	Ulumanda	1	1	3	1	6
14	Malunda	-	1	2	3	7
Keadaan Pendidikan Aparatur Pemerintah Kelurahan		5 (5,6%)	19 (21,3%)	33 (37,1%)	32 (36,0%)	89 (100 %)

Sumber : Pemerintahan Kelurahan di Kab.Majene, 2007



Secara keseluruhan, tingkat pendidikan aparatur pemerintah kelurahan tersebut sebagian besar level pendidikan dasar yakni 63%, dan sekitar 36% yang sudah menempuh pendidikan tinggi atau meraih gelar sarjana bahkan terdapat pejabat kelurahan yang sedang menempuh S2 dan berpredikat Magister. Level pendidikan dasar yang terbanyak adalah

SLTA yaitu sebanyak 37,1%. Data juga menunjukkan masih terdapat 5,6% pegawai kelurahan yang berpendidikan SD dan 21,3% SLTP.

Data tersebut di atas mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan aparatur kelurahan masih perlu terus dikembangkan agar mutu pengetahuan dan keterampilan mereka dapat lebih meningkat. Selain itu, meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan masyarakat mendorong pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kinerja aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### **5. Keadaan Prasarana/ Sarana Kantor Kelurahan**

Faktor prasarana dan sarana merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan kelurahan. Sejumlah prasarana dan sarana dapat diadakan sesuai tingkat kebutuhan pelaksanaan yang diharapkan.

Meningkatnya beban tugas-tugas aparatur pemerintah kelurahan mendorong pemerintah kelurahan untuk berusaha memenuhi sejumlah prasarana dan sarana kantor yang dibutuhkan baik berupa perlengkapan administrasi maupun peralatan operasional. Ketersediaan prasarana dan sarana itu diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan sejumlah tugas-tugas pelayanan administrasi dan tugas-tugas aparatur di lapangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene didukung sejumlah prasarana pelayanan

administrasi dan perlengkapan operasional, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 23 Keadaan Prasarana Kantor Pemerintahan Kelurahan di Kab.Majene, Tahun 2007

		Peralatan Administrasi						Perlengkapan Operasional	
		Mesin Ketik	Rak	Meja	Kursi	Lemari	Komputer	Kend. Roda Dua	Kend. Roda Empat
1	Totoli	3	1	5	5	2	-	2	-
2	Banggae	5	1	9	9	3	1	3	-
3	Labuang	4	1	8	8	2	1	3	-
4	Pangali-ali	3	1	8	8	1	-	2	-
5	Baurung	3	1	5	5	1	1	2	-
6	Simbang	2	1	6	6	1	-	1	-
7	Betteng	2	1	6	6	1	-	1	-
8	Adolang	2	1	7	7	1	-	1	-
9	Mosso	3	1	6	6	1	1	3	-
10	Tallu Banua	2	1	6	6	1	-	1	-
11	Seppong	2	1	5	5	1	-	1	-
12	Mosso Dua	2	1	5	5	1	-	2	-
13	Ulumanda	2	1	6	6	1	-	1	-
14	Malunda	4	1	7	7	2	1	3	-

Sumber : Bagian Inventaris Kantor Kelurahan, 2007

Data Tabel 23 menunjukkan bahwa pada keempat belas Kantor Kelurahan yang ada di Kabupaten Majene, tersedia peralatan administrasi dan perlengkapan operasional. Peralatan administrasi yang tersedia meliputi mesin ketik, rak arsip, meja kerja, kursi, lemari bahkan komputer. Khusus untuk komputer nampak sudah ada 5 kantor kelurahan yang sudah memilikinya, sementara 9 kantor kelurahan lainnya belum ada. Sedangkan untuk peralatan operasional juga sudah tersedia kendaraan roda dua meskipun jumlahnya masih bervariasi diantara kantor kelurahan yang ada.

#### **D. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene**

Secara umum ada tujuh fungsi utama dari pemerintahan kelurahan yaitu fungsi koordinasi, pembinaan, pelayanan administrasi kependudukan, teknis administrasi, pembangunan/ pemeliharaan fasum dan fasos, pembangunan bidang kesejahteraan sosial, dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Ketujuh fungsi tersebut perlu diimplementasikan secara komprehensif oleh pemerintah kelurahan. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sekaligus menjadi indikator keberhasilan 14 Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsinya di wilayah kelurahannya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene, yang selanjutnya dianalisis sebagai berikut.

##### **1. Fungsi Koordinasi**

Sebagaimana disebutkan bahwa pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene mempunyai fungsi yaitu fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh aparatur atau perangkat pemerintah kelurahan terutama menyangkut penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Fungsi koordinasi yang melibatkan aparatur / perangkat pemerintah kelurahan tersebut, dilakukan dalam dua garis hubungan koordinasi baik koordinasi internal maupun eksternal. Koordinasi internal adalah kegiatan koordinasi yang

dilakukan dalam lingkup internal organisasi pemerintahan kelurahan, sedangkan koordinasi eksternal adalah bentuk koordinasi yang dilakukan pimpinan dan para staf dengan aparatur dan/ atau instansi lain.

Secara struktural, Pemerintah Kelurahan dituntut untuk melaksanakan tugas koordinasi secara vertikal dan horizontal. Koordinasi vertical adalah bentuk koordinasi yang dilakukan perangkat pemerintah kelurahan dengan Pemerintah Kecamatan dan Sekretariat Daerah, sedangkan koordinasi horizontal dilakukan terhadap jajaran instansi lainnya. Selain itu, Pemerintah Kelurahan juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan koordinasi ke bawah (*top-down*) yaitu koordinasi dengan lembaga-lembaga dan masyarakat yang ada dalam kelurahan itu sendiri.

**a. Koordinasi Vertikal**

Eksistensi Pemerintahan Kelurahan yang berada dalam suatu wilayah kecamatan dan daerah kabupaten dibentuk untuk melaksanakan sebahagian tugas-tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Kedudukan Pemerintah Kelurahan yang demikian menuntut dan/ atau mengharuskannya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Sekretaris Daerah. Hal ini dimaksudkan agar segala kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan di tingkat kelurahan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Setda, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24 Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Setda (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sering	12	12,0
2.	Sering	48	48,0
3.	Terkadang/ jarang	26	26,0
4.	Tidak pernah	14	14,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 58% responden memberikan jawaban sering sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden bahwa mereka sering terlibat melakukan koordinasi dengan aparat dari kelurahan sehingga dinilai sering. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang terlibat/ dilibatkan berkoordinasi dengan aparat dari kelurahan sehingga dinilai jarang atau kurang aktif.

Hasil wawancara penulis dengan keempat belas kepala pemerintahan kelurahan (Lurah) mengungkapkan bahwa mereka cukup memahami kedudukannya sebagai bawahan dari Pemerintah Kecamatan

dan Pimpinan Daerah. Olehnya itu, dalam setiap melaksanakan suatu kegiatan yang menyangkut atau berkenaan dengan kebijakan pemerintahan kecamatan dan/ atau pemerintahan daerah, pihaknya terlebih dahulu meminta petunjuk langsung dari atasannya, demikian selanjutnya koordinasi itu dilakukan secara terus menerus dan rutin. Walaupun demikian, tidak semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan dan Setda. Koordinasi biasanya dilakukan bilamana memang sesuatu hal dianggap penting dan dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan empat kepala pemerintahan kecamatan di Kabupaten Majene yakni Camat Banggae, Camat Sendana, Camat Pamboang dan Camat Malunda mengungkapkan bahwa secara umum para Lurah dan stafnya aktif melakukan koordinasi dengan pihaknya bilamana ada sesuatu hal yang hendak diputuskan dan dilaksanakan. Pemerintah Kelurahan seringkali meminta petunjuk baik yang sifatnya teknis maupun non teknis kepada Pemerintah Kecamatan atas suatu kegiatan, termasuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Pemkab Majene mengungkapkan bahwa pihaknya sering dikunjungi oleh aparat kelurahan untuk mengkoordinasikan suatu tugas pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya. Demikian sebaliknya, pihak Setda juga sering

menghubungi langsung aparat pemerintah kelurahan untuk diberikan pengarahannya ataupun petunjuk teknis bila diperlukan.

Tanggapan sejumlah narasumber dan informan mengungkapkan bahwa hubungan koordinasi antara Pemerintah Kelurahan dengan Pemerintah Kecamatan dan Setda sudah merupakan kewajiban diantara mereka karena secara struktural mengartikan bentuk hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Namun pun demikian, masih sering ditemui terjadinya *miscommunication* diantara mereka. Hal ini cukup jelas terlihat biasanya pada adanya pertentangan kebijakan antara pihak Pemerintah Kecamatan dengan pihak Pemerintahan Kelurahan, atau sebaliknya. Suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kelurahan terkadang tidak dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan, demikian halnya bahwa Pemerintah Kecamatan terkadang mengabaikan aspek koordinasi dengan perangkat kelurahan sehingga kebijakan yang hendak dilaksanakan kurang mendapat dukungan dari masing-masing pihak, dan akibatnya terkadang terjadi konflik kepentingan bahkan intervensi.

#### ***b. Koordinasi Horizontal-Eksternal***

Eksistensi Pemerintahan Kelurahan selain mengemban tugas dan fungsi koordinasi vertikal, juga mempunyai tugas dan fungsi koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal itu dilakukan terhadap jajaran instansi atau lembaga teknis perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan kabupaten.

Koordinasi horizontal antara perangkat pemerintah kelurahan dengan instansi atau lembaga pemerintahan daerah lainnya perlu dilakukan guna melancarkan segala aktivitas di tingkat kelurahan. Berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan tidak dapat atau mustahil dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Kelurahan. Oleh karena itu, membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah aparat pemerintah kelurahan sering melakukan koordinasi dengan instansi terkait (pimpinan dan aparat), diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 25 Pendapat responden tentang keaktifan aparat pemerintah kelurahan melakukan koordinasi dengan pimpinan/ aparat instansi terkait (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sering	8	8,0
2.	Sering	36	36,0
3.	Terkadang/ jarang	44	44,0
4.	Tidak pernah	12	12,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 56% responden memberikan jawaban jarang sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden

bahwa mereka hanya sekali-kali terlibat melakukan koordinasi dengan aparat dari kelurahan bilamana ada hal-hal penting yang perlu dibicarakan atau dibahas bersama sehingga dinilai jarang. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sudah terbiasa terlibat/ dilibatkan berkoordinasi dengan aparat dari kelurahan dalam setiap kegiatan kerja sehingga dinilai sering.

Hasil wawancara penulis dengan keempat belas kepala pemerintahan kelurahan (Lurah) mengungkapkan bahwa pihaknya seringkali dituntut untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya maupun dengan pihak lain bilamana ada sesuatu dianggap penting. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat besarnya tanggung jawab Pemerintah Kelurahan atas segala aktivitas pembangunan kelurahan dan administrasi pelayanan masyarakat. Demikian halnya bilamana Pemerintah Kelurahan ingin mengajukan suatu usulan pembangunan maupun usulan teknis pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, maka pihaknya senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan sejumlah pimpinan instansi dalam lingkup Pemkab Majene mengungkapkan bahwa secara umum para Lurah dan stafnya sering melakukan koordinasi dengan pihaknya bilamana ada sesuatu hal yang hendak diputuskan dan dilaksanakan. Demikian sebaliknya bahwa instansi yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan bilamana diperlukan.

Tanggapan sejumlah narasumber dan informan mengungkapkan bahwa hubungan koordinasi antara Pemerintah Kelurahan dengan Instansi lainnya juga sudah merupakan kewajiban diantara mereka karena secara struktural mengariskan bentuk hubungan koordinasi dan kerjasama yang sifatnya parallel dan saling membutuhkan. Namun pun demikian, masih sering ditemui terjadinya *miscommunication* diantara perangkat kelurahan dengan lembaga atau instansi lainnya, seperti suatu proyek yang dilaksanakan oleh dinas tertentu yang kerap kali mengesampingkan pemerintah kelurahan. Fakta juga menunjukkan, terkadang pemerintah kelurahan dan perangkatnya dilibatkan bilamana terjadi suatu masalah.

Berdasarkan uraian kedua sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi koordinasi pada pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat aktif	Aktif	Kurang aktif	Tidak aktif	
1	Koordinasi vertikal	12	48	26	14	100
2	Koordinasi horizontal	8	36	44	12	100
100 Responden (%)		10 (10%)	42 (42%)	34 (34%)	14 (14%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene sebesar 52%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

## 2. Fungsi Pembinaan

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6) PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan menetapkan bahwa Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) mempunyai fungsi yaitu : pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan terutama fungsi pembinaan, dimana dalam penjabarannya menjelaskan bahwa fungsi pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan mencakup: 1) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, 2) pembinaan pelaksanaan pembangunan, 3) pembinaan kemasyarakatan, dan 4) pembinaan administrasi, organisasi dan tata kerja serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

Analisis terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan terutama pembinaan kemasyarakatan dan kelembagaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene, dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dan dipadukan hasil wawancara dengan narasumber atau informan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering melakukan pembinaan melalui kegiatan pengarahan, penyuluhan dan lainnya kepada masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 27 di bawah ini

Tabel 27 Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan melakukan pembinaan melalui pengarahan / penyuluhan kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam lingkup kelurahannya (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sering	20	20,0
2.	Sering	56	56,0
3.	Terkadang/ jarang	18	18,0
4.	Tidak pernah	6	9,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 76% responden memberikan jawaban sering sehingga dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan warga setempat dan tokoh masyarakat bahwa mereka sering diundang oleh pemerintah kelurahan untuk menghadiri kegiatan pidato ataupun pengarahan dari Lurah bilamana ada kegiatan pertemuan sehingga dinilai sering. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan belum pernah diundang untuk menghadiri atau mengikuti pengarahan pemerintah kelurahan (Lurah) mengenai suatu kegiatan sehingga dinilai jarang.

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas

dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, sehingga senantiasa berusaha melakukan berbagai kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan perangkat kelembagaan melalui kegiatan pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal mengenai berbagai hal yang menyangkut kebutuhan pelayanan mereka. Meskipun demikian, akibat terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana maupun dana sehingga kegiatan pembinaan juga masih terbatas melibatkan warga masyarakat banyak sehingga terkadang hanya melibatkan para tokoh masyarakat dan beberapa orang warga, dan di samping itu intensitas pelaksanaannya pun disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kepentingannya.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat dan perangkat kelembagaannya namun hal itu jarang dilakukan melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu atau ketika ada proyek bantuan dan lainnya. Sebagian besar Pemerintah Kelurahan kurang menaruh perhatian terhadap upaya pembinaan tersebut, dan hanya sebagian kecil dari pemerintahan kelurahan yang ada yang aktif melaksanakan program-program pembinaan tersebut. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah saat ini, hendaknya pemerintah kelurahan perlu menyadari dan bangkit membangun kreativitas dan inovasinya untuk meningkatkan usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya bahwa dalam kegiatan pembinaan maka faktor sosialisasi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Sosialisasi tersebut terutama diarahkan pada upaya pembinaan tata cara pelayanan sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami prosedur yang berlaku. Di samping itu, dengan sosialisasi maka diharapkan masyarakat dapat termotivasi berperan serta atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelayanan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya aktif melakukan sosialisasi dalam rangka pembinaan mengenai tatacara suatu pelayanan admistrasi kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya , diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 28 di bawah ini.

Tabel 28 Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan melakukan sosialisasi dalam rangka pembinaan tatacara pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kelurahannya (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sering	8	8,0
2.	Sering	34	34,0
3.	Terkadang/ jarang	40	40,0
4.	Tidak pernah	18	18,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 58% responden memberikan jawaban jarang / tidak pernah sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah melihat ada kegiatan sosialisasi di lingkungannya, dan jarang melihat aparat kelurahan turun memberikan suatu informasi pelayanan sehingga dinilai kurang aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering diundang menghadiri atau mendengarkan beberapa penyampaian baik langsung maupun tidak langsung baik langsung dari Lurah maupun dari aparatnya mengenai suatu kegiatan pelayanan sehingga dinilai sering atau aktif.

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, sehingga senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik termasuk melakukan sosialisasi bilamana ada hal yang perlu disosialisasikan. Meskipun demikian juga diakui bahwa kegiatan sosialisasi tersebut hanya sekali-kali dilakukan mengingat terbatasnya kemampuan sarana dan prasaran serta dana dan tenaga teknis penyuluh, dan pelaksanaannya pun biasa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan suatu kegiatan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah kelurahan lebih proaktif

melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun perangkat kelembagaannya agar tercipta suatu hubungan komunikasi yang baik dan lancar. Di samping itu juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat atas suatu hal yang terkait dengan kepentingan pelayanan. Namun kenyataannya, pemerintah kelurahan masih sangat kurang menaruh perhatian akan hal tersebut, sehingga terkadang ada warga masyarakat yang tidak tahu apa yang harus dilakukan bilamana hendak berurusan dengan pemerintah kelurahan. Akibatnya pula bahwa sebagian besar warga masyarakat kurang mengetahui dan kurang memahami prosedur yang berlaku serta kurang menyadari hak dan kewajibannya. Hal ini perlu menjadi catatan bagi pemerintah kelurahan agar mau mengevaluasi kinerjanya agar masyarakat dan perangkat kelembagaannya turut mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan itu sendiri.

Rangkaian pembinaan melalui kegiatan sosialisasi yang juga penting adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan, apakah itu undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), atukah peraturan daerah (Perda) dan keputusan-keputusan camat dan lainnya.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan sering melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan perangkat kelembagaannya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29 Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan melakukan sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan perangkat kelebagaannya dalam lingkup wilayah pemerintahannya (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sering	4	4,0
2.	Sering	32	32,0
3.	Terkadang/ jarang	44	44,0
4.	Tidak pernah	20	20,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan Tabel 29 di bawah menunjukkan bahwa 36% responden memberikan jawaban sering sehingga dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah melihat ada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dari aparat kelurahan sehingga dinilai jarang atau tidak aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering diundang menghadiri atau mengikuti pengarahannya baik Lurah maupun aparatnya mengenai suatu kebijaksanaan peraturan baru sehingga dinilai sering atau aktif.

Hasil wawancara pemerintah kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa ketika ada peraturan perundang-undangan yang dianggap penting ataukah diminta secara langsung oleh atasan untuk disebarluaskan kepada masyarakat, maka pihaknya segera

bertindak untuk melaksanakan perintah tugas tersebut, namun bilamana hal itu tidak ada perintah atau dinilai tidak penting maka pihaknya juga tidak perlu repot untuk mensosialisasikannya karena setiap kegiatan sosialisasi butuh dana yang tidak sedikit serta perlu tersedia fasilitas operasional.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa di era transparansi ini, masyarakat berhak menuntut berbagai kemudahan akses informasi terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya yang biasanya diatur dalam suatu kebijakan peraturan perundang-undangan. Untuk tujuan itu, maka pemerintah kelurahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk senantiasa proaktif melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat dalam wilayah kerjanya. Namun kenyataannya, aparat kelurahan nampak terlena dan asyik dengan kesenangan dan rutinitasnya datang ke kantor sejenak lalu pulang ataukah hanya duduk sepanjang jam kerja menunggu jam kerja berakhir, sehingga sangat sulit diharapkan untuk terwujudnya kegiatan sosialisasi sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering melakukan pembinaan teknis dan prosedur pelayanan administrasi kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 30.

Secara keseluruhan Tabel 30 menunjukkan bahwa 44% responden memberikan jawaban sering sehingga dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah melihat ada kegiatan pembinaan teknis dan prosedur pelayanan administrasi dari aparat kelurahan sehingga dinilai jarang atau kurang aktif.

Tabel 30 Pendapat responden tentang keaktifan pemerintah kelurahan dan perangkat aparaturnya melakukan pembinaan teknis dan prosedur pelayanan administrasi kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sering	8	8,0
2.	Sering	36	36,0
3.	Terkadang/ jarang	40	40,0
4.	Tidak pernah	16	16,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering diundang menghadiri atau mengikuti kegiatan pelatihan teknis dan prosedur pelayanan administrasi sehingga dinilai sering atau aktif.

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya sudah memprogramkan berbagai kegiatan termasuk program pembinaan teknis dan prosedur pelayanan kepada masyarakat sehingga senantiasa berusaha melaksanakannya melalui bentuk pelatihan yang melibatkan beberapa warga masyarakat.

Namun demikian juga diakui bahwa karena kemampuan dana serta sarana prasarana yang dimiliki organisasi pemerintahannya maka kegiatan seperti itu hanya sekali-kali dilaksanakan, dan juga biasanya tergantung pada ada tidaknya pihak-pihak yang mengajukan usulan kerjasama.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa memang sangat sulit untuk menuntut ataupun mewujudkan berbagai harapan masyarakat kepada pemerintah kelurahannya karena selalu mengedepankan alasan keterbatasan dana dan fasilitas. Kenyataan ini juga mengindikasikan bahwa sudah terjadi pergeseran paradigma dari sejumlah aparatur pemerintah termasuk pada level pemerintahan kelurahan, hal mana bahwa tanggung jawab moril sudah menjadi persoalan kesepuluh dan yang penting adalah dana atau uang. Suatu pekerjaan akan cepat dilaksanakan bilamana ada uang, sebaliknya perkerjaan akan terbengkalai bila tidak didukung dana. Fakta ini terjadi dimana-mana bukan saja di kelurahan melainkan sudah menjadi rahasia umum terjadi pada level pemerintahan daerah kabupaten dan kota, provinsi bahkan pemerintahan nasional. Fenomena ini terus terjadi hingga saat ini meskipun sejumlah struktur kelembagaan telah mengalami reposisi dan restrukturisasi serta reformasi namun sumber daya manusia masih cenderung tidak meningkat kualitas dan profesionalismenya, sehingga tetap mempengaruhi pelaksanaan fungsi kelembagaan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian analisis keempat sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pembinaan pada pemerintah kelurahan di Kab. Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 31 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pembinaan pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat lancar	Lancar	Kurang lancar	Tidak lancar	
1	Pengarahan	20	46	18	6	100
2	Sosialisasi pembinaan tatacara pelayanan	8	34	40	18	100
3	Sosialisasi peraturan	4	32	44	20	100
4	Pembinaan teknis administrasi	8	36	40	16	100
100 Responden (%)		10 (10%)	38 (38%)	38 (38%)	14 (14%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pembinaan pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene sebesar 48%, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*.

### 3. Fungsi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Fungsi pelayanan administrasi kependudukan mencakup seluruh kegiatan pelayanan di bidang kependudukan bagi masyarakat di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Majene. Dalam administrasi

kependudukan tersebut, pemerintah kelurahan dan perangkatnya berkewajiban untuk melakukan pendataan dan pelaporan data penduduk dengan benar, memberikan pelayanan dengan akses yang mudah dan cepat dalam kepengurusan KTP maupun kartu keluarga (KK), memberlakukan mekanisme yang jelas, tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel serta berdisiplin.

***a. Sistem pendataan dan pelaporan***

Seksi Pemerintahan pada Struktur Kelembagaan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene mengemban tugas dan fungsi yaitu pendataan dan pelaporan data penduduk. Tugas dan fungsi ini perlu dilakukan secara rutin dan benar agar tersedia database penduduk yang benar dan riil.

Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam sistem pendataan dan pelaporan data penduduk pada masing-masing kelurahan dilakukan terhadap : 1) keaktifan aparatur melakukan pendataan / pendaftaran, dan 2) validitas data penduduk. Analisis dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dan dipadukan dengan hasil wawancara dari narasumber / informan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah aparatur pemerintah kelurahan aktif melakukan pendataan dan pendaftaran penduduk kepada warga masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 32 .

Secara keseluruhan Tabel 32 menunjukkan bahwa 76% responden memberikan jawaban aktif sehingga dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering dikunjungi oleh aparat dari kelurahan untuk didata dan didaftar ulang sebagai penduduk yang sah sehingga dinilai aktif.

Tabel 32 Pendapat responden tentang keaktifan aparat pemerintah kelurahan melakukan pendataan dan pendaftaran penduduk di wilayah kelurahan masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	22	22,0
2.	Aktif	54	54,0
3.	Kurang aktif	18	18,0
4.	Tidak aktif	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan belum pernah dikunjungi atau diminta langsung datang ke kantor kelurahan untuk didata atau didaftar sebagai penduduk yang sah sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pemerintahan & Trantib di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya setiap tahun melakukan pendataan ulang kepada penduduk untuk mengetahui dan mengecek ulang pertambahan jumlah penduduk. Di samping itu, juga sering menghimbau kepada warga masyarakat tertentu yang tidak atau belum

sempat terdata untuk datang sendiri ke kantor kelurahan guna mendaftar sebagai penduduk yang sah.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa pendataan atau pendaftaran penduduk sudah menjadi tugas rutin pemerintah kelurahan yang dilaksanakan sekali setahun guna memastikan seberapa besar laju pertumbuhan penduduk di wilayah kerjanya. Hal itu penting namun masalahnya sistem pendataan penduduk tersebut terkadang dilakukan dengan cara kurang teliti / berhati-hati, akibatnya masih sering terjadi sejumlah penduduk tidak terdaftar di kantor kelurahan. Selain itu, juga sering terjadi adanya nama-nama penduduk yang double atau berulang ataukah salah dalam menulis data.

Aktivitas pendataan atau pendaftaran penduduk selain dituntut untuk dilakukan secara rutin atau aktif, juga perlu dipertimbangkan kebenaran data (validitas) penduduk yang ada.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah sistem pendataan dan pendaftaran penduduk sudah benar dan valid, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 33.

Secara keseluruhan Tabel 33 menunjukkan bahwa 82% responden memberikan jawaban sesuai dan benar sehingga dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering dikunjungi oleh aparat dari kelurahan untuk di data atau di daftar sebagai penduduk yang

sah dengan memberikan jawaban secara langsung atas setiap pertanyaan data yang diminta sehingga dinilai sesuai dan benar.

Tabel 33 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian kesesuaian validitas data dari hasil pendataan penduduk di wilayah kelurahan masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sesuai dan benar	20	20,0
2.	Sesuai dan benar	62	62,0
3.	Kurang sesuai/ benar	14	14,0
4.	Tidak sesuai/ benar	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan belum pernah dikunjungi atau diminta langsung datang ke kantor kelurahan untuk didata atau ddaftar sebagai penduduk yang sah sehingga dinilai kurang sesuai/ benar.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pemerintahan & Trantib di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya setiap tahun melakukan pendataan ulang kepada penduduk untuk mengetahui dan mengecek kebenaran jumlah penduduk. Di samping itu, juga sering menghimbau kepada warga masyarakat tertentu yang tidak atau belum sempat terdata ataukah belum menyerahkan blanko data identitas penduduk untuk datang sendiri ke kantor kelurahan guna disesuaikan kebenarannya.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa pendataan atau pendafataran penduduk sudah

menjadi tugas rutin pemerintah kelurahan yang dilaksanakan sekali setahun guna memastikan seberapa besar laju pertumbuhan penduduk di wilayah kerjanya. Hal itu penting namun hanya masalahnya bahwa sistem pendataan atau pendafaran penduduk tersebut terkadang dilakukan dengan cara yang kurang teliti dan berhati-hati, akibatnya masih sering terjadi sejumlah penduduk tidak terdaftar di kantor kelurahan. Selain itu, juga sering terjadi adanya nama-nama penduduk yang double atau berulang ataukah salah dalam menulis data.

***b. Kemudahan pelayanan***

Pelayanan administrasi kependudukan juga mencakup kegiatan penyelenggaraan dan kepengurusan identitas penduduk yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah masyarakat cukup mudah mengurus KTP di Kantor Kelurahan, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 34 Pendapat responden tentang kemudahan pengurusan KTP di Kantor Kelurahan (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat mudah	16	16,0
2.	Mudah	56	54,0
3.	Sulit	22	22,0
4.	Sangat sulit	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 70% responden memberikan jawaban mudah sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka pernah mengurus kartu tanda penduduk atau KTP di Kantor Kelurahan dan aparat kelurahan cukup membantu dan tidak mengalami kesulitan apapun sehingga dinilai mudah dan lancar. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka memiliki pengalaman ketika mengurus KTP di kantor kelurahan harus bolak balik dan menunggu lama hingga KTP tersebut selesai dibuat sehingga dinilai sulit atau tidak lancar.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pemerintahan & Trantib di Kab. Majene menjelaskan bahwa pihaknya setiap saat stand by memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama yang membutuhkan atau ingin mengurus KTP, dan senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, namun terkadang ada warga masyarakat yang kurang memahami prosedur dan kewajibannya serta tidak mau memperlengkapi diri dengan surat pengantar dari ketua RT/RW yang bersangkutan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa isu yang marak berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini adalah semakin menurunnya kualitas pelayanan administrasi di sejumlah kantor pemerintahan termasuk di kantor kelurahan. Sejumlah warga masyarakat misalnya yang hendak mengurus surat-surat seperti KTP terkadang harus rela menerima kenyataan karena

apa yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan. Warga masyarakat biasanya terpaksa harus berurusan dengan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit serta harus merogoh atau mengeluarkan biaya ekstra demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pola perilaku sebagian aparatur terutama mereka yang bertugas langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, nampaknya belum banyak berubah dengan sikap mental yang cenderung untuk dilayani daripada melayani masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan khususnya Seksi Pemerintahan dan Trantib, selain diharapkan berjalan mudah dan cepat, juga diharapkan dapat berjalan sesuai mekanisme yang jelas sehingga masyarakat benar-benar dapat mengerti dan memahami prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah prosedur pelaksanaan pengurusan KTP di Kantor Kelurahan sudah sesuai mekanisme yang berlaku, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan di bawah ini.

Tabel 35 Pendapat responden tentang tingkat kesesuaian prosedur pengurusan KTP di Kantor Kelurahan dengan mekanisme yang berlaku (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sesuai	11	14,0
2.	Sesuai	52	52,0
3.	Kurang sesuai	24	24,0
4.	Tidak sesuai	10	10,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 66% responden memberikan jawaban sesuai sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat bahwa mereka pernah mengurus kartu tanda penduduk atau KTP di Kantor Kelurahan dan diharuskan untuk membawa surat pengantar dari ketua RT/ RW baru kemudian dilaporkan kepada aparat kelurahan yang bersangkutan sehingga dinilai sesuai. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa belakangan ini mereka baru mengerti prosedur mengurus KTP di kantor kelurahan, namun mereka pernah mencoba mengurus KTP tanpa disertai surat pengantar dari RT atau RW namun tetap dilayani sehingga dinilai kurang sesuai.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pemerintahan & Trantib di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam setiap pengurusan KTP, ada mekanisme yang harus dilalui oleh seorang warga, yaitu terdaftar di kelurahan, memiliki surat bukti tempat tinggal dari RT/RW setempat, mempunyai kartu keluarga, dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Prosedur itu senantiasa dijalankan oleh pihak kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Namun pun demikian tidak tertutup kemungkinan ada kebijaksanaan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu kepada warga tertentu yang mendesak / sangat membutuhkan untuk dipergunakan pada suatu keperluan penting, kepada mereka itu tetap diberikan pelayanan walaupun tidak memenuhi keseluruhan prosedur yang berlaku.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa seringkali prosedur yang ditetapkan pemerintah termasuk pemerintah kelurahan hanya bersifat *live service* atau formalitas belaka. Tidak sedikit prosedur yang ditetapkan pemerintah kelurahan justru dilanggar sendiri oleh aparturnya. Misalnya saja ketika seorang warga yang memiliki hubungan dekat atau cukup dikenal oleh aparat bersangkutan hendak mengurus KTP, biasanya aparat yang bersangkutan langsung memproses tanpa perlu meminta surat pengantar atau surat-surat kelengkapan lainnya. Sementara pada sisi lain ada warga yang datang untuk mengurus hal yang sama yang juga tidak punya kelengkapan surat-surat dan tidak punya hubungan dekat atau tidak dikenal oleh aparat bersangkutan, warga bersangkutan biasanya diminta untuk kembali melengkapi diri dengan surat pengantar, kartu keluarga dan lainnya. Fenomena perilaku itu sudah menjadi rahasia umum, dan perlu segera dirubah oleh pejabat yang terkait / pengambilan kebijaksanaan.

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan khususnya Seksi Pemerintahan dan Trantib, selain diharapkan berjalan mudah, cepat, mekanisme jelas, juga diharapkan berlangsung secara terbuka atau transparan dan adil/ tidak diskriminatif, sehingga masyarakat benar-benar merasa enak dan senang berurusan dengan aparatur kelurahan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pelayanan pengurusan KTP di

Kantor Kelurahan dilakukan oleh aparatur secara terbuka/ transparan dan tidak diskriminatif, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 36 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian transparansi dan keadilan dalam pengurusan KTP di Kantor Kelurahan (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat terbuka dan tidak pilih kasih	10	10,0
2.	Terbuka dan tidak pilih kasih	36	36,0
3.	Kurang terbuka dan pilih kasih	40	40,0
4.	Tidak terbuka dan sangat pilih kasih	14	14,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 46% responden memberikan jawaban terbuka dan pilih kasih sehingga dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat bahwa mereka pernah mengurus KTP di Kantor Kelurahan dan ketika itu kurang mendapat penjelasan secara terbuka dari aparat kelurahan yang bersangkutan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kepengurusan tersebut, bahkan tidak ada petunjuk yang jelas mengenai syarat-syarat tertentu kecuali diminta menulis nama, tanggal lahir, tempat tinggal serta diminta menyerahkan sejumlah uang tertentu, selain itu melihat ada praktek-praktek pilih kasih dengan warga lainnya sehingga dinilai kurang terbuka dan pilih kasih. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa setiap kali hendak

mengurus sesuatu di kantor kelurahan termasuk ketika mengurus KTP, aparat yang bersangkutan memberikan penjelasan secara panjang lebar apa yang perlu diketahui dan melihat warga lain diperlakukan sama sehingga dinilai transparan dan tidak pilih kasih.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pemerintahan & Trantib di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam setiap pelayanan warga masyarakat, pihaknya senantiasa bersandarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan adil. Namun pun demikian diakui masih ada aparat yang masih perlu meningkatkan pemahamannya akan hal tersebut, demikian halnya warga masyarakat tertentu masih banyak yang kurang bahkan tidak memahami tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah kelurahan. Olehnya itu, kedepan akan dilakukan pencerahan terhadap mereka itu.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa pola perilaku aparatur pemerintah termasuk perangkat aparatur pemerintah kelurahan saat ini masih belum banyak berubah meskipun kita sudah memasuki era transparansi. Sikap dan perilaku aparatur yang cenderung tertutup dan menganggap kurang pentingnya keterbukaan bahkan terkadang sengaja menutup-nutupi sesuatu, dan cenderung pilih kasih masih menjadi pemandangan umum terjadi di sejumlah kantor pemerintahan tidak terkecuali kantor pemerintah kelurahan. Akibatnya sejumlah warga masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak-haknya secara wajar dan adil, justru sering dikelabui

atau dirampas oleh aparatur yang bersangkutan. Di sisi lain, pihak pengambil kebijakan terkadang tutup mata dan telinga terhadap setiap keluhan warga tertentu tanpa adanya tindakan korektif.

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan khususnya Seksi Pemerintahan dan Trantib perlu mengedepankan prinsip-prinsip kedisiplinan dan akuntabilitas, sehingga masyarakat benar-benar merasa nyaman berurusan dengan aparatur kelurahan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pelayanan pengurusan KTP di Kantor Kelurahan dilakukan oleh aparatur dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin waktu, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 37 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian akuntabilitas dan kedisiplinan pengurusan KTP di Kantor Kelurahan (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Tinggi	14	14,0
2.	Sedang	42	42,0
3.	Rendah	32	32,0
4.	Sangat rendah	12	12,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 56% responden memberikan jawaban bertanggung jawab dan berdisiplin sehingga dapat

dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat bahwa mereka pernah mengurus KTP di Kantor Kelurahan dan KTP tersebut selesai tepat waktu sesuai yang dijanjikan oleh aparat yang bersangkutan sehingga dinilai akuntabel dan disiplin. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa sudah seringkali mendapat perlakuan yang tidak bertanggung jawab bahkan terkadang dipermainkan oleh aparatur tertentu di kantor kelurahan, aparat yang bersangkutan suka mengingkari janji dan menunda-nunda bahkan sengaja memperlambat penyelesaian urusannya sehingga dinilai kurang akuntabel / disiplin .

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) pada kantor kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam setiap pelayanan warga masyarakat, pihaknya senantiasa bersandarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas , dan pihaknya sudah menekankan agar aparatnya berlaku disiplin dan memelihara tanggung jawabnya dengan baik. Namun pun demikian diakui masih ada aparat yang masih perlu meningkatkan pemahamannya akan hal tersebut, demikian halnya warga masyarakat tertentu masih banyak yang kurang bahkan tidak memahami tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah kelurahan. Olehnya itu, kedepan akan dilakukan pencerahan terhadap mereka itu.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa pola perilaku aparatur pemerintah termasuk

perangkat aparatur pemerintah kelurahan saat ini masih belum banyak berubah. Sikap dan perilaku sebahagian aparatur yang cenderung tidak disiplin dan kurang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugasnya, masih menjadi pemandangan umum terjadi di sejumlah kantor pemerintahan tidak terkecuali kantor pemerintah kelurahan. Pada sisi lain, pihak pengambil kebijakan dalam hal ini pimpinan instansi, terlihat atau terkesan acuh terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian analisis kedua sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi kependudukan pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 38 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat aktif	Akif	Kurang aktif	Tidak aktif	
1	Pendataan & pelaporan penduduk	20	58	16	6	100
2	Kemudahan pelayanan surat-surat	12	46	32	10	100
100 Responden (%)		16 (16%)	52 (52%)	24 (24%)	8 (8%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi kependudukan pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene sebesar 62%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

#### 4. Fungsi Pelayanan Teknis Administrasi dan Tata Kerja

Fungsi pelayanan teknis administrasi menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan dan perangkat aparaturinya. Fungsi ini mencakup teknis pelayanan administrasi berbagai hal yang menyangkut pendataan dan pencatatan sipil, pengurusan surat-surat seperti kartu PBB, retribusi, sertifikat tanah, rekomendasi perizinan kepada instansi terkait dan lainnya.

Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pelayanan teknis administrasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan di Kab.Majene, dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dan dipadukan hasil wawancara dengan narasumber atau informan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah aparat kelurahan aktif melakukan pendataan dan pencatatan sipil kepada masyarakat di wilayah kerjanya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan di bawah ini.

Tabel 39 Pendapat responden tentang keaktifan aparat kelurahan melakukan pendataan dan pencatatan sipil kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sering	14	14,0
2.	Sering	38	38,0
3.	Jarang	36	36,0
4.	Tidak pernah	12	12,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 52% responden memberikan jawaban sering sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka biasa melihat aparat kelurahan turun lapangan untuk melakukan pendataan dan pencatatan sipil sehingga dinilai sering. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka hanya sekali bahkan tidak pernah melihat/ dikunjungi aparatur kelurahan untuk melakukan kegiatan pendataan dan pencatatan sipil sehingga dinilai jarang.

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya termasuk tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendataan / pencatatan sipil sebagai bagian dari kegiatan pelayanan teknis administrasi. Kegiatan ini dilakukan bilamana dirasa perlu dan urgen untuk dilaksanakan serta didukung sarana dan prasarana serta dana.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kelurahan untuk secara proaktif melakukan pendataan termasuk kegiatan pencatatan sipil, namun hal itu nampak masih terbatas dilakukan sehingga mempengaruhi validitas database yang ada.

Pelayanan teknis administrasi yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kelurahan adalah pelayanan dalam hal

pendistribusian penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan pajak (PBB), retribusi, rekomendasi izin dan lainnya.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah aparat kelurahan aktif mendistribusikan penerbitan surat-surat pajak termasuk sertifikasi tanah serta retribusi tertentu, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 40 Pendapat responden tentang keaktifan aparat kelurahan mendistribusikan penerbitan surat-surat pajak, sertifikasi tanah serta retribusi kepada warga masyarakat dalam wilayah kerjanya (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	26	26,0
2.	Aktif	56	56,0
3.	Kurang aktif	14	14,0
4.	Tidak aktif	4	4,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 82% responden memberikan jawaban aktif sehingga dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa setiap tahun menerima surat tagihan pajak yang didistribusikan oleh aparat kelurahan, demikian pula sertifikasi tanah dan pungutan iuran retribusi juga banyak melibatkan aparat kelurahan bersama aparat dari instansi lain sehingga dinilai aktif. Tanggapan

responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan sudah beberapa tahun tidak pernah menerima distribusi surat-surat pajak dan jarang melihat aparat kelurahan terlibat dalam memberikan pelayanan sertifikasi tanah ataupun membantu pungutan retribusi sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Umum di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya selalu diminta oleh Dispenda dan Kantor Pertanahan Kab. Majene melalui camat untuk mendistribusikan surat-surat pajak, dan sekaligus diminta untuk menangani penagihan atau pengumpulan pembayarannya. Surat-surat pajak tersebut kemudian disebar luaskan kepada masing-masing ketua RT/RW untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mengkoordinir pelaksanaan pendataan tanah penduduk beserta sertifikasinya agar jelas status kepemilikannya. Demikian pula pelayanan dalam hal retribusi seperti retribusi parkir, retribusi sampah dan lainnya, juga terkadang harus melibatkan diri guna membantu instansi terkait memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa masalah pajak merupakan hal yang penting dalam menunjang pembangunan daerah. Olehnya itu, aparatur pemerintah daerah/ instansi terkait termasuk perangkat aparatur pemerintah kelurahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat agar tidak menimbulkan sanksi hukum bagi penduduknya yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pelayanan teknis administrasi yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kelurahan adalah pelayanan dalam hal rekomendasi izin bagi warga masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah aparat kelurahan terlibat aktif mendorong kelancaran pengurusan surat-surat izin bagi warga yang membutuhkannya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 41 Pendapat responden tentang kelancaran pengurusan surat-surat izin tertentu bagi warga masyarakat yang membutuhkan (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat lancar	14	14,0
2.	Lancar	42	42,0
3.	Kurang lancar	34	34,0
4.	Tidak lancar	10	10,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 56% responden memberikan jawaban aktif dan lancar sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering berurusan atau berhubungan dengan aparat kelurahan untuk mengurus suatu surat izin

tertentu seperti izin usaha, izin perkawinan dan lainnya namun tidak pernah dipersulit sehingga dinilai lancar. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa terkadang ketika berurusan dengan aparat kelurahan untuk meminta surat pengantar atau rekomendasi izin tertentu, mereka diharuskan menunggu lama dan dimintai sejumlah biaya yang kurang jelas aturannya sehingga dinilai kurang lancar.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Umum di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban unit kerjanya untuk memberikan pelayanan surat-surat izin kepada warganya yang membutuhkan, termasuk memfasilitasi mereka untuk berurusan atau berhubungan dengan instansi terkait yang berwenang. Meskipun demikian juga diakui bahwa terkadang calo yang merasa memiliki power dan channel dengan pejabat instansi terkait dengan mengatasnamakan kelurahan untuk mengambil kesempatan dan keuntungan tertentu dari warga yang berkepentingan dengan suatu surat izin.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa masalah perizinan merupakan hal yang penting dalam menunjang pembangunan daerah. Olehnya itu, aparatur pemerintah daerah/ instansi terkait termasuk perangkat aparatur pemerintah kelurahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun sanksi hukum dikemudian hari.

Berdasarkan uraian analisis ketiga variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pelayanan teknis administrasi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 42 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan teknis administrasi di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat lancar	Lancar	Kurang lancar	Tidak lancar	
1	Pendataan & pencatatan sipil	14	38	36	12	100
2	Distribusi surat-surat	26	56	14	4	100
3.	Pengurusan rekomendasi surat-surat	14	42	34	10	100
100 Responden (%)		18 (18%)	45 (45%)	28 (28%)	9 (9%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pelayanan teknis administrasi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene sebesar 66%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

## 5. Fungsi Pembangunan dan Pemeliharaan Fasum/ Fasos

### a. Fungsi pembangunan Fasilitas Pendidikan

Pasal 5 ayat (5) PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan menetapkan bahwa Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) mempunyai fungsi yaitu pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum. Ketentuan di atas juga sejalan dengan Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan.

Fungsi tersebut terutama menjadi *line operation* atau bagian tugas dari Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kelurahan. Fungsi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang menjadi tanggung jawab seksi tersebut mencakup pembangunan sejumlah fasilitas seperti fasilitas pendidikan (sekolah), fasilitas kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik), fasilitas ekonomi perdagangan (pasar, kios-kios), tempat ibadah (masjid, musholla, gereja), fasilitas transportasi (jalan utama, jalan lingkungan), serta fasilitas keamanan lingkungan (pos-pos siskamling, personil keamanan) dan lainnya.

Analisis terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan dalam hal pembangunan fasilitas umum dan sosial yang menjadi tugas dan tanggung jawab Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene, dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dan dipadukan hasil wawancara dengan narasumber atau informan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan

pembangunan fasilitas pendidikan di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 43 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas pendidikan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	16	16,0
2.	Aktif	46	46,0
3.	Kurang aktif	24	24,0
4.	Tidak aktif	14	14,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 62% responden memberikan jawaban aktif sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa selama beberapa tahun terakhir pembangunan sekolah-sekolah di lingkungan sekitarnya terus meningkat dan memudahkan anak dan keluarganya untuk mengakses pendidikan sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa di lingkungannya jumlah sekolah hanya bertambah 1-2 unit sejak wilayahnya menjadi kelurahan sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Untuk itu

berbagai langkah terutama berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya untuk mengusulkan agar pembangunan fasilitas pendidikan dapat dianggarkan di wilayahnya. Namun demikian, pihaknya juga memahami bahwa meskipun sudah berusaha untuk itu namun tidak semua usulan itu dapat segera direalisasikan mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah sudah mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk mendorong kemajuan pendidikan di daerahnya melalui pembangunan berbagai fasilitas pendidikan terutama memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi warga masyarakat di desa-desa atau di kelurahan. Hanya masalahnya bahwa terkadang dalam kebijakan itu kurang dilaksanakan secara transparan dan kurang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan tertentu. Faktanya menunjukkan, ada wilayah kelurahan yang sudah memiliki 2 atau lebih SLTP dan SLTA sementara ada juga kelurahan yang justru belum ada sama sekali. Olehnya itu, disinilah sebenarnya peranan pemerintah kelurahan untuk bagaimana mengupayakan koordinasi dengan pemerintah daerah/instansi terkait agar memberikan perhatian pembangunan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan di wilayahnya.

#### ***b. Fungsi pembangunan Fasilitas Kesehatan***

Fasilitas umum dan sosial lainnya yang menjadi penting untuk diperhatikan dan diupayakan ketersediaannya oleh Pemerintah Daerah

adalah fasilitas pelayanan kesehatan baik prasarana maupun sarannya. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan penduduk yang terus meningkat.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembangunan fasilitas kesehatan di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 44 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas kesehatan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	12	12,0
2.	Aktif	34	34,0
3.	Kurang aktif	38	38,0
4.	Tidak aktif	16	16,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 46% responden memberikan jawaban aktif sehingga dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa sampai sekarang ini belum ada rumah sakit ataupun puskesmas kecuali pos yandu di lingkungan sekitarnya, dan karenanya sangat kesulitan untuk memeriksakan kesehatan dan berobat bilamana anak dan keluarganya

sakit sehingga dinilai kurang aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa di lingkungannya sudah ada tersedia puskesmas dan dokter serta perawat/ bidan sehingga dinilai aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan bagi warga masyarakatnya, namun tidak memiliki kemampuan dana untuk itu. Untuk itu berbagai langkah terutama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan , Dinas Kesos dan KB serta instansi terkait lainnya untuk meminta agar pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas beserta penyediaan tenaga medis dapat diprioritaskan di wilayahnya. Namun demikian, pihaknya juga memahami bahwa meskipun sudah berusaha untuk itu namun tidak semua usulan itu dapat segera direalisasikan mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa ada kecenderungan Pemerintah Daerah kurang menaruh perhatian yang serius terhadap langkah-langkah dan kebijakan untuk mendorong kemajuan pembangunan fasilitas layanan kesehatan di daerahnya. Hal ini cukup jelas terlihat dari masih sangat terbatasnya fasilitas kesehatan yang tersedia. Bayangkan saja baru ada 1 rumah sakit dan 4 puskesmas yang tersedia untuk melayani 140 ribu lebih penduduk di Kabupaten Majene. Demikian pula tenaga medis atau paramedis,

hanya ada 12 dokter dan 42 perawat/ bidan yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 140.000 lebih penduduk tersebut. Kenyataan ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene termasuk pemerintah kelurahan yang ada untuk bagaimana secara proaktif mendorong investasi pembangunan fasilitas layanan kesehatan melalui kerjasama dengan pihak swasta, dan sudah seharusnya tidak bergantung pada anggaran pemerintah.

### ***c. Fungsi pembangunan Fasilitas Peribadatan***

Fasilitas peribadatan merupakan salah satu fasilitas yang sudah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kelancaran warga masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ibadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan juga berkewajiban untuk mendorong kemajuan pembangunan fasilitas peribadatan di wilayah pemerintahannya dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk akan prasarana dan sarana peribadatan tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembangunan fasilitas peribadatan di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 45 Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas peribadatan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	22	22,0
2.	Aktif	58	58,0
3.	Kurang aktif	14	14,0
4.	Tidak aktif	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 80% responden memberikan jawaban aktif sehingga dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sangat mudah melakukan ibadah karena di lingkungan sekitarnya sudah tersedia beberapa masjid dan musholla sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa di lingkungannya masih jarang atau masih dihitung jari jumlah fasilitas ibadah seperti masjid dan musholla dan biasanya harus berjalan kaki lebih jauh untuk melakukan ibadah sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong ketersediaan prasarana dan sarana peribadatan bagi warga masyarakatnya. Untuk itu berbagai langkah terutama berkoordinasi

dengan Pemerintah Daerah / instansi terkait untuk meminta agar pembangunan fasilitas ibadah dapat diprioritaskan di wilayahnya. Selain itu, juga senantiasa menumbuhkan swadaya masyarakat untuk secara bersama-sama dan bergotong royong membangun fasilitas ibadah seperti masjid dan musholla karena mayoritas penduduk beragama Islam.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pembangunan fasilitas ibadat di sejumlah kelurahan sudah cukup memadai sehingga cukup memudahkan bagi penduduk untuk menunaikan kewajibannya. Hal ini juga menjadi bukti peranan pemerintah daerah termasuk pemerintah kelurahan dalam memainkan peran dan fungsinya yang berhasil mendorong pembangunan sejumlah masjid dan musholla bahkan gereja karena ada sebagian kecil penduduk yang beragama Kristen.

#### ***d. Fungsi pembangunan Fasilitas Perekonomian***

Fasilitas perekonomian merupakan salah satu faktor penting yang turut menentukan dan mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah dan masyarakat. Fasilitas perkonomian meliputi fasilitas perdagangan dan industri seperti pasar, koperasi, bank, dan lainnya sesuai tingkat kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan juga berkewajiban untuk mendorong kemajuan pembangunan fasilitas perekonomian di wilayah pemerintahannya dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk akan prasarana dan sarana tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembangunan pasar di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 46 Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan fasilitas pasar di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	10	10,0
2.	Aktif	32	32,0
3.	Kurang aktif	40	40,0
4.	Tidak aktif	18	18,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 42% responden memberikan jawaban aktif sehingga dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka masih cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya terutama membeli dan menjual hasil usahanya karena tidak ada pasar di lingkungan sekitarnya, dan biasanya terpaksa pergi ke daerah lainnya yang sudah tersedia pasar sehingga dinilai kurang aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa di wilayah kelurahannya sudah ada pasar sehingga cukup mudah membeli

kebutuhan rumah tangganya dan/ atau menjual hasil usahanya sehingga dinilai aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa diakui ketersediaan fasilitas perekonomian terutama pasar untuk kegiatan transaksi jual beli bagi warga masyarakatnya masih sangat terbatas bahkan belum mampu disediakan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya dana atau terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah kelurahan untuk membangun fasilitas pasar. Namun pun demikian, pihaknya tetap berusaha mengkoordinasikannya dengan pemerintah kecamatan/ pemerintah daerah agar dapat dibantu pengadaan pasar di wilayah kelurahannya.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah daerah termasuk pemerintah kelurahan untuk memberikan perhatian dan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan pasar di setiap desa/ kelurahan yang belum memiliki fasilitas itu. Hal ini dimaksudkan agar roda perekonomian masyarakat dan daerah dapat berkembang. Namun kenyataannya, Pemda/ instansi terkait kurang memiliki program strategis untuk memajukan perekonomian masyarakat dan daerahnya, dan mereka hanya sibuk memungut pajak dan retribusi tanpa memikirkan pengembangan kegiatan perekonomian daerahnya. Di lain pihak, DPRD juga kurang memiliki nyali dan komitmen yang riil dalam menyuarakan kepentingan dan

aspirasi masyarakat yang menuntut ketersediaan sejumlah fasilitas perkenomian, pada hal banyak usaha bisa diakses dan dikembangkan oleh masyarakat bilamana tersedia fasilitas perdagangan dan industri yang memadai.

Fasilitas perekonomian yang dibutuhkan selain pasar adalah lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan seperti bank, koperasi dan sebagainya. Ketersediaan fasilitas itu dimaksudkan untuk memudahkan bagi warga masyarakat memenuhi kebutuhan mereka akan modal usaha maupun untuk menyimpan uang untuk berbagai keperluan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkat aparaturnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembangunan lembaga keuangan / pembiayaan (bank dan koperasi) untuk membuka kantor cabang ataupun mengembangkan usahanya di masing-masing wilayah kelurahannya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 47.

Secara keseluruhan Tabel 47 menunjukkan bahwa 56% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya terutama modal usaha karena belum tersedia bank di lingkungan sekitarnya, dan biasanya terpaksa pergi ke kota untuk

mengurus uang ataupun menyimpan uang di bank yang ada sehingga dinilai kurang aktif.

Tabel 47 Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi ketersediaan fasilitas keuangan/ pembiayaan (koperasi, bank) di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	16	16,0
2.	Aktif	40	40,0
3.	Kurang aktif	38	38,0
4.	Tidak aktif	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa di wilayah kelurahannya sudah ada bank dan koperasi, dan karenanya cukup mudah untuk menabung ataupun meminjam uang / modal usaha sehingga sehingga dinilai aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa diakui ketersediaan fasilitas perekonomian terutama bank belum mampu disediakan, namun untuk koperasi sudah tersedia banyak sehingga cukup memudahkan bagi warga masyarakatnya untuk memperoleh modal usaha. Namun pun demikian, pihaknya tetap berusaha mengkoordinasikannya dengan pengelola lembaga perbankan dan pemerintah kecamatan/ pemerintah daerah agar dapat dibantu

menghadirkan kantor cabang bank (terutama BRI) di wilayah kelurahannya.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah daerah khususnya pemerintah kelurahan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pengelola lembaga keuangan/ pembiayaan (seperti bank dan koperasi) untuk membuka kantor cabang di wilayahnya agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan jasa keuangan tersebut. Banyak peluang yang bisa dikembangkan dalam memacu perekonomian masyarakat dan daerah dengan tersedianya fasilitas tersebut, namun sayangnya bahwa Pemda belum menaruh perhatian yang serius terhadap hal itu.

#### ***d. Fungsi pembangunan infrastruktur jalan***

Fasilitas transportasi merupakan salah satu faktor pendukung penting yang turut menentukan dan mempengaruhi aktivitas perekonomian daerah dan masyarakat. Fasilitas transportasi meliputi pembangunan infrastruktur jalan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan juga berkewajiban untuk mendorong kemajuan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pemerintahannya dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk akan prasarana dan sarana transportasi tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan

perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 48 Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	14	14,0
2.	Aktif	38	38,0
3.	Kurang aktif	36	36,0
4.	Tidak aktif	12	12,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 52% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa selama dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ruas jalan baik jalan kolektor lingkungan maupun jalan primer telah dibangun pemerintah di lingkungan sekitarnya dan karenanya cukup memudahkan akses transportasi setiap kendaraan dari dan menuju wilayah kelurahannya sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa di wilayah kelurahannya hampir tidak peningkatan pembangunan jaringan jalan selama beberapa tahun terakhir, terutama sejak menjadi kelurahan sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa fasilitas transportasi khususnya pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian pemerintah kelurahan untuk diupayakan ketersediannya dengan harapan bahwa dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam setiap kegiatan transportasi. Untuk tujuan itu, pihaknya sering berkoodinasi dengan instansi terkait terutama Bappeda dan Dinas PU untuk mengusulkan pembangunan dan meminta agar dapat dialokasikan anggaran untuk itu. Meskipun demikian tidak semua usulan yang disampaikan itu dapat direalisasikan sepenuhnya mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemkab Majene.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah daerah termasuk pemerintah kelurahan untuk memberikan perhatian utama dan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur jalan di setiap desa/ kelurahan yang masih terbatas memiliki fasilitas itu. Hal ini dimaksudkan agar roda perekonomian masyarakat dan daerah dapat berkembang karena didukung sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Namun kenyataannya, Pemda/ instansi terkait kurang memberikan prioritas pembangunan infrastruktur jalan kepada wilayah kelurahan yang benar-benar membutuhkannya, yang secara ekonomi memberikan kontribusi yang besar.

Infrastruktur jalan sebagai prasarana transportasi juga mutlak membutuhkan upaya peningkatan pembangunan dan pemeliharannya serta usaha perbaikan kerusakannya agar arus lalu lintas dari dan menuju kelurahan berjalan lancar..

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 49 Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pemeliharaan infrastruktur jalan di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	16	16,0
2.	Aktif	42	42,0
3.	Kurang aktif	28	28,0
4.	Tidak aktif	14	14,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 58% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa selama dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ruas jalan baik jalan kolektor lingkungan maupun jalan primer sering mengalami kerusakan akibat lalu lintas kendaraan berat dan cukup mengganggu

kelancaran arus transportasi di wilayahnya namun pihak pemerintah kurang menaruh perhatian terhadap upaya perbaikannya sehingga dinilai kurang aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa di wilayah kelurahannya sejumlah infrastruktur jalan nampak tetap dalam kondisi baik sehingga dinilai aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa fasilitas transportasi berupa infrastruktur jalan juga menjadi perhatian pemerintah kelurahan untuk dipelihara kondisinya dengan harapan bahwa dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam setiap kegiatan transportasi. Untuk tujuan itu, pihaknya sering berkoodinasi dengan instansi terkait terutama Dinas PU untuk mengusulkan perbaikan bilamana ada kerusakan dan meminta agar dapat dialokasikan anggaran untuk itu. Meskipun terkadang harus menunggu waktu yang lama untuk perbaikan itu karena menunggu alokasi anggaran.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah daerah termasuk pemerintah kelurahan untuk memberikan perhatian utama dan mengalokasikan anggaran baik untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan maupun upaya pemeliharannya agar selalu dalam kondisi baik dan memiliki umur pakai yang panjang. Hal ini dimaksudkan agar kelancaran arus transportasi tetap aman dan baik dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah. Namun kenyataannya, Pemda/ instansi terkait

terkadang lamban dalam memberikan perhatian terhadap perbaikan kerusakan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

***e. Fungsi pembangunan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI)***

Fasilitas tempat pelelangan ikan merupakan salah satu faktor pendukung penting yang perlu diupayakan oleh pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene mengingat sebagian besar wilayah kelurahan itu adalah laut dan sebagian besar pula penduduknya adalah nelayan dan petani ikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan juga berkewajiban untuk mendorong kemajuan pembangunan TPI dalam memenuhi kebutuhan tempat pemasaran produksi ikan tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembangunan infrastruktur TPI di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 50 Pendapat responden tentang keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur TPI di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	8	8,0
2.	Aktif	32	32,0
3.	Kurang aktif	44	44,0
4.	Tidak aktif	16	16,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 40% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa sampai sekarang ini di daerahnya belum ada TPI padahal sebagian besar penduduk sangat membutuhkannya dalam rangka memasarkan hasil tangkapan ikan dari laut sehingga dinilai tidak aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering mendengarkan usulan pemerintah kelurahan kepada Pemda untuk membangun fasilitas TPI di daerahnya walaupun belum terealisasi sehingga dinilai aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah kelurahan sudah lama memberikan perhatian terhadap upaya pembangunan TPI namun karena keterbatasan dana dan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah maka usulan tersebut masih sulit direalisasikan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah daerah termasuk pemerintah kelurahan untuk memberikan perhatian utama dan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan TPI di wilayahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dapat dengan mudah memasarkan hasil tangkapan ikannya dari laut. Namun kenyataannya, Pemda/ instansi terkait kurang memberikan prioritas pembangunan

infrastruktur tersebut kepada wilayah kelurahan yang benar-benar memiliki potensi perikanan yang besar.

Berdasarkan uraian analisis keenam sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pembangunan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 51 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan bidang pembangunan dan pemeliharaan Fasum dan Fasos di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat lancar	Lancar	Kurang lancar	Tidak lancar	
1	Fungsi pembangunan fasilitas pendidikan	16	46	24	14	100
2	Fungsi pembangunan fasilitas kesehatan	12	34	38	16	100
3	Fungsi pembangunan fasilitas peribadatan	22	58	14	6	100
4	Fungsi pembangunan fasilitas perekonomian	12	32	40	12	100
5	Fungsi pembangunan infrastruktur jalan	14	40	32	14	100
6.	Fungsi pembangunan TPI	8	32	44	16	100
100 Responden (%)		14 (14%)	42 (42%)	32 (32%)	12 (12%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pembangunan dan pemeliharaan Fasum dan Fasos pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene sebesar 56%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

## **6. Fungsi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial**

Pasal 5 ayat (5) PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan menetapkan bahwa Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) mempunyai fungsi yaitu pemberdayaan masyarakat. Ketentuan di atas juga sejalan dengan Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan, hal mana Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai salah satu fungsi yaitu pembinaan kesejahteraan sosial.

Fungsi pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab Seksi Pembangunan dan Kesos tersebut mencakup pembinaan usaha, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal usaha, penyediaan akses pemasaran, pembukaan akses lapangan kerja, dan lainnya.

Analisis terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan dalam hal pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tugas dan tanggung jawab Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene, dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dan dipadukan hasil wawancara dengan narasumber/ informan.

### ***a. Pembinaan keterampilan dan kemampuan pengelolaan usaha***

Keterampilan dan kemampuan pengelolaan usaha turut mempengaruhi keberhasilan penduduk di dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarga mereka.

Olehnya itu, Seksi Pembangunan dan Kesos Pemerintah Kelurahan dituntut melakukan pembinaan usaha kepada warga masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembinaan usaha bagi warga masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 52 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembinaan usaha bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	14	14,0
2.	Aktif	40	40,0
3.	Kurang aktif	40	40,0
4.	Tidak aktif	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 54% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering diundang ataupun diminta hadir oleh aparat kelurahan untuk mengikuti pengarahan mengenai cara-cara pengelolaan usaha sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka belum pernah terlibat atau dilibatkan

dalam kegiatan pembinaan usaha oleh siapapun termasuk dari aparat kelurahan sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakatnya, dan untuk itu senantiasa berusaha menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menaruh minat untuk memberikan pembinaan usaha kepada penduduk di daerahnya. Pemerintah Kelurahan memiliki keterbatasan kemampuan baik sarana prasarana maupun dana serta tenaga teknis sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus lebih banyak memfasilitasi berbagai kegiatan pembinaan usaha yang diusulkan pelaksanaannya oleh pihak konsultan manajemen ataupun lembaga lainnya yang relevan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa kecenderungan masyarakat menjalani kehidupannya yang tergolong kurang sejahtera nampak sudah menjadi kebiasaan tanpa ada pemikiran untuk berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam mengelola usaha. Kenyataan itu lebih diperparah oleh kurangnya perhatian Pemda / instansi terkait terutama pemerintah kelurahan untuk mendorong dan melaksanakan kegiatan pembinaan usaha dengan selalu mengedepankan alasan-alasan klasik yaitu tidak punya dana, tidak tersedia fasilitas dan lainnya. Lanjut dijelaskan, seandainya Pemda / instansi terkait mau serius mendorong

peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya, maka banyak kegiatan-kegiatan pembinaan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun kenyataannya hal itu kurang dan / atau jarang dilakukan.

***b. Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha***

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu wadah atau media atau kegiatan untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha bagi warga masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Olehnya itu, Seksi Pembangunan dan Kesos Pemerintah Kelurahan dituntut secara aktif melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada warga masyarakat dalam wilayah kerja pemerintahannya.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha bagi warga masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 53.

Secara keseluruhan Tabel 53 menunjukkan bahwa 38% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering diundang ataupun diminta hadir oleh aparat kelurahan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha sehingga dinilai aktif.

Tabel 53 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	6	6,0
2.	Aktif	32	32,0
3.	Kurang aktif	44	44,0
4.	Tidak aktif	18	18,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka belum pernah terlibat atau dilibatkan dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha oleh siapapun termasuk dari aparat kelurahan sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakatnya, dan untuk itu senantiasa berusaha menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menaruh minat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha kepada penduduk di daerahnya. Pemerintah Kelurahan memiliki keterbatasan kemampuan baik sarana prasarana maupun dana serta tenaga teknis sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus lebih banyak memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan

manajemen usaha yang diusulkan pelaksanaannya oleh pihak konsultan manajemen ataupun lembaga lainnya yang relevan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa kecenderungan masyarakat menjalani kehidupannya yang tergolong kurang sejahtera nampak sudah menjadi kebiasaan tanpa ada pemikiran untuk berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam mengelola usaha. Kenyataan itu lebih diperparah oleh kurangnya perhatian Pemda / instansi terkait terutama pemerintah kelurahan untuk mendorong dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha dengan selalu mengedepankan alasan-alasan klasik yaitu tidak punya dana, tidak tersedia fasilitas dan lainnya. Lanjut dijelaskan, seandainya Pemda / instansi terkait mau serius mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya, maka banyak kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun kenyataannya hal itu kurang diperhatikan.

### ***c. Pemberian bantuan modal usaha***

Bantuan modal usaha juga sangat diperlukan guna memudahkan atau meringankan beban warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka akan modal usaha. Dengan bantuan modal usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarga mereka. Olehnya itu, Seksi Pembangunan dan Kesos Pemerintah

Kelurahan dituntut secara aktif memfasilitasi penyaluran bantuan modal usaha kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan penyaluran bantuan modal usaha bagi warga masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 54 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan mendorong dan memfasilitasi kegiatan penyaluran bantuan modal usaha bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	16	16,0
2.	Aktif	34	34,0
3.	Kurang aktif	38	38,0
4.	Tidak aktif	12	12,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 50% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka pernah di data dan menerima bantuan modal usaha yang dibagikan oleh aparat kelurahan sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka belum pernah sama sekali di kunjungi oleh siapapun termasuk dari aparat

kelurahan untuk di data dan diberrikan bantuan modal usaha sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakatnya, dan untuk itu senantiasa berusaha menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menaruh minat untuk memberikan bantuan modal usaha kepada penduduk di daerahnya. Pemerintah Kelurahan memiliki keterbatasan dana sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus lebih banyak memfasilitasi berbagai kegiatan penyaluran bantuan modal usaha baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari pihak pengusaha/ swasta..

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa kecenderungan masyarakat menjalani kehidupannya yang tergolong kurang sejahtera nampak sudah menjadi kebiasaan tanpa ada pemikiran untuk meningkatkan kinerja permodalan usaha yang dikelolanya. Kenyataan itu lebih diperparah oleh kurangnya perhatian Pemda / instansi terkait termasuk pemerintah kelurahan untuk mendorong dan mengupayakan bantuan modal usaha bagi warganya.

#### ***d. Memfasilitasi akses pemasaran produksi unggulan lokal***

Pola mata pencaharian penduduk yang sebagian besar terdiri dari nelayan, petani dan peternak mendorong meningkatnya produksi perikanan, hasil-hasil pertanian dan perkebunan, serta produksi populasi

ternak di sejumlah kelurahan dalam wilayah Kabupaten Majene. Sejumlah komoditi hasil-hasil perikanan laut dan darat yang dihasilkan oleh penduduk melalui kegiatan penangkapan ikan di laut maupun melalui pengelolaan tambak dan kolam ikan membutuhkan akses pemasaran. Demikian pula sejumlah produksi hasil pertanian dan perkebunan serta produksi populasi ternak juga sangat membutuhkan pangsa pasar agar masyarakat dapat dengan mudah menjual hasil usahanya tersebut. Kenyataan demikian menuntut peran dan fungsi Seksi Pembangunan dan Kesos Pemerintah Kelurahan untuk secara proaktif memfasilitasi kegiatan pemasaran melalui kerjasama dengan pihak pengusaha atau investor.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil-hasil perikanan bagi warga masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 55 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil-hasil perikanan bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	4	4,0
2.	Aktif	22	22,0
3.	Kurang aktif	50	50,0
4.	Tidak aktif	24	24,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 26% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa hampir setiap harinya melaut untuk menangkap ikan disamping mengelola tambak/ kolam ikan, dan biasanya hasil tangkapan ikan tersebut dipasarkan sendiri sehingga dinilai tidak aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka pernah dipertemukan oleh aparat kelurahan dengan pengusaha daerah untuk membuat kesepakatan bisnis berupa transaksi pengiriman produksi ikan sehingga dinilai aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakatnya, dan untuk itu senantiasa berusaha menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menaruh minat untuk menanamkan modalnya termasuk yang berkeinginan membuka pangsa pasar bagi produksi perikanan lokal di daerahnya. Pemerintah Kelurahan membuka akses yang sebesar-besarnya kepada siapapun untuk melakukan transaksi penjualan ikan di wilayahnya. Pemerintah Kelurahan memiliki keterbatasan dana ataupun sarana dan prasarana untuk melakukan promosi pemasaran ke luar, sehingga promosi hanya dilakukan dari mulut ke mulut.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa potensi perikanan yang dimiliki daerah Kabupaten Majene tergolong besar dan memerlukan pangsa pasar ekspor serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD, namun Pemda / instansi terkait termasuk pemerintah kelurahan kurang menaruh perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendorong dan mengupayakan akses pasar bagi potensi produksi tersebut sehingga warga masyarakat memasarkannya sendiri secara tradisional.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil-hasil pertanian dan perkebunan serta produksi ternak bagi warga masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 56 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil-hasil pertanian/ perkebunan dan produksi ternak bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	4	4,0
2.	Aktif	20	20,0
3.	Kurang aktif	54	54,0
4.	Tidak aktif	22	22,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 24% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa sudah sekian tahun bekerja sebagai petani / peternak dan selalu menjual hasil-hasil pertanian / perkebunan dan produksi ternaknya sendiri sehingga dinilai tidak aktif.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakatnya, dan untuk itu senantiasa berusaha menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menaruh minat untuk menanamkan modalnya termasuk yang berkeinginan membuka pangsa pasar bagi produksi hasil-hasil pertanian dan perkebunan serta produksi ternak di daerahnya. Pemerintah Kelurahan membuka akses yang sebesar-besarnya kepada siapapun untuk melakukan transaksi penjualan hasil-hasil pertanian/ perkebunan dan produksi ternak di wilayahnya. Pemerintah Kelurahan memiliki keterbatasan dana ataupun sarana prasarana untuk melakukan promosi pemasaran ke luar sehingga hanya dilakukan dari mulut ke mulut.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa potensi hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang dimiliki daerah Kabupaten Majene tergolong besar dan memerlukan pangsa pasar ekspor serta diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap PAD, namun Pemda / instansi terkait termasuk pemerintah kelurahan kurang menaruh perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendorong dan mengupayakan akses pasar bagi potensi produksi tersebut sehingga warga masyarakat memasarkannya sendiri. Fakta juga menunjukkan bahwa terkadang Pemda/ instansi terkait membuat kebijakan dengan meminta masyarakat untuk menanam suatu komoditi tertentu atau membudidayakan jenis ternak tertentu namun tidak ada upaya untuk mencarikan akses pemasaran, sehingga para petani dan peternak merasa pusing untuk mencari pasaran.

***e. Memfasilitasi pembukaan lapangan kerja***

Seiring meningkatnya angkatan kerja, sejumlah penduduk yang tidak bekerja membutuhkan lapangan pekerjaan sesuai tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Olehnya itu, pemerintah kelurahan juga berkewajiban untuk memfasilitasi penyaluran tenaga kerja ataupun berusaha mendorong pembukaan lapangan kerja di daerahnya masing-masing yang mana diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembukaan lapangan kerja bagi warga masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 57 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi kegiatan pembukaan lapangan kerja bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	4	4,0
2.	Aktif	18	18,0
3.	Kurang aktif	52	52,0
4.	Tidak aktif	26	26,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 22% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa anak-anak dan keluarganya masih banyak yang tidak punya pekerjaan atau menganggur, dan sudah kiri kanan mencari pekerjaan tetapi tetap saja menganggur, dan sampai saat ini belum ada kebijakan dari Pemda untuk membuka akses lapangan kerja bagi keluarganya.

Hasil wawancara Lurah dan Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakatnya, dan untuk itu senantiasa berusaha menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menaruh minat untuk merekrut sejumlah tenaga kerja dari warga masyarakatnya yang tidak punya lapangan pekerjaan. Di samping itu,

kerjasama juga sering dilakukan untuk melakukan pelatihan keterampilan bagi beberapa pemuda yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mandiri.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah sejak lama Pemerintah menghadapi kenyataan yaitu semakin meningkatnya angka pengangguran, termasuk pengangguran intelektual. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang membutuhkan lapangan pekerjaan, akibatnya pengangguran terus bertambah. Kenyataan itu lebih diperparah oleh minimnya usaha-usaha atau langkah-langkah konkrit yang diambil oleh Pemda/ instansi terkait untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi penduduk, terutama kalangan pemuda yang tidak punya pekerjaan dan minim keterampilan.

#### ***f. Pengentasan Kemiskinan***

Kondisi perekonomian nasional selama dekade terakhir ini belum pulih dari krisis multidimensional yang berkepanjangan. Carut marut perekonomian nasional tersebut berdampak pada semakin tingginya angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Majene. Kondisi kemiskinan demikian nampak semakin diperparah oleh kebijaksanaan pemerintah menaikkan harga BBM yang berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok lainnya sehingga semakin membawa beban hidup yang berat bagi sejumlah penduduk miskin di daerah itu.

Sejumlah program pengentasan kemiskinan pun telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, dan menuntut peran Pemkab Majene termasuk peran pemerintah kelurahan untuk mengupayakan dan menyukseskan program pemerintah tersebut melalui berbagai kegiatan seperti penyaluran bantuan dana BLT, penyaluran beras bagi penduduk miskin yang biasa disebut Raskin dan lainnya..

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi penyaluran bantuan dana BLT, raskin dan lainnya bagi warga masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 58 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendorong/ memfasilitasi kegiatan penyaluran dana BLT, raskin dan lainnya bagi warga masyarakat di daerahnya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif dan lancar	24	24,0
2.	Aktif adan lancar	62	62,0
3.	Kurang aktif/ lancar	12	12,0
4.	Tidak aktif/ lancar	2	2,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 86% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *sangat efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga

masyarakat bahwa akhir-akhir ini mereka dan keluarganya sering menerima bantuan baik berupa uang maupun beras yang dibagikan oleh aparat kelurahan sehingga dinilai aktif dan lancar. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan sudah beberapa bulan belum pernah menerima bantuan baik uang maupun sembako dari pemerintah kelurahan padahal dirinya tergolong orang miskin sama seperti sebagian warga lainnya sehingga dinilai kurang aktif/ lancar.

Hasil wawancara Lurah/ Seksi Pembangunan & Kesos Pemerintahan Kelurahan di Kab.Majene menjelaskan pihaknya sudah berusaha maksimal untuk mengkoordinasikan dan menyalurkan sejumlah bantuan bagi penduduk miskin di daerahnya seperti bantuan dana BLT, bantuan raskin, dan lainnya sebagai wujud tanggung jawabnya untuk mengatasi kondisi kehidupan warganya yang sebagian kurang beruntung.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah sejak lama Pemerintah menghadapi kenyataan yaitu semakin meningkatnya angka kemiskinan di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Majene. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah namun tetap saja jumlah penduduk miskin tidak berkurang bahkan cenderung terus meningkat. Disinilah barangkali perlu ada evaluasi dari pihak pengambil kebijakan untuk mengambil jalan alternatif lain selain secara terus menerus memberikan bantuan semata, yang kenyataannya justru semakin menjadikan penduduk miskin sebagai pengemis di negeri sendiri. Hal yang lebih penting untuk dilakukan oleh

pemerintah adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya khusus bagi penduduk yang tergolong miskin agar pendapatan mereka dapat meningkat, dan tentunya diharapkan untuk lebih mandiri.

Berdasarkan uraian analisis kelima sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pembangunan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 59 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat aktif	Aktif	Kurang aktif	Tidak aktif	
1	Pembinaan usaha	14	40	40	6	100
2	Pendidikan & pelatihan manajemen usaha	6	32	44	18	100
3	Fasilitasi bantuan modal usaha	16	34	38	12	100
4	Fasilitasi akses pemasaran	4	22	52	24	100
5	Pembukaan lapangan kerja	4	18	32	26	100
6	Pengentasan kemiskinan	24	62	12	2	100
100 Responden (%)		14 (14%)	34 (34%)	40 (40%)	12 (12%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Majene sebesar 48%, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*.

## **7. Fungsi Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pasal 5 ayat (4) PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan menetapkan bahwa Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) mempunyai fungsi yaitu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ketentuan di atas juga sejalan dengan Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan, hal mana Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai salah satu fungsi yaitu pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Fungsi pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang menjadi tanggung jawab Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kelurahan tersebut mencakup penciptaan stabilitas keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, pengadaan pos-pos siskamling, koordinasi dengan pihak aparat keamanan, dan lainnya.

Analisis terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan dalam hal pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene, dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dan dipadukan hasil wawancara dengan narasumber/ informan.

### ***Pemeliharaan stabilitas keamanan***

Stabilitas keamanan merupakan salah satu faktor atau aspek yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban umum di suatu wilayah kelurahan. .

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kegiatan pemeliharaan stabilitas keamanan bagi warga masyarakat di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 60 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan memelihara stabilitas dan perlindungan masyarakat di wilayah kelurahannya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	17	17,0
2.	Aktif	62	62,0
3.	Kurang aktif	17	17,0
4.	Tidak aktif	4	4,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 79% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering menerima penyampaian baik tertulis maupun lisan, baik langsung maupun tidak langsung dari Lurah maupun

aparatnya sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan pengamanan lingkungan sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan aparat Seksi Pemerintahan dan Trantib Pemerintah Kelurahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan keamanan kepada setiap warganya, dan untuk itu pihaknya biasanya melakukan himbauan kepada para warga untuk lebih bersikap hati-hati dalam segala hal dan senantiasa melihara kerukunan antar warga.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat sudah menjadi tanggung jawab setiap pemerintah kelurahan terutama dalam usaha menciptakan stabilitas keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat mengganggu ketentraman warga masyarakat.

### ***Penyelesaian sengketa/ perselisihan antar warga***

Dinamika kehidupan sosial dalam suatu komunitas masyarakat seringkali menimbulkan gesekan-gesekan yang berdampak pada terjadinya sengketa / perselisihan ataupun perkelahian atau konflik antar warga.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan

perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi setiap perselisihan yang terjadi antar warga di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 61.

Secara keseluruhan Tabel 61 menunjukkan bahwa 76% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering melaporkan kepada Lurah atau aparatnya setiap kejadian perselisihan ataupun pertengkaran yang melibatkan warga di sekitarnya, dan biasanya Lurah selalu turun tangan mendamaikan perselisihan itu sehingga dinilai aktif.

Tabel 61 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan aktif pemerintah kelurahan menyelesaikan perselisihan atau sengketa ataupun konflik antar warga di wilayah kelurahannya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	18	18,0
2.	Aktif	58	58,0
3.	Kurang aktif	18	18,0
4.	Tidak aktif	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah melaporkan setiap kejadian seperti perkelahian ataupun perselisihan lainnya yang melibatkan warga di sekitarnya dan biasanya suatu persoalan diselesaikan sendiri oleh warga sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan aparat Seksi Pemerintahan dan Trantib Pemerintah Kelurahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya sering menerima pengaduan ataupun laporan dari warga tertentu bilamana terjadi suatu perselisihan atau pertengkarannya/perkelahian antar sesama warga, dan untuk itu pihaknya biasanya berusaha melakukan upaya damai secara kekeluargaan setelah mendengarkan masukan berbagai pihak. Namun pun demikian jika ada warga yang bersikeras tidak mau damai maka pihaknya menyerahkan persoalan mereka kepada pihak yang berwajib untuk diambil tindakan lebih lanjut penyelesaiannya.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat sudah menjadi tanggung jawab setiap pemerintah kelurahan termasuk dalam usaha menyelesaikan setiap perselisihan ataupun perkelahian dan sengketa yang melibatkan warganya .

### ***Pembentukan sistem keamanan lingkungan***

Upaya memelihara ketentraman dan ketertiban umum di suatu wilayah kelurahan, selain dibutuhkan usaha represif juga dibutuhkan usaha preventif, yaitu mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan lingkungan bagi warga seperti pencurian, musibah kebakaran, banjir, dan lainnya. Untuk tujuan itu maka diperlukan suatu wadah bagi berlangsungnya kegiatan tersebut, termasuk pendirian pos-pos sebagai salah satu perwujudan sistem keamanan lingkungan (siskamling)

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi pembentukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di daerahnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 62 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan mendirikan pos-pos siskamling di wilayah kelurahannya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	17	17,0
2.	Aktif	71	71,0
3.	Kurang aktif	10	10,0
4.	Tidak aktif	2	2,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 88% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *sangat efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa di lingkungan sekitarnya sudah lama berdiri pos-pos siskamling sebagai tempat bagi para warga untuk memantau situasi keamanan lingkungan, dan pendirian pos-pos tersebut diperkarsai oleh Lurah dan aparatnya sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa di lingkungan sekitarnya belum ada pos-pos siskamling sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan aparat Seksi Pemerintahan dan Trantib Pemerintah Kelurahan Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam rangka menindaklanjuti himbauan pemerintahan kecamatan agar di setiap lingkungan dibentuk pos-pos siskamling, maka pihaknya segera turun tangan bersama warga masyarakat mendirikan pos-pos pengamanan lingkungan di setiap RT/RW. Adapun biaya pendirian pos-pos tersebut sebagian dari kas kelurahan dan sebagian lagi dari swadaya masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat sudah menjadi tanggung jawab setiap pemerintah kelurahan termasuk dalam usaha pendirian pos-pos siskamling sebagai salah satu cara untuk melaksanakan program pemeliharaan keamanan lingkungan.

### ***Kerjasama dalam perlindungan keamanan warga***

Gangguan keamanan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, serta dapat menimpa siapa saja termasuk warga di suatu wilayah kelurahan. Mengingat bahwa upaya pemeliharaan keamanan itu membutuhkan sejumlah persiapan baik fasilitas maupun personil serta dana sedangkan pemerintah kelurahan memiliki keterbatasan untuk itu, maka sudah suharusnya terjalin suatu kerjasama yang baik dengan pihak aparat keamanan / institusi penegak hukum seperti kepolisian, hansip, dan lainnya.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat mendorong dan memfasilitasi kerjasama dengan pihak penegak hukum atau aparat keamanan dalam rangka perlindungan keamanan bagi warga masyarakat di wilayahnya masing-masing, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 63 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan/ penegak hukum dalam rangka perlindungan keamanan warga di wilayah kelurahannya masing-masing (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	15	15,0
2.	Aktif	57	57,0
3.	Kurang aktif	22	22,0
4.	Tidak aktif	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 72% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering terlibat / dilibatkan oleh Lurah atau aparatnya untuk berhubungan dengan aparat keamanan dalam mengkoordinasikan suatu permasalahan keamanan di lingkungannya sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan

bahwa di lingkungan sekitarnya biasa didatangi oleh aparat keamanan untuk mencari warga tertentu yang dinilai memiliki permasalahan hukum atau berbuat kriminal, dan tidak pernah melihat ada koordinasi dengan pihak pemerintah kelurahan sebelumnya sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan aparat Seksi Pemerintahan dan Trantib Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa secara struktural dan fungsional, antara pemerintah kelurahan dengan aparat keamanan khususnya kepolisian sudah lama terjalin kerjasama yang baik demi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dalam wilayah pemerintahannya.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah sewajarnya antara pemerintah kelurahan dengan aparat keamanan / institusi penegak hukum tercipta suatu kerjasama yang baik karena dalam sistem ketatanegaraan kita mengharuskan hal itu. Walaupun demikian masih terkadang terjadi *miscommunication* dan *misunderstanding* diantara mereka akibat kurangnya koordinasi. Misalnya saja, seorang warga yang bermukim dalam suatu wilayah kelurahan yang memiliki masalah hukum dan harus berurusan dengan pihak yang berwajib, seharusnya Lurah atau aparatnya terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada warganya yang bermasalah tersebut untuk kemudian diserahkan secara baik-baik, namun yang sering terjadi, pihak aparat keamanan secara langsung mendatangi

warga yang bersangkutan tanpa lebih dahulu melapor ataupun meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah kelurahan setempat atau minimal ketua RT/RW atau kepala dusun / lingkungan.

***Pemberian bantuan bagi warga yang mengalami gangguan keamanan atau tertimpa musibah***

Potensi gangguan keamanan ataupun musibah/ bencana bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, serta dapat menimpa siapa saja termasuk warga di suatu wilayah kelurahan di Kabupaten Majene. Olehnya itu diperlukan sikap tanggap dari pemerintah kelurahan dan jajarannya untuk segera memberikan perhatian dan mengulurkan bantuan kepada warga yang mengalami suatu gangguan keamanan maupun yang terkena suatu musibah atau bencana alam.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan dan perangkatnya sering terlibat memberikan bantuan terhadap warganya yang mengalami gangguan keamanan seperti pencurian atau ditimpa musiba seperti kebakaran, korban banjir dan lainnya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 64 di bawah ini.

Secara keseluruhan Tabel 64 menunjukkan bahwa 79% responden memberikan jawaban aktif, dan dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa di lingkungan sekitarnya terkadang ada warga yang

kecurian ataupun tertimpa suatu musibah dan sering melihat Lurah atau aparatnya hadir memberikan perhatian sehingga dinilai aktif.

Tabel 64 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan pemerintah kelurahan memberikan bantuan terhadap warga yang mengalami gangguan keamanan atau tertimpa musibah (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif	19	19,0
2.	Aktif	60	60,0
3.	Kurang aktif	18	18,0
4.	Tidak aktif	3	3,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa selama ini jarang melihat pemerintah kelurahan turun tangan langsung memberikan perhatian ataupun bantuan bilamana terjadi suatu musibah yang menimpa keluarga atau tetangganya sehingga dinilai kurang aktif.

Hasil wawancara Lurah dan aparatnya di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa secara emosional pihaknya dengan warga masyarakat di wilayahnya telah terjalin suasana kekeluargaan yang baik sehingga bilamana terjadi suatu gangguan keamanan atau musibah yang menimp warga tertentu, maka pihaknya segera berusaha turun tang memberikan bantuan. Meskipun demikian, akibat terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki pemerintah kelurahan maka bantuan yang diberikan juga relative terbatas.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah sewajarnya pemerintah kelurahan turun tangan memberikan bantuan kepada warganya yang tertimpa suatu musibah, namun terkadang bantuan yang diberikan terlambat, bahkan ada beberapa pemerintah kelurahan yang kurang tanggap mengenai hal itu.

Berdasarkan uraian analisis kelima sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum (Trantib) di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 65 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum (Trantib) di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat aktif	Aktif	Kurang aktif	Tidak aktif	
1	Pemeliharaan stabilitas keamanan	17	62	17	4	100
2	Penyelesaian sengketa/perselisihan/konflik	18	58	18	6	100
3	Pendirian fasilitas Siskamling	17	71	10	2	100
4	Kerjasama pengamanan lingkungan dengan aparat keamanan	15	57	22	6	100
5	Bantuan perlindungan keamanan	19	60	18	3	100
100 Responden (%)		17 (17%)	62 (62%)	17 (17%)	4 (4%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan bidang pemeliharaan ketentraman

dan ketertiban umum (Trantib) di Kabupaten Majene sebesar 79%, dan dapat dikategorikan *efektif*.

Berdasarkan uraian analisis ketujuh variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 66 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian **Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan Otoda di Kabupaten Majene** (Hasil olahan data primer, 2007)

NO	INDIKATOR PENILAIAN PENILAIAN FUNGSI	KATEGORI PENILAIAN INDIKATOR				JUMLAH (%)
		<i>Sangat Baik</i>	<i>Baik</i>	<i>Kurang Baik</i>	<i>Tidak Baik</i>	
1	<i>Fungsi Koordinasi</i>	10	42	34	14	100
2	<i>Fungsi Pembinaan</i>	10	38	38	14	100
3	<i>Fungsi Pelayanan Administrasi Kependudukan</i>	16	52	24	8	100
4	<i>Fungsi Pelayanan Teknis Administrasi &amp; Tata Kerja</i>	18	45	28	9	100
5	<i>Fungsi Pembangunan Fasum &amp; Fasos</i>	14	42	32	12	100
6	<i>Fungsi Pembangunan Kesos</i>	14	34	40	12	100
7	<i>Fungsi Pemeliharaan Trantib</i>	17	62	17	4	100
100 Responden (%)		14 (14%)	45 (45%)	30 (30%)	10 (10%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Majene sebesar 59%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

#### **D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT**

Sebagaimana disebutkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan, yaitu:

- 1) *Motivasi*
- 2) *Hubungan komunikasi*
- 3) *Koodinasi dan kerjasama*
- 4) *Prasarana dan sarana*
- 5) *Kemampuan teknis*
- 6) *Peran kelembagaan*

Keenam faktor tersebut dianalisis berdasarkan hasil kuesioner dan dipadukan dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

##### **1. Motivasi**

Motivasi adalah faktor yang mendorong aparatur pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene melaksanakan fungsi kelembagaannya secara efektif sesuai yang diharapkan. Faktor motivasi ini meliputi pemahaman tugas, kepemilikan tanggung jawab dan pelaksanaannya, serta pemenuhan kebutuhan.

*Pemahaman aparatur pemerintah kelurahan akan tugas dan tanggung jawabnya menjadi hal pokok yang besar pengaruhnya terhadap motivasi mereka dalam pelaksanaan fungsinya secara keseluruhan.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah perangkat aparatur pemerintah kelurahan memahami tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 67 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pemahaman tugas dan fungsi perangkat aparatur pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat memahami	16	16,0
2.	Memahami	42	42,0
3.	Kurang memahami	34	34,0
4.	Tidak memahami	8	8,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 57% responden memberikan memahami, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka tidak pernah terlibat dan sering melihat aparat kelurahan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga dinilai kurang memahami. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering terlibat bersama aparat kelurahan sehingga dinilai memahami.

Hasil wawancara Lurah dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya cukup memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawab serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat, dan senantiasa berusaha melaksanakan tugas pekerjaan sesuai fungsi yang diemban.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa secara umum diakui masih banyak aparatur pemerintah termasuk di kelurahan yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya sehingga mempengaruhi motivasi pelaksanaan fungsinya secara keseluruhan dalam pelayanan masyarakat.

*Motivasi aparatur pemerintah kelurahan juga diindikasikan oleh tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah perangkat aparatur pemerintah kelurahan sudah menunjukkan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam setiap pelayanan kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 68 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian tanggung jawab pelaksanaan fungsi aparatur pemerintah kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Tinggi	24	24,0
2.	Sedang	52	52,0
3.	Rendah	16	16,0
4.	Sangat rendah	8	8,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 52% responden memberikan jawaban sedang sehingga dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden bahwa mereka tidak pernah terlibat bersama aparat kelurahan dalam suatu kegiatan sehingga dinilai biasa saja. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering terlibat atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan bersama aparat kelurahan sehingga dinilai tinggi.

Hasil wawancara Lurah dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya cukup memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, dan senantiasa berusaha melaksanakan tugas pekerjaan sesuai fungsi yang diemban.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa secara umum diakui masih banyak aparatur pemerintah termasuk di kelurahan yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya sehingga mempengaruhi motivasi pelaksanaan fungsinya secara keseluruhan dalam pelayanan masyarakat.

*Motivasi aparatur pemerintah kelurahan juga diindikasikan oleh terpenuhinya kebutuhan yang mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembankan kepadanya secara efektif dan optimal.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah perangkat aparatur pemerintah kelurahan sudah terpenuhi kebutuhannya yang diharapkan dapat

mendorong pelaksanaan fungsi pelayanannya secara optimal dan efektif, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 69 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian harapan pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah kelurahan yang mendorong pelaksanaan fungsi pelayanannya secara optimal dan efektif (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sesuai harapan	6	6,0
2.	Sesuai harapan	28	28,0
3.	Kurang sesuai harapan	48	48,0
4.	Tidak sesuai harapan	18	18,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 34% responden memberikan jawaban sesuai harapan, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden bahwa mereka sering terlibat bersama aparat kelurahan dan juga sering mendengar keluhan dari aparat yang bersangkutan mengenai gaji yang diterimanya setiap bulan sehingga dinilai kurang sesuai. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan bersama aparat kelurahan dan tidak pernah mendengar keluhan mereka mengenai kebutuhan gaji yang diterima setiap bulan sehingga dinilai sesuai.

Hasil wawancara Lurah dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya cukup menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai

pelayan masyarakat, dan selalu ingin berusaha melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan sebaik mungkin, namun seringkali harus berfikir mencari tambahan pendapatan lain selain gaji yang diterima setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya .

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa memang persoalan kebutuhan bagi seorang manusia termasuk aparatur pemerintah tidak pernah terpuaskan. Problema ini terus memunculkan berbagai spekulasi yang seringkali dikaitkan dengan motivasi seorang aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dan fungsinya. Seorang aparatur termasuk yang ada dalam lingkup pemerintahan kelurahan, selalu membutuhkan dan menginginkan gaji yang tinggi untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, namun kenyataannya gaji ataupun honor yang mereka terima tetap saja dinilai rendah. Adalah juga wajar jika aparat mengeluhkan dan menuntut kenaikan gaji agar kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi dan diharapkan dapat lebih terkonsentrasi melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Namun fakta lain juga menunjukkan adanya sejumlah pejabat pemerintah yang sudah mendapatkan berbagai fasilitas dan gaji yang tinggi akan tetapi merasa tidak puas dan motivasi kerjanya biasa-biasa saja. Kecenderungan motivasi pejabat tertentu justru selalu memikirkan bagaimana meraih keuntungan financial dari setiap anggaran, dan bukan bagaimana memotivasi dirinya untuk melayani masyarakat luas.

Berdasarkan uraian analisis ketiga sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian motivasi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 70 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian motivasi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Pemahaman tugas	16	42	34	8	100
2	Pelaksanaan tanggung jawab	24	52	16	8	100
3	Pemenuhan kebutuhan gaji/ insentif	6	28	48	18	100
100 Responden (%)		16 (16%)	40 (40%)	32 (32%)	12 (12%)	50 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian motivasi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Majene sebesar 46%, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*.

## 2. Hubungan Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene dalam memberikan pelayanan secara efektif kepada masyarakat sesuai yang diharapkan. Faktor komunikasi ini meliputi kegiatan hubungan

komunikasi informasi baik secara formal maupun informal antara aparatur kelurahan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya yang menjadi tanggung jawab pelayanannya .

*Kelancaran hubungan komunikasi dipengaruhi oleh adanya keterlibatan aparatur pemerintah kelurahan secara aktif untuk melaksanakan hal tersebut baik terhadap sesama aparat, pimpinan terlebih kepada masyarakat.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah perangkat aparatur pemerintah kelurahan aktif melakukan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 71 Pendapat responden tentang tingkat keterlibatan aktif perangkat aparatur pemerintah kelurahan mengajak warga masyarakat melakukan hubungan komunikasi dalam memberikan pelayanan (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aktif dan lancar	14	14,0
2.	Aktif dan lancar	42	42,0
3.	Kurang aktif	32	32,0
4.	Tidak aktif	12	12,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 56% responden memberikan jawaban aktif dan lancar, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan

responden warga masyarakat bahwa mereka sering diajak berbicara oleh Lurah dan aparaturnya mengenai suatu kegiatan sehingga dinilai aktif. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah terlibat pembicaraan baik formal maupun informal dengan aparat kelurahan sehingga dinilai kurang aktif. .

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam setiap kesempatan pihaknya selalu berusaha mengajak warga masyarakat untuk berkomunikasi baik secara formal maupun informal. Komunikasi formal biasanya dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang melibatkan warga masyarakat, sedangkan komunikasi informal biasanya dilakukan di luar kantor atau di jalan atau di tempat lain termasuk di rumah / di rumah warga.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya antara aparat pemerintah kelurahan dengan warganya tercipta suatu hubungan komunikasi baik formal maupun informal dalam suasana kekeluargaan. Hal itu penting untuk mengurangi jarak atau kesenjangan (*gap*) komunikasi yang seringkali membatasi diantara mereka. Selain itu, hubungan komunikasi yang baik dan lancar dapat pula melancarkan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pelayanan pemerintah kelurahan kepada warga masyarakat yang dipimpinnya.

*Dalam hubungan komunikasi itu, juga perlu dikedepankan saling keterbukaan antara aparat kelurahan dengan warga masyarakat.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 50 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah perangkat aparatur pemerintah kelurahan cukup terbuka dalam melakukan hubungan komunikasi dengan warga masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 72 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterbukaan perangkat aparatur pemerintah kelurahan melakukan hubungan komunikasi dengan warga masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat terbuka	18	18,0
2.	Terbuka	64	64,0
3.	Tertutup	14	14,0
4.	Sangat tertutup	4	4,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 82% responden memberikan jawaban terbuka, dan dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka dengan Lurah dan para pegawainya telah lama tercipta hubungan yang baik sehingga dinilai terbuka. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka belum pernah sama sekali bahkan tidak mengenal Lurah dan aparatnya sehingga dinilai tertutup.

Hasil wawancara Lurah dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan pelayan masyarakat, dan untuk itu senantiasa

berusaha menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan mereka kapan dan dimanapun.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya antara aparat pemerintah kelurahan dengan warganya tercipta suatu hubungan komunikasi baik dan saling terbuka satu sama lain serta senantiasa dalam suasana hubungan kekeluargaan. Hal itu penting untuk menghindari terjadi *miscommunication* dan mengurangi jarak atau kesenjangan (*gap*) komunikasi yang seringkali membatasi diantara mereka. Selain itu, hubungan komunikasi yang baik dan terbuka dijamin akan dapat memperlancar segala urusan pelayanan kepada warga masyarakat..

Berdasarkan uraian analisis kedua sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian komunikasi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 73 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian komunikasi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Keterlibatan aktif aparatur berkomunikasi	14	42	32	12	100
2	Keterbukaan dalam komunikasi	18	64	14	4	100
100 Responden (%)		16 (16%)	54 (54%)	22 (22%)	8 (8%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian komunikasi pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Majene sebesar 70%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

### **3. Kemampuan Koordinasi dan Kerjasama**

Hubungan koordinasi dan kerjasama memainkan peranan penting dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene dalam rangka melaksanakan berbagai tugas pelayanan secara efektif sesuai yang diharapkan. Faktor ini meliputi kegiatan koordinasi dan kerjasama dalam berbagai bentuk dan jenis pelayanan yang melibatkan masyarakat maupun pihak lain baik secara formal maupun informal.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah perangkat aparatur pemerintah kelurahan sering terlibat berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 74.

Secara keseluruhan Tabel 74 di bawah menunjukkan bahwa 62% responden memberikan jawaban sering, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah

terlibat / dilibatkan berkoordinasi dan bekerjasama oleh aparat kelurahan dalam setiap kegiatan sehingga dinilai jarang.

Tabel 74 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian keterlibatan perangkat aparatur pemerintah kelurahan melakukan koordinasi dan kerjasama dalam setiap pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sering	16	16,0
2.	Sering	44	44,0
3.	Jarang / terkadang	30	30,0
4.	Tidak pernah	10	10,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering diajak terlibat berkoordinasi dan bekerjasama oleh Lurah atau aparatnya apabila ada suatu kegiatan yang hendak dilaksanakan di lingkungan sekitarnya, termasuk biasanya dimintai pertimbangan dan saran atas suatu kebijakan sehingga dinilai sering.

Hasil wawancara Lurah dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan pelayan masyarakat, dan untuk itu senantiasa berusaha melibatkan warga masyarakat tertentu untuk dimintai pertimbangan dan saran sebelum mengambil suatu kebijakan. Meskipun demikian tidak semua warga masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kegiatan koordinasi dan kerjasama kecuali tuntutan pelaksanaan tugas

yang mengharuskan melibatkan semua warga masyarakat, maka pihaknya pun harus memenuhi tuntutan itu.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya antara aparat pemerintah kelurahan dengan warganya terjalin suatu hubungan koordinasi dan kerjasama yang baik dan saling kepercayaan satu sama lain serta senantiasa dalam suasana hubungan kekeluargaan. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya pro kontra atas suatu kegiatan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kelurahan.

*Koordinasi dan kerjasama selain harus dilakukan sesering mungkin oleh pemerintah kelurahan, juga dituntut kemampuan aparat kelurahan untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan oleh perangkat aparat pemerintah kelurahan sudah sesuai harapan masyarakat dalam setiap pelayanan, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 75.

Secara keseluruhan Tabel 75 menunjukkan 56% responden memberikan jawaban sesuai, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering diajak terlibat berkoordinasi dan bekerjasama oleh Lurah atau aparatnya apabila ada suatu kegiatan yang hendak dilaksanakan di lingkungan sekitarnya, termasuk biasanya

dimintai pertimbangan dan saran atas suatu kebijakan sehingga dinilai sesuai.

Tabel 75 Pendapat responden tentang tingkat kesesuaian pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara perangkat aparatur pemerintah kelurahan dengan harapan/ keinginan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sesuai	14	14,0
2.	Sesuai	42	42,0
3.	Kurang sesuai	34	34,0
4.	Tidak sesuai	10	10,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah terlibat / dilibatkan berkoordinasi dan bekerjasama oleh aparat kelurahan dalam setiap kegiatan sehingga dinilai kurang sesuai.

Hasil wawancara Lurah dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan pelayan masyarakat, dan untuk itu senantiasa berusaha melibatkan warga masyarakat tertentu untuk dimintai pertimbangan dan saran sebelum mengambil suatu kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan harapan masyarakat secara keseluruhan dalam setiap melakukan suatu kegiatan yang menyangkut atau bersentuhan dengan kebutuhan mereka.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya antara aparat pemerintah kelurahan dengan warganya terjalin suatu hubungan koordinasi dan kerjasama yang baik dan saling kepercayaan satu sama lain serta senantiasa dalam suasana hubungan kekeluargaan. Hal itu penting untuk mengerti dan memahami keinginan dan harapan-harapan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik pro dan kontra di kemudian hari.

Berdasarkan uraian analisis kedua sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian hubungan komunikasi dan kerjasama pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 76 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian hubungan koordinasi dan kerjasama pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil obahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Keterlibatan aktif aparat	16	44	30	10	100
2	Kesesuaian harapan masyarakat	14	42	34	10	100
	100 Responden (%)	15 (15%)	43 (43%)	32 (32%)	10 (10%)	50 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian hubungan koordinasi dan kerjasama pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Majene sebesar 58%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

#### 4. Prasarana dan Sarana

Faktor prasarana dan sarana merupakan faktor yang juga cukup mendukung dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene dalam memberikan pelayanan masyarakat sesuai yang diharapkan. Faktor ini meliputi ketersediaan prasarana berupa fasilitas ruang kerja dan ruang pelayanan tamu, dan lainnya, sedangkan sarana meliputi perlengkapan administrasi dan operasional terutama meja dan kursi, mesin ketik, komputer, kendaraan operasional dan lainnya.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah sudah cukup tersedia ruangan kerja dan ruang tamu pada Kantor Pemerintah Kelurahan yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan bagi warga masyarakat ketika mengurus suatu kepentingannya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 77 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian ketersediaan ruangan kerja/ tamu pada kantor pemerintah kelurahan dalam rangka pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat tersedia	14	14,0
2.	Tersedia	48	48,0
3.	Kurang tersedia /terbatas	30	30,0
4.	Tidak tersedia / sangat terbatas	8	8,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 62% responden memberikan jawaban tersedia, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering berkunjung ke kantor kelurahan untuk suatu kepentingan dan melihat tersedia sejumlah fasilitas pelayanan yang dibutuhkan seperti mesin tik, ruang tamu dan bahkan sudah ada computer sehingga dinilai tersedia. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan ada yang belum pernah berkunjung ke kantor kelurahan sehingga dinilai kurang tersedia/ terbatas.

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya menyadari besarnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk itu senantiasa berusaha untuk melengkapi fasilitas kantor guna memudahkan pelayanan masyarakat. Namun pun demikian, akibat terbatasnya kemampuan keuangan yang dimilikinya sehingga kebutuhan akan fasilitas kantor secara bertahap dipenuhi.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah kelurahan melengkapi sarana dan prasarana kantornya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Lurah sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap hal tersebut, dan bilamana kapasitas dana yang dimiliki terbatas, maka dapat saja mengajukan

proposal bantuan kepada pimpinan daerah ataupun perusahaan-perusahaan yang ada dalam wilayah kerjanya.

*Prasarana kantor berupa ruangan kerja dan ruangan pelayanan perlu ditata dan dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga yang berkunjung.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah ruangan kerja dan ruang tamu pada Kantor Pemerintah Kelurahan cukup memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi warga masyarakat ketika mengurus suatu kepentingannya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 78 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian kenyamanan ruangan kerja/ tamu pada kantor pemerintah kelurahan dalam rangka pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat aman dan nyaman	12	12,0
2.	Aman dan nyaman	46	46,0
3.	Kurang aman./ nyaman	34	34,0
4.	Tidak aman/ nyaman	8	8,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 58% responden memberikan jawaban aman dan nyaman, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering berkunjung ke kantor kelurahan untuk

suatu kepentingan dan merasa aman dan nyaman serta betah berada di dalam ruangan sehingga dinilai aman dan nyaman. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang berkunjung ke kantor kelurahan karena merasa tidak bisa bertahan dalam ruangan yang panas dan belum ada AC sehingga dinilai kurang aman/ nyaman.

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya menyadari besarnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk itu senantiasa berusaha untuk melengkapi fasilitas kantor guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang datang berkunjung. Namun pun demikian, akibat terbatasnya kemampuan keuangan yang dimilikinya sehingga kebutuhan akan fasilitas kantor secara bertahap dipenuhi.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah kelurahan berusaha menciptakan kondisi ruang kerja dan ruang pelayanan yang aman dan nyaman guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Lurah sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap hal tersebut.

*Prasarana kantor berupa ruangan kerja dan ruangan pelayanan selain harus perlu ditata dan dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga yang berkunjung, juga perlu di dukung peralatan kerja administrasi guna menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah sudah tersedia fasilitas kerja administrasi pada Kantor Pemerintah Kelurahan yang diharapkan memperlancar pelayanan, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 79 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian ketersediaan fasilitas kerja administrasi pada kantor pemerintah kelurahan dalam rangka melancarkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat tersedia	16	16,0
2.	Tersedia	50	50,0
3.	Kurang tersedia/ terbatas	24	24,0
4.	Tidak tersedia/ sangat terbatas	12	12,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 66% responden memberikan jawaban tersedia, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering berkunjung ke kantor kelurahan untuk suatu kepentingan dan melihat sudah tersedia peralatan kerja administrasi seperti mesin ketik, lemari arsip dan lainnya sehingga dinilai tersedia. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang berkunjung ke kantor kelurahan sehingga dinilai kurang tersedia..

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya menyadari besarnya tuntutan

pelayanan kepada masyarakat, dan untuk itu senantiasa berusaha untuk melengkapi fasilitas kantor guna memudahkan aparaturnya menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Namun pun demikian, akibat terbatasnya kemampuan keuangan yang dimilikinya sehingga kebutuhan akan fasilitas kantor khususnya peralatan kerja administrasi secara bertahap akan dipenuhi.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah kelurahan berusaha melengkapi kantornya dengan sejumlah peralatan kerja administrasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

*Prasarana kantor selain peralatan kerja administrasi yang perlu disediakan, juga dibutuhkan fasilitas operasional guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparaturnya di lapangan.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah sudah tersedia fasilitas kerja operasional pada Kantor Pemerintah Kelurahan yang diharapkan memperlancar operasionalisasi pelayanan, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 80

Secara keseluruhan Tabel 80 menunjukkan bahwa 44% responden memberikan jawaban tersedia, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka terkadang berkunjung ke kantor kelurahan

untuk suatu kepentingan dan melihat kurang tersedia kendaraan operasional sehingga dinilai kurang tersedia.

Tabel 80 Pendapat responden tentang ketersediaan fasilitas kerja operasional guna melancarkan operasionalisasi pelayanan (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat tersedia	8	8,0
2.	Tersedia	36	36,0
3.	Kurang tersedia/ terbatas	40	40,0
4.	Tidak tersedia/ sangat terbatas	16	16,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering berkunjung ke kantor kelurahan dan melihat aparat sudah memiliki kendaraan roda dua atau kendaraan bermotor sehingga dinilai tersedia..

Hasil wawancara pemerintahan kelurahan dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya menyadari besarnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk itu senantiasa berusaha untuk melengkapi fasilitas operasional terutama kendaraan roda dua guna memudahkan aparat menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan, dan saat ini sudah ada beberapa unit kendaraan walaupun hanya sebagian aparat yang diberikan akan tetapi kendaraan itu dapat digunakan oleh semua aparat dalam lingkup unit kerjanya bilamana dibutuhkan. Namun pun demikian, akibat terbatasnya kemampuan keuangan Pemda sehingga kebutuhan akan fasilitas tersebut secara bertahap akan dipenuhi.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah kelurahan berusaha melengkapi kantornya dengan sejumlah peralatan kerja administrasi dan kendaraan operasional guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat di lapangan.

Berdasarkan uraian analisis keempat sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian ketersediaan prasarana dan sarana pada kantor pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 81 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian ketersediaan prasarana dan sarana pada kantor pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Ketersediaan ruang kerja/ pelayanan	14	48	30	8	100
2	Kenyamanan	12	46	34	8	100
3	Ketersediaan fasilitas administrasi	16	30	24	12	100
4	Ketersediaan fasilitas operasional	8	36	40	16	100
100 Responden (%)		12 (12%)	46 (46%)	32 (32%)	10 (10%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian ketersediaan prasarana dan sarana pada kantor pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Majene sebesar 58%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

## 5. Kemampuan Kerja dan Teknis

Faktor kemampuan teknis merupakan faktor yang sangat penting, mendukung dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene. Faktor ini meliputi kemampuan dan ketersediaan jumlah pegawai/tenaga teknis yang terampil dan profesional dapat diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan.

*Ketersediaan jumlah tenaga teknis yang terampil mutlak dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kelembagaan pemerintah kelurahan.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah sudah cukup tersedia tenaga teknis pada Kantor Pemerintah Kelurahan yang mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 82 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian ketersediaan tenaga teknis pada kantor pemerintah kelurahan yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat tersedia	10	10,0
2.	Tersedia	36	36,0
3.	Kurang tersedia /terbatas	40	40,0
4.	Tidak tersedia / sangat terbatas	14	14,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 46% responden memberikan jawaban tersedia, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering berkunjung ke kantor kelurahan untuk mengurus suatu keperluan dan selalu ada aparat yang menyapa dan memberikan pelayanan sehingga dinilai tersedia/ memadai. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka terkadang berkunjung ke kantor kelurahan untuk mengurus suatu kepentingan namun terkadang harus menunggu lama karena aparat yang bertugas menangani keperluan yang dibutuhkan tidak ada di tempat sehingga dinilai kurang tersedia/ memadai.

Hasil wawancara Lurah di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, pihaknya didukung beberapa orang aparat yang sehari-harinya bertugas melaksanakan pekerjaan administrasi maupun menjalankan / memberikan pelayanan langsung kepada warga masyarakat yang membutuhkannya. Namun pun demikian, mengingat semakin luas dan besarnya jangkauan pelayanan yang harus ditunaikan maka terasa perlu ada penambahan tenaga teknis agar pelayanan di lapangan dapat lebih ditingkatkan. Pihaknya akan berusaha merekrut beberapa orang tenaga teknis bilamana kemampuan keuangan yang dimilikinya memadai/ mendukung.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang menghambat efektifnya pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan adalah jumlah tenaga

teknis yang masih relatif sangat terbatas. Akibatnya sejumlah kebutuhan pelayanan di lapangan seringkali tertunda bahkan diabaikan karena alasan itu. Kenyataan permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian Pemda Kabupaten Majene/ instansi terkait untuk mengupayakan solusinya agar harapan masyarakat akan mutu pelayanan dapat terpenuhi.

*Kemampuan kerja teknis aparat biasanya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin luas pengetahuan dan wawasannya dalam melaksanakan fungsinya..*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah aparat yang ada pada Kantor Pemerintah Kelurahan sudah didukung tingkat pendidikan yang memadai dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 83 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pendidikan aparat pada kantor pemerintah kelurahan yang mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat mendukung	8	8,0
2.	Mendukung	32	32,0
3.	Kurang mendukung	46	48,0
4.	Tidak mendukung	12	12,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 40% responden memberikan jawaban mendukung, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering berkunjung ke kantor kelurahan untuk mengurus suatu keperluan dan mengetahui tingkat pendidikan aparat yang masih rata-rata SLTP atau SLTA bahkan masih ada tamatan SD sehingga dinilai kurang mendukung. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka mengenal beberapa aparat di kantor kelurahan yang diketahui adalah sarjana sehingga dinilai mendukung.

Hasil wawancara Lurah di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, aparatnya sudah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas pekerjaannya masing-masing karena didukung pendidikan. Meskipun demikian juga diakui pihaknya terkadang menerima keluhan dari warga tertentu karena merasa kurang puas dengan pelayanan aparatnya, namun semua itu dapat diatasi dengan baik. Beberapa aparat juga diakui perlu ditingkatkan mutu pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi bilamana tersedia dana yang memadai.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa kendala utama yang juga dominan menghambat efektifnya pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan adalah masih rendahnya profesionalisme aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya kepada masyarakat. Sejumlah aparat dengan tingkat

pendidikan yang relatif masih rendah perlu diberikan pembinaan atau diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan dan/ atau diberikan kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan kerja sehingga diharapkan mutu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya dapat meningkat.

Kemampuan kerja teknis aparat biasanya juga dipengaruhi oleh tingkat kecakapan dan keterampilannya. Kecakapan dan keterampilan dapat diperoleh melalui pelatihan sehingga para aparat kelurahan perlu ditingkatkan mutu pelatihan keterampilannya agar mutu pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat juga meningkat.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah aparat yang ada pada Kantor Pemerintah Kelurahan sudah memiliki kecakapan/ keterampilan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 84 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian kemampuan keterampilan aparat pada kantor pemerintah kelurahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat cakap dan terampil	6	6,0
2.	Cakap dan terampil	34	34,0
3.	Kurang cakap/ terampil	44	44,0
4.	Tidak cakap / terampil	16	16,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 40% responden memberikan jawaban cakap dan terampil, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering berkunjung ke kantor kelurahan untuk mengurus suatu keperluan dan selalu mendapat pelayanan yang cepat sehingga dinilai cakap / terampil. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka terpaksa harus menunggu lama dan terkadang mempersoalkan/ mengeluhkan hasil kerja pelayanan aparat dari kantor kelurahan yang kurang memuaskan sehingga dinilai kurang cakap/ terampil.

Hasil wawancara Lurah di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, aparatnya sudah mengetahui dan cakap dalam melaksanakan tugas pekerjaannya masing-masing. Meskipun demikian juga diakui pihaknya terkadang menerima keluhan dari warga tertentu karena merasa kurang puas dengan pelayanan aparatnya, namun semua itu dapat diatasi dengan baik. Beberapa aparat juga diakui perlu ditingkatkan mutu keterampilannya melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa kendala utama yang juga dominan menghambat efektifnya pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan adalah masih rendahnya profesionalisme aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya kepada masyarakat. Sejumlah aparat dengan tingkat

pendidikan yang relatif masih rendah perlu diberikan pembinaan atau diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan dan/ atau diberikan kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan kerja sehingga diharapkan mutu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya dapat meningkat.

Berdasarkan uraian analisis ketiga sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian kemampuan kerja teknis pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 85 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian kemampuan kerja teknis pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsinya (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Ketersediaan jumlah tenaga teknis	10	36	40	14	100
2	Pendidikan	8	32	48	12	100
3	Keterampilan	6	34	44	16	100
100 Responden (%)		8 (8%)	34 (34%)	44 (44%)	14 (14%)	100 (100%)

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kemampuan kerja teknis pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Majene sebesar 42%, dan dapat dikategorikan *tidak efektif*.

## 6. Peran Kelembagaan

Kebijaksanaan pimpinan dalam suatu organisasi/ instansi pemerintah cukup berperan di dalam mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi aparatur yang dipimpinnya terhadap performansi pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder secara keseluruhan. Peran kelembagaan adalah keterlibatan langsung kepala pemerintahan kelurahan (Lurah) mengambil kebijakan untuk berperan di dalam melancarkan pelaksanaan fungsi kelembagaan pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene. Faktor ini meliputi komitmen pimpinan, sikap empati, responsibilitas, akuntabilitas serta program-program pelayanan yang terencana dan lainnya.

*Komitmen pimpinan berperan / berpengaruh di dalam menggerakkan daya kerja aparatur melaksanakan fungsinya secara keseluruhan.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pimpinan pemerintah kelurahan/ Lurah memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan fungsi kelembagaannya bagi pelayanan kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 86.

Secara keseluruhan, Tabel 86 menunjukkan 58% responden memberikan jawaban baik dan memadai, dan dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam setiap

kegiatan di kelurahan dan melihat pelaksanaan fungsi pelayanan aparat kelurahan nampak berjalan biasa-biasa saja sehingga dinilai kurang memadai.

Tabel 86 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian komitmen pimpinan pemerintah kelurahan dalam mengefektifkan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat baik dan memadai	16	16,0
2.	Baik dan memadai	42	42,0
3.	Kurang memadai	36	36,0
4.	Tidak memadai	6	6,0
	Jumlah	100	100,0

Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering diundang menghadiri atau mengikuti pengarahan Lurah mengenai berbagai hal yang menyangkut pembangunan yang ingin dicapai dan kualitas pelayanan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah kelurahan sehingga dinilai baik dan memadai.

Hasil wawancara Lurah dan staf kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk menjalankan semua tugas-tugas dan fungsi yang diemban lembaganya sesuai petunjuk dan arahan pemerintahan kecamatan maupun pimpinan daerah.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah kelurahan memiliki

komitmen yang tinggi untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparatur dan selaku pemimpin masyarakat yang tertinggi di tingkat kelurahan, namun kenyataannya komitmen itu tidak semudah yang diharapkan dalam aplikasinya. Terkadang ada komitmen yang sering diomongkan dalam setiap pidato dengan penuh semangat namun kenyataan dalam pelaksanaannya jauh dari harapan. Fenomena ini perlu dievaluasi setiap pimpinan kelurahan agar apa yang diucapkan sejalan dengan apa yang diperbuat sehingga masyarakat akan semakin percaya pada kepemimpinannya. Selain itu, pihak pimpinan daerah juga seharusnya memberikan motivasi kepada kelurahan dan tidak mudah melakukan intervensi kepada Lurah sepanjang yang dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.

*Peran kelembagaan pemerintah kelurahan juga tercermin dari sikap empati yang dimiliki dalam melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat secara optimal. Sikap empati perlu dikedepankan melalui perilaku aktif memberikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang mengeluhkan / mengadukan suatu permasalahan yang dihadapi.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pimpinan pemerintah kelurahan/ Lurah aktif memberikan perhatian terhadap setiap permasalahan yang dikeluhkan atau diadukan oleh warga masyarakat kepadanya, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada Tabel 87.

Tabel 87 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian empati pimpinan pemerintah kelurahan dalam memberikan perhatian terhadap setiap permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan oleh warga masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat baik	22	22,0
2.	Baik	56	56,0
3.	Kurang baik	48	48,0
4.	Tidak baik	4	4,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan Tabel 87 menunjukkan 78% responden memberikan jawaban baik, dan dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering mengadukan suatu permasalahan kepada Lurah atau aparatnya dan selalu mendapat respon yang baik sehingga dinilai baik. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengadukan permasalahan kepada Lurah sehingga dinilai kurang baik.

Hasil wawancara Lurah dan staf kelurahan di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, sehingga senantiasa berusaha memberikan perhatian setiap permasalahan yang diadukan oleh warga masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pemerintah kelurahan memiliki

rasa empati yang tinggi terutama dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh atas setiap permasalahan yang diadukan warga masyarakat kepadanya. Hal ini cukup beralasan mengingat pemerintah kelurahan (Lurah) berperan sebagai pemimpin masyarakat tertinggi di wilayahnya.

*Peran kelembagaan pemerintah kelurahan juga tercermin dari sikap tanggung jawab atau responsibilitas yang dimiliki dalam melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat secara optimal. Sikap ini perlu dikedepankan mengingat kedudukannya sebagai pemimpin yang menjadi panutan aparat dan warga masyarakat di wilayah kekuasaannya.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah tanggung jawab pimpinan pemerintah kelurahan/ Lurah sudah sesuai melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 88 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian pelaksanaan tanggung jawab/ responsibilitas pimpinan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat baik / memadai	22	22,0
2.	Baik /memadai	58	58,0
3.	Kurang memadai	16	16,0
4.	Tidak memadai	4	4,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 80% responden memberikan jawaban baik dan memadai, dan dapat dikategorikan *efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka sering mendengarkan janji Lurah kepada warganya dalam setiap pengarahannya dan janji tersebut hampir seluruhnya dipenuhi sehingga dinilai baik dan memadai. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka jarang bahkan tidak pernah mengetahui apa tanggung jawab pemerintah kelurahan sehingga dinilai kurang memadai.

Hasil wawancara Lurah dan staf di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, sehingga senantiasa berusaha melaksanakan setiap fungsi pelayanannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab yang mutlak harus dipenuhi dalam seluruh pelaksanaan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, namun kenyataannya masih terkadang masih ada hal-hal yang dilaksanakan kurang sesuai tanggung jawab yang seharusnya.

*Peran kelembagaan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsinya juga termasuk pelaksanaan kebijaksanaan program-program pelayanan prima yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah daerah.*

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden dari pertanyaan yang diajukan tentang apakah pemerintah kelurahan sudah mengalikasikan kebijaksanaan program-program pelayanan prima dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat, diperoleh jawaban sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 89 Pendapat responden tentang tingkat kesesuaian aplikasi kebijaksanaan program-program pelayanan prima dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kelurahan (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Pendapat Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat sesuai	16	16,0
2.	Sesuai	38	38,0
3.	Kurang sesuai	36	36,0
4.	Tidak sesuai	10	10,0
	Jumlah	100	100,0

Secara keseluruhan, 54% responden memberikan jawaban sesuai , dan dapat dikategorikan *kurang efektif*. Hal senada terungkap dari hasil wawancara penulis dengan responden warga masyarakat bahwa mereka kurang mengetahui program-program pelayanan prima sehingga dinilai kurang sesuai. Tanggapan responden lainnya mengungkapkan bahwa mereka sering diundang menghadiri atau mengikuti pengarahan Lurah mengenai suatu program pelayanan prima yang dicanangkan Pemkab Majene dan ingin diterapkan oleh pemerintah kelurahan sehingga dinilai sesuai.

Hasil wawancara Lurah di Kabupaten Majene menjelaskan bahwa pihaknya senantiasa berusaha mengaplikasikan setiap program termasuk program pelayanan prima yang diperintahkan dari pimpinan (Camat dan Setda/ Bupati) ke dalam pelaksanaan fungsi pelayanannya kepada masyarakat dalam wilayah pemerintahannya, namun terkadang tidak semua program tersebut dapat dilaksanakan oleh karena keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga teknis serta dana.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber / informan mengungkapkan bahwa aplikasi setiap program Pemerintah Daerah kepada pemerintah kelurahan dalam seluruh pelaksanaan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta harus disertai / didukung infrastruktur dan dana.

Berdasarkan uraian analisis keempat sub variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian peran kelembagaan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Secara keseluruhan Tabel 90 menunjukkan, tingkat pencapaian peran kelembagaan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Majene sebesar 68%, dan dapat dikategorikan *kurang efektif*.

Tabel 90 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian peran kelembagaan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

No.	Indikator Penilaian	Kategori Penilaian Indikator				Jumlah (%)
		Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Komitmen pimpinan	16	42	36	6	100
2	Empati	22	56	18	4	100
3	Responsibilitas	22	58	16	4	100
4	Aplikasi kebijaksanaan	16	38	36	10	100
100 Responden (%)		20 (20%)	48 (48%)	26 (26%)	6 (6%)	100 (100%)

Berdasarkan uraian analisis keenam variabel di atas, dapat diketahui tingkat pencapaian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 91 Pendapat responden tentang tingkat pencapaian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan dalam pelayanan administrasi masyarakat di Kabupaten Majene (Hasil olahan data primer, 2007)

NO	INDIKATOR PENILAIAN VARIABEL	KATEGORI PENILAIAN INDIKATOR				JUMLAH (%)
		Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah	
1	<i>Motivasi</i>	16	40	32	12	<b>100</b>
2	<i>Hub. Komunikasi</i>	16	54	22	8	<b>100</b>
3	<i>Koordinasi dan kerjasama</i>	16	42	32	10	<b>100</b>
4	<i>Prasarana dan sarana</i>	12	46	32	10	<b>100</b>
5	<i>Kemampuan teknis</i>	8	34	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
6	<i>Peran kelembagaan</i>	20	48	26	6	<b>100</b>
<b>100 Responden (%)</b>		<b>14 (14%)</b>	<b>44 (44%)</b>	<b>32 (32%)</b>	<b>10 (10%)</b>	<b>100 (100%)</b>

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian faktor motivasi, hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama, prasarana dan sarana, kemampuan teknis, dan peran kelembagaan terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene sebesar **58%**, dan dikategorikan *kurang efektif*.

Faktor kemampuan teknis adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene.

## F. Pembahasan

Sebagaimana dikatakan oleh Indrawijaya (1989 : 25) bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi yang dicapai oleh total personil yang ada dalam suatu lembaga/organisasi. Efektivitas organisasi dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Sedangkan menurut Etzioni (1985 : 12), efisiensi organisasi berkaitan dengan sumber daya per satuan *output*. Berdasarkan pendapat tersebut tergambar bahwa efektivitas ditentukan oleh adanya sumber daya dalam hal ini personil pelaksana kegiatan.

Dalam suatu organisasi, baik organisasi yang berskala besar maupun kecil, efektivitas merupakan konsep yang perlu diperhatikan karena efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya (Lubis dan Husaini, 1987 : 55). Efektivitas juga digambarkan sebagai hasil guna yang diakibatkan oleh usaha yang telah dilakukan secara riil, sedangkan efisiensi menggambarkan tingkat sumber daya berupa manusia, dana dan alam yang diperlukan untuk mendapatkan *output* tertentu (Sutarto, 1982 : 34).

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6) PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan menetapkan bahwa Pemerintah Kelurahan (Lurah dan perangkatnya) mempunyai fungsi yaitu : pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Keputusan Bupati Majene No.365 Tahun 2001 tentang Uraian

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan terutama fungsi pembinaan, dimana dalam penjabarannya menjelaskan bahwa fungsi pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan mencakup: 1) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, 2) pembinaan pelaksanaan pembangunan, 3) pembinaan kemasyarakatan, dan 4) pembinaan administrasi, organisasi dan tata kerja serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

Efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan di Kabupaten Majene terutama dalam administrasi pelayanan kepada masyarakat berarti tingkat keberhasilan aparatur pemerintah kelurahan dalam mengadministrasikan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sesuai tujuan dan sasaran serta target yang ingin dicapai.

Slamet Prayudi. A (1982) mengemukakan bahwa administrasi atau "tata usaha" itu terdiri atas empat macam, yakni :

- (1) tata usaha umum untuk memperlancar pekerjaan dan tata hubungan pimpinan organisasi dengan instansi-instansi (relasi-relasi) atau pihak-pihak lain dalam rangka memajukan usaha organisasi,
- (2) tata Usaha tehnik operasional, yakni *information handling* khusus untuk mengikuti jalannya *line operations*,
- (3) tata usaha sumber daya yakni *information handling* khusus untuk mengikuti penggunaan dan keadaan *resources* (tata

usaha keuangan, tata usaha personil, tata usaha logistik, dan sebagainya), dan

- (4) tata usaha khusus untuk memperlancar pengambilan keputusan-keputusan, maka pekerjaan sekretaris itu tergolong dalam tata usaha umum guna membantu memperlancar jalannya pekerjaan dan komunikasi pimpinan organisasi, hanya sifatnya lebih luas sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Hakekat administrasi (pelayanan) dari berbagai pandangan (definisi) meliputi adanya : 1) pengaturan kerjasama, 2) kegiatan sekelompok orang, 3) mencapai tujuan tertentu, dan 4) secara rasional. Pangkal tolak administrasi adalah organisasi. Selain unsur statis, juga merupakan wadah tempat orang-orang bekerjasama dalam suatu pola tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan, sehingga terjadi proses dinamis secara rasional guna mencapai tujuan.

Fungsi organisasi pemerintahan dalam struktur pemerintahan daerah adalah mengupayakan berbagai kegiatan administrasi secara optimal, dan merupakan bentuk pelayanan yang memberikan hayat (hidup dinamis) kepada organisasi sehingga organisasi dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Fungsi Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene mengupayakan kegiatan administrasi (pelayanan) secara optimal yang memberikan hayat (Hidup dinamis) dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan tugas pokok pelayanan administrasi masyarakat dalam wilayah pemerintahannya.

Tugas dan fungsi Pemerintahan Kelurahan mengupayakan berbagai kegiatan administrasi merupakan bentuk pelayanan. Perwujudan pelayanan yang baik dan memuaskan oleh Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat menurut Moenir (1999) adalah: 1) adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang dibuat-buat, 2) memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu baik untuk alasan dinas, maupun untuk alasan kesejahteraan, 3) mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kelurahan dalam memainkan fungsi pelayanannya belum berjalan optimal, terutama karena rendahnya kemampuan teknis aparatur di kelurahan itu sendiri. Rendahnya kemampuan teknis itu secara signifikan mempengaruhi seluruh proses administrasi yang dilakukan dalam Kantor Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene, baik proses layanan yang keluarannya tertuju pada orang, kelompok orang dalam komunitas masyarakat maupun instansi teknis lain yang terkait.

Selanjutnya Moenir menyatakan bahwa pelayanan ke dalam merupakan rangkaian awal yang berlanjut pada pelayanan keluar. Jika

pelayanan ke dalam tertib dan lancar, maka pelayanan keluar juga tertib dan lancar. Pernyataan teori ini juga terjadi pada Kantor Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Majene, hal mana kurangnya manajemen pelayanan internal organisasi Pemerintah Kelurahan itu juga berpengaruh kepada kurang optimalnya pelayanan kepada stakeholder dan komponen masyarakat lainnya di Kabupaten Majene.

Komponen kualitas terpadu dalam suatu proses pelayanan meliputi : 1) pegawai/ karyawan yang terlibat perlu secara kontinyu diberi pelatihan sehingga semakin proporsional dalam memberikan layanan kepada konsumen, 2) kualitas hubungan antar pribadi tercipta semangat korps agar mereka merasa satu keluarga yang berjuang bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan, 3) ketaatan dan disiplin yang diperlihatkan sebagai akibat meningkatnya kualitas para karyawan, akan meningkatkan berlangsung secara efektif dan produktivitas meningkat..

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih kurang efektifnya pelaksanaan fungsi aparatur Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan sehingga perlu mendapat pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis. Demikian halnya komitmen dan kebersamaan serta kedisiplinan masih tergolong rendah. Dari kesemuanya itu berdampak pada kurang efektifnya fungsi organisasi kelembagaan Pemerintah Kelurahan secara keseluruhan di Kabupaten Majene.

Standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh aparatur perangkat Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene adalah kemampuan dalam :

- 1) menjelaskan kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi instansi dalam hubungannya dengan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) menerapkan konsep dan teknik pengorganisasian, dan koordinasi dengan benar, baik dalam hubungan internal maupun eksternal;
- 3) mengoperasionalkan sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pelayanan prima;
- 4) melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- 5). melaksanakan kebijakan pelayanan prima;
- 6) mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya;
- 7) menerapkan prinsip dan teknik perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja unit organisasi;
- 8) membangun kerjasama dengan unit-unit terkait, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya;
- 9) menerapkan teknik pengelolaan, penyampaian informasi dan pelaporan yang efektif dan efisien;
- 10) memotivasi SDM dan atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja;
- 11) mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 12) memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kegiatan kepada atasannya.

Faktor lain yang besar pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene adalah rendahnya motivasi dari aparatur perangkat kelurahan itu sendiri.

Maslow (1984) mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarah kepada perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Selanjutnya Herzberg dalam Gibson (1990) menjelaskan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kepuasan pegawai, dan faktor lainnya yang dapat mencegah terjadinya kepuasan dikalangan anggota organisasi. Kepuasan kerja (*Job Satisfaction*) tidak berada pada tingkat yang sama dengan ketidakpuasan (*Job Dissatisfaction*). Faktor yang pertama adalah 'motivator' yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan perasaan positif terhadap pekerjaan dan isi pekerjaan itu, termasuk pengakuan terhadap kemampuan dan prestasi kerja, kesempatan karier, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan perasaan negative terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Faktor higienis meliputi kebijaka organisasi, administrasi, supervisi teknis, gaji, kondisi kerja, hubungan antar pribadi dan organisasi.

Batinggi (1990) mengemukakan ada 3 esensi pendekatan *human relation traditional* yaitu :1) motivasi utama aparat ialah ekonomi dan keamanan suatu kondisi lingkungan yang menyenangkan, 2) pemenuhan kebutuhan sebagai imbalan kerja akan berpengaruh positif terhadap moral

aparatur, dan 3) terdapat korelasi positif dengan tingkat produktivitas. Hasibuan (1997) menjelaskan bahwa secara spesifik, peningkatan kualitas kinerja sumber daya aparatur adalah *motivasi*. Pemberian motivasi oleh kepala/ pimpinan atau manajer kepada bawahannya adalah peningkatan kinerja.

Untuk meningkatkan peranan dan fungsi pemerintah kelurahan, diperlukan kemampuan dan kemauan (motivasi) setiap Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*). Kesadaran (motivasi) seorang Lurah dalam memberikan pelayanan ditentukan oleh faktor : *Pertama*; Faktor ideal yang bersumber dari rasa kasih sayang, tolong menolong dan beramal saleh. *Kedua* Faktor material dari sudut organisasi berupa hak dan kewajiban yang ditujukan kepada yang berkepentingan. Sasaran manajemen pelayanan umum yaitu kepuasan walaupun sifatnya relatif, tetapi bisa dikenali pihak memperoleh pelayanan dan yang diukur apakah ia dapat menerima perlakuan dan hasil berupa hak dengan kegembiraan dan keikhlasan.

Dikatakan Musanef (1992,56) bahwa pembinaan karier pada dasarnya mempunyai dua sasaran timbal balik, yaitu : pembinaan karier harus ditujukan agar fungsi-fungs dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien, memberikan prospek yang baik bagi masa depan pegawai antara lain dengan memberikan kehidupan yang layak, kenaikan pangkat, jabatan yang jelas prospeknya, tempat pekerjaan yang menyenangkan dan jaminan-jaminan sosial lainnya, pembinaan sistem

karier yang tepat adalah merupakan salah satu dimensi organisasi yang baik, oleh karena dengan sistem pembinaan karier yang baik dan dilaksanakan dengan baik pula akan dapat menimbulkan kegairahan bekerja, dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh pegawai, tetapi sebaliknya apabila tidak ada sistem pembinaan karier yang baik atau secara formal ada sistem pembinaan karier yang baik tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan berbagai macam frustrasi kemudian dapat menurunkan gairah dan prestasi serta produktivitas kerja para aparatur Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Majene.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pemerintah kelurahan belum efektif dalam melancarkan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kabupaten Majene. Kekurang efektifan pelaksanaan fungsi tersebut terutama dalam hal fungsi koordinasi dan fungsi pembinaan. Pelaksanaan fungsi koordinasi perangkat aparatur pemerintah kelurahan masih dilakukan terbatas pada hubungan struktural saja secara Bottom-Up dan Top Down (Koordinasi Vertikal), sedangkan koordinasi horisontal dengan instansi terkait atau lembaga lainnya jarang dilakukan. Fungsi pembinaan pemerintah kelurahan juga nampak belum dilaksanakan secara baik dan masih terbatas tanpa ada upaya pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan sosialisasi teknis pelayanan administrasi.
2. Secara keseluruhan, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, kemampuan koordinasi dan kerjasama, hubungan komunikasi, kemampuan kerja/ teknis, prasarana dan sarana, serta

peran kelembagaan. Motivasi kerja perangkat aparatur pemerintah kelurahan masih rendah terutama dalam hal tanggung jawab pelaksanaan tugas pekerjaan, demikian halnya kemampuan kerja dan disiplin kerja masih cukup rendah akibat perilaku aparatur yang suka menunda atau lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam hal koordinasi dan kerjasama, perangkat aparatur pemerintah kelurahan masih terbiasa mengesampingkan aspek ini dan menganggap kurang penting sehingga kurang mendapat perhatian dan tidak dilaksanakan secara optimal.

Faktor komunikasi aparatur pemerrintah kelurahan sudah agak baik namun intensitasnya rendah dan masih kurang mengedepankan transparansi atau keterbukaan, sedangkan faktor prasarana dan sarana juga relatif masih terbatas terutama seperti komputer dan kendaraan operasional. Demikian pula kelembagaan pemerintah kelurahan belum optimal dalam memainkan peranannya terutama masih lemahnya komitmen pimpinan dan perangkat kelurahan, kurangnya empati, responsibilitas serta akuntabilitas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan kelurahan secara keseluruhan di Kabupaten Majene.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemerintah Kelurahan mengevaluasi pelaksanaan fungsinya terutama efektivitas fungsi koordinasi dan fungsi pembinaan dalam rangka melancarkan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kabupaten Majene.
2. Mengingat masih adanya beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut, maka diharapkan kepada keempat belas pemerintahan kelurahan di Kabupaten Majene untuk segera mengambil kebijakan dan menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan motivasi kerja, disiplin kerja, kemampuan koordinasi dan kerjasama, hubungan komunikasi, kemampuan kerja/ teknis, serta peran kelembagaannya. Selain itu, Pemerintah Kelurahan perlu memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarannya agar dapat melancarkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi maupun tugas operasionalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman.1987. *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pemerintahan*, Penerbit PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Bryant, C dan Louise G. W, 1989, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, (Terjemahan : Rusyanto), LP3ES, Jakarta.
- Cochran, G. W. 1991. *Teknik Penarikan Sampel*. Jakarta: Universitas Indonesia
- 4
- Danim,S.1997. *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*, Jakarta: Bumi Aksara
- Darwis.2000. *Otonomi Daerah dan Proses Demokratisasi di Indonesia*, Kalammedia Pustaka Makassar untuk Fisip UNHAS. Makassar
- Davis, K dan Newstrom, J.W.1994. *Human Behavior at Work: Organization Behavior*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 1994
- Fayol, Henry. 1996. *Principle of Management*, Mc.Grew Hill. Pub. Comp.Ltd.New Delhi
- Gibson, L.James, dkk.1993. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur dan Proses*. Erlangga, Jakarta
- Handayaniingrat S, 1989, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, CV. Hajimasagung, Jakarta
- Laica Marzuki,1999. *Hukum dan Pengembangan Otonomi Daerah*. Diklat TMPPL Nasional Makassar
- Maslow, A. 1984. *Motivasi dan Kepribadian*. Penerbit Pustaka Bina Pressindo, Jakarta
- Mikkelsen.2001. *Reran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Moenir, As, 1991. *Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta.
- Muhadjir, N. 2001. *Identifikasi Faktor-Faktor Opinion Leader Inovatif Bagi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Rake Sarasin

- Mokodompit.M,1989. *Beberapa Aspek Pemerintahan Daerah*. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Moenir, A.S., 1997. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawajan di Indonesia*. Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Ndraha, T, 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Priyono. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat* Penerbit Erlangga, Jakarta. 1996
- Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2006. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Makassar: PPS UNHAS
- Riwu Kaso, Yosef, 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang,2002. *Arus Batik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sofwan Badri, *Konsep-Konsep Dasar Administrasi. Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Pemerintahan Desa. (Suatu Telaah Administrasi Negara)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugyono, 1989. *Metodologi Penelitian Administrasi*; Alfabeta, Bandung.
- Yakin, A. 1997. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan : Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Makassar: Akademika Presindo